

Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat



Rachma Indah Nurbani

LAPORAN LAPANGAN SMERU

**Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di
Kabupaten Lombok Utara - Provinsi
Nusa Tenggara Barat**

Rachma Indah Nurbani

Kartawijaya

Steve Christiantara

Rahmayati

Editor

Fandi Muhammad H.

The SMERU Research Institute

Februari 2020

Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Utara - Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penulis: Rachma Indah Nurbani

Editor: Fandi Muhammad H.

Foto Sampul: Dok. SMERU

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Rachma Indah Nurbani

Laporan lapangan SMERU: Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Utara – Provinsi Nusa Tenggara Barat/ Ditulis oleh Rachma Indah Nurbani, Kartawijaya, Steve Christianlara, Rahmayati.

V; 69 hlm.; 29 cm.

ISBN 978-602-7901-55-1 (PDF)

ISBN 978-623-7492-17-7

1. Pendidikan 2. Kabupaten Lombok Utara

I. Judul

370.7 –ddc 23

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No.10A

Jakarta 10330

Indonesia

Cetakan pertama, Februari 2020



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

TIM PENELITIAN

Peneliti SMERU

Rachma Indah Nurbani

Peneliti Lapangan

Kartawijaya

Steve Christiantara

Rahmayati

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) yang telah memfasilitasi dan memberi arahan teknis selama pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, khususnya bupati, sekretaris daerah, dan kepala badan/Dinas bidang pendidikan beserta stafnya, yang telah memperlancar dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para informan kunci di bidang pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atas informasinya yang berharga. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terakhir, kami berterima kasih kepada para peneliti di Kabupaten Lombok Utara dan peneliti tamu yang telah membantu tim peneliti SMERU dalam melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan informasi di lapangan.

Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Rachma Indah Nurbani, Kartawijaya, Steve Christianara, dan Rahmayati

Pada Agustus 2016, The SMERU Research Institute (SMERU) melakukan studi diagnostik terhadap sistem pendidikan di tingkat daerah (*District Diagnostic Survey*) yang meliputi (i) pemetaan pemangku kepentingan, (ii) analisis ekonomi politik atas permasalahan pendidikan yang dihadapi daerah, dan (iii) pemetaan kebijakan atau inovasi pendidikan di daerah. Studi diagnostik ini merupakan rangkaian awal persiapan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) yang merupakan bentuk kemitraan antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Studi ini bertujuan menghasilkan bukti tentang apa yang berhasil (dan dalam situasi seperti apa) sehingga hasil belajar siswa di tingkat pendidikan dasar meningkat dan memfasilitasi pemanfaatan bukti tersebut untuk kebijakan pendidikan yang lebih berarti dan mengubah praktik ke arah yang lebih baik.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor utama yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran murid di dalam kelas adalah guru, orang tua, serta sarana dan prasarana pengajaran. Dalam tugasnya sehari-hari, guru berperan sebagai pemberi pengajaran kepada murid di sekolah dengan memanfaatkan sarana pendukung yang ada, sedangkan orang tua berperan dalam mempersiapkan anak untuk belajar di sekolah dan membimbing anak di rumah di luar jam sekolah. Namun, di balik fungsi penting faktor-faktor tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang membuat proses belajar-mengajar di kelas belum efektif, yakni kurangnya kualitas dan kualifikasi guru; kurangnya dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas guru; pandangan orang tua dan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pendidikan anak; masalah sarana dan prasarana; kurangnya ketersediaan guru PNS dan distribusinya yang kurang merata; disparitas antarsekolah; masalah kesejahteraan guru, terutama guru tidak tetap (non-PNS); masalah kurikulum; dan kepentingan politik dalam kebijakan pendidikan di daerah. Berbagai persoalan tersebut sangat penting untuk segera diatasi, tetapi perlu diingat bahwa saluran pemecahan masalah yang ada harus melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan di tingkat lokal, di antaranya dengan meningkatkan fungsi dan kapasitas institusi yang selama ini belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: pendidikan dasar, Lombok Utara, kegiatan belajar mengajar

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Utara	1
1.2 Metodologi Penelitian	2
II. ANALISIS EKONOMI POLITIK PERMASALAHAN PENDIDIKAN	3
2.1 Pengalaman Belajar Murid di Dalam Kelas	3
2.2 Rendahnya Kualitas Pendidikan Dasar: Diagnosis Akar Permasalahan	6
III. ANALISIS INOVASI DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN	14
IV. PERAN DAN HUBUNGAN ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN PENDIDIKAN	17
DAFTAR ACUAN	20
LAMPIRAN	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alasan Mengapa Murid Menyukai atau Tidak Menyukai Mata Pelajaran/Guru	5
Tabel 2. Program/Kegiatan Terkait Pendidikan Dasar yang Dilakukan di Kabupaten Lombok Utara	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Faktor utama dalam proses pembelajaran murid	6
Gambar 2. Peta peran pemangku kepentingan pendidikan Kabupaten Lombok Utara	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Ringkasan 10 Isu Teratas Berdasarkan Kelompok Pemangku Kepentingan	22
Lampiran 2	Metode Komunikasi	35
Lampiran 3	Tabel A1. Daftar Mitra Daerah Potensial	42
Lampiran 4	Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan	43
Lampiran 5	Peta Pemangku Kepentingan	48
Lampiran 6	Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan	49
Lampiran 7	Tabel A3. Matriks Metode Komunikasi	50
Lampiran 8	Analisis Pohon Masalah	56
Lampiran 9	Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah	57
Lampiran 10	Daftar Data Sekunder diperoleh dari Kabupaten Lombok Utara	59
Lampiran 11	Tabel A5. Diagram Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan	61
Lampiran 12	Gambar A1. Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2009/2010 – 2015/2016	67
Lampiran 13	Gambar A2. Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, 2010/2011 dan 2015/2016	68
Lampiran 14	Gambar A3. Hasil Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Ajaran 2014/2015	69

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBD	anggaran pendapatan dan belanja daerah
APM	angka partisipasi murni
APK	angka partisipasi kasar
asda	asisten daerah
AKSOGI	Asosiasi Perusahaan di Kawasan Gili Indah
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
Dikpora	pendidikan, pemuda, dan olahraga
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	<i>focus group discussion</i> (diskusi kelompok terfokus)
GTT	Guru Tidak Tetap
INOVASI	Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia
IPA	Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	indeks pembangunan manusia
IPS	Ilmu Pengetahuan Sosial
K-13	Kurikulum 2013
KBP	Klub Baca Perempuan
KKG	Kelompok Kerja Guru
KKKS	kelompok kerja kepala sekolah
LCD	<i>liquid crystal display</i>
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MTs	madrasah sanawiah
mulok	muatan lokal
NTB	Nusa Tenggara Barat
ornop	organisasi nonpemerintah
PGRI	Persatuan Guru Seluruh Indonesia
PKN	pendidikan kewarganegaraan
PNS	pegawai negeri sipil
PR	pekerjaan rumah
PU	Pekerjaan Umum
ProDEP	Professional Development for Education Personnel (Program Pengembangan Keahlian Tenaga Kependidikan)

SBK	seni budaya dan keterampilan
SD	sekolah dasar
SMP	sekolah menengah pertama
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
TIK	teknologi informasi dan komunikasi
UPTD	unit pelaksana teknis daerah
UN	ujian nasional

I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Utara

Sejak berdiri sebagai kabupaten baru pada 2008, Lombok Utara secara konsisten mencapai target pembangunan makro yang progresif, tetapi juga menyisakan pekerjaan berat dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia. Pada 2015, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Lombok Utara mencapai 61,15. Capaian tersebut berada pada urutan terbawah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, dan masih di bawah IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencapai 65,19 (Badan Pusat Statistik, 2016). Hal ini memprihatinkan, mengingat NTB sendiri merupakan salah satu provinsi dengan capaian IPM terbawah di Indonesia; pada 2015 capaiannya berada di urutan ke-30 dari 34 provinsi.

Pembangunan sektor pendidikan adalah tantangan terbesar bagi kabupaten termuda di NTB ini. Rata-rata durasi bersekolah hanya 4,97 tahun (angka ini bahkan kurang dari 6 tahun masa belajar untuk sekolah dasar/SD). Angka buta huruf pada penduduk berusia 15 tahun ke atas mencapai 19,5% pada 2014.¹ Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD dan sekolah menengah pertama (SMP) menunjukkan adanya fluktuasi. Selain itu, angka rata-ratanya masih berada di bawah rerata provinsi. Angka partisipasi murni (APM) juga mengalami fluktuasi, bahkan penurunan, terutama pada tingkat SMP. Pada tahun ajaran 2015/2016, APK SD dan SMP di Lombok Utara masing-masing adalah 108,94 dan 100,23. Capaian tersebut masih di bawah rerata APK SD dan SMP Provinsi NTB yang masing-masing mencapai 109,29 dan 110,14. Sementara itu, untuk APM SD dan SMP pada tahun yang sama, angka yang diraih Lombok Utara masing-masing adalah 99,81 dan 96,21. Keduanya masih berada di bawah capaian rerata provinsi sebesar masing-masing 99,91 dan 97,79 (lihat Lampiran 12).

Walau mengalami penurunan yang cukup berarti dalam lima tahun terakhir, persentase putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Lombok Utara masih cukup besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi NTB. Seperti yang tercatat dalam data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Dikpora) Provinsi NTB, pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat 61 murid tingkat SD dan 40 murid tingkat SMP di Lombok Utara yang putus sekolah. Angka tersebut memang relatif lebih rendah daripada angka putus sekolah kabupaten/kota lain di NTB, misalnya Lombok Timur yang mencapai 190 (untuk tingkat SD) dan 128 (untuk tingkat SMP). Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah murid di masing-masing jenjang pendidikan dasar, persentasenya cukup besar—relatif terhadap kabupaten/kota lain di Provinsi NTB. Persentase putus sekolah murid pendidikan dasar di Lombok Utara secara konsisten berada pada posisi bawah, baik pada tahun ajaran 2010/2011 maupun 2015/2016 (Lihat Lampiran 13).

Tak hanya itu, hal yang juga mengkhawatirkan adalah hasil ujian nasional (UN) jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran 2014/2015 yang merupakan salah satu yang terbawah di NTB, bersama Kota Bima dan Dompu (lihat Lampiran 14).

Indikator-indikator capaian pendidikan di atas hampir semuanya menempatkan Kabupaten Lombok Utara pada posisi bawah, sekaligus mengindikasikan adanya persoalan mendasar pada tingkat pendidikan dasar di daerah ini. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang sebagian besar dilakukan di sekolah, rendahnya capaian pendidikan dasar merupakan indikator nyata belum efektifnya proses

¹Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016–2021.

belajar-mengajar di dalam kelas di daerah ini. Melalui laporan ini, akan disajikan hasil penelitian mengenai situasi sistem pendidikan dan pembelajaran murid pendidikan dasar di Lombok Utara.

1.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, wawancara kelompok, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) yang melibatkan 41 individu dan kelompok informan kunci yang bekerja di sektor pendidikan dasar. Pertanyaan penelitian dituangkan dalam panduan operasional penelitian yang alurnya meliputi penggalian informasi seputar kondisi umum pendidikan di daerah, permasalahan terkait rendahnya pembelajaran murid beserta solusinya, pemetaan pemangku kepentingan, komunikasi antarpemangku kepentingan, inovasi di bidang pendidikan, dan dinamika politik daerah terkait kebijakan pendidikan. Perincian kegiatan penggalian informasinya adalah:

- a) wawancara mendalam tingkat kabupaten dengan informan kunci yang meliputi pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pendidikan, dewan pendidikan, asosiasi guru, media lokal, dan organisasi nonpemerintah (ornop);
- b) wawancara mendalam dengan unit pelaksana, penyelenggara, dan pendukung pendidikan di tingkat masyarakat, dengan informan kunci yang meliputi pejabat unit pelaksana teknis pendidikan dasar, pengawas sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, komite sekolah, dan kepala desa;
- c) wawancara kelompok guru di SD dan SMP terpilih;
- d) wawancara kelompok murid di SD dan SMP terpilih;
- e) wawancara kelompok orang tua di SD dan SMP terpilih; dan
- f) FGD tingkat kabupaten dengan peserta kunci yang meliputi pejabat SKPD terkait pendidikan, dewan pendidikan, asosiasi guru, media lokal, dan ornop.

Penelitian di Kabupaten Lombok Utara dilakukan dari 7 sampai 20 Agustus 2016. Pemilihan lokasi dan sekolah untuk studi kasus dilakukan secara terencana berdasarkan data kuantitatif dan proses konsultasi antara tim SMERU-INOVASI dan Kemendikbud sebelum dilaksanakannya penelitian lapangan. Sekolah sampel tersebar di empat kecamatan di Lombok Utara, terdiri atas dua SD dan dua SMP yang semuanya berstatus negeri—salah satu SMP tersebut merupakan sekolah satu atap.

Hasil penelitian dipaparkan dalam analisis ekonomi politik permasalahan pendidikan, dan dalam analisis mengenai inovasi daerah di bidang pendidikan. Keduanya akan disajikan pada bagian berikutnya dalam laporan ini.

II. ANALISIS EKONOMI POLITIK PERMASALAHAN PENDIDIKAN

Untuk memberi gambaran yang komprehensif, di awal bagian ini akan disampaikan pengalaman belajar murid di dalam kelas. Bagian ini akan menyajikan sudut pandang berbeda dengan membahas bagaimana layanan pendidikan yang merupakan hasil rangkaian kerja sistem pendidikan daerah—yang melibatkan pembuat kebijakan dan pelaksana serta didukung berbagai pihak—dirasakan oleh para murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Analisis ekonomi politik permasalahan pendidikan akan menjadi simpulan diskusi sekaligus penutup bagian ini. Pembahasan lebih lengkap mengenai masalah pendidikan akan disajikan pada Lampiran 1.

2.1 Pengalaman Belajar Murid di Dalam Kelas

Berdasarkan pemetaan hasil diskusi bersama kelompok murid SD dan SMP di empat sekolah sampel, muncul beberapa isu yang menjadi perhatian para murid. Isu-isu tersebut di antaranya adalah (i) cara dan sikap guru dalam mengajar, (ii) kesulitan murid dalam menghadapi pelajaran tertentu (misalnya, Matematika), (iii) materi pelajaran, (iv) nilai, (v) manfaat pelajaran, dan (vi) kesukaan individu murid.

Seperti murid sekolah pada umumnya di Indonesia, murid-murid SD maupun SMP di Lombok Utara harus mempelajari sepuluh atau lebih mata pelajaran. Untuk masing-masing mata pelajaran tersebut, ada ujian tersendiri. Mata pelajaran yang harus dipelajari oleh murid SD dan SMP di antaranya adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjas), Muatan Lokal (Mulok), dan Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). Di tingkat SMP, murid mulai mempelajari mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Mata pelajaran yang paling disukai oleh satu kelompok murid bisa jadi merupakan mata pelajaran yang paling tidak disukai oleh kelompok murid lainnya. Pemetaan yang kami lakukan memperlihatkan bahwa, di antara mata pelajaran yang ada, yang paling banyak disukai murid adalah IPA, diikuti dengan Penjas, Matematika, Pendidikan Agama Islam, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPS, TIK, PKN, dan SBK. Terdapat perbedaan preferensi antara murid SD dan murid SMP. Bahasa Indonesia dan IPA merupakan mata pelajaran yang paling banyak disukai murid SD, sedangkan TIK merupakan mata pelajaran yang paling banyak disukai murid SMP. Murid SD tidak mengenal TIK karena mata pelajaran ini baru akan dipelajari di tingkat SMP. Murid SMP menyukai TIK karena mereka melihat potensi manfaatnya bagi masyarakat yang makin mengandalkan teknologi informasi. Matematika merupakan mata pelajaran yang paling tidak disukai oleh hampir semua kelompok murid di hampir semua sekolah sampel. Mata pelajaran lain yang paling tidak disukai adalah Mulok, Bahasa Indonesia, SBK, PKN, IPS, IPA, dan Bahasa Inggris.

Metode pengajaran guru yang kurang dipahami menjadi alasan utama bahwa murid tidak menyukai pelajaran tertentu. Dari wawancara dan diskusi kelompok selama penelitian di Lombok Utara, ditemukan bahwa hal-hal yang membuat murid merasa sulit memahami apa yang diajarkan guru dan yang membuat mereka tidak nyaman di antaranya adalah (i) guru yang lebih sering memberi tugas untuk mencatat, (ii) guru yang terlalu sering memberi tugas dan soal, (iii) guru yang terlalu sering mencatat di papan tulis tanpa banyak menerangkan, (iv) guru yang jarang masuk, dan (v)

guru yang sering memukul.² Murid merasa lebih mudah memahami pelajaran jika mereka diajar oleh (i) guru yang cara mengajarnya menyenangkan (bisa bercanda sehingga suasana kelas tidak tegang); (ii) guru yang lebih banyak menerangkan dan mengajar dengan metode praktik daripada melulu mencatat di papan tulis; (iii) guru yang tidak hanya menjelaskan dengan tulisan, tetapi juga dengan gambar; dan (iv) guru yang aktif mengajak murid berdiskusi.

Pada berbagai kesempatan, murid-murid juga mengungkapkan ketaknyamanan mereka akan sikap sebagian guru yang membuat murid di kelas merasa tegang. Sebagian kecil murid bahkan mengungkapkan bahwa masih ada guru yang memberi hukuman fisik kepada murid yang tidak mengerjakan tugas, seperti disuruh berlari, dijewer, atau dijemur. Di hampir semua sekolah sampel, kehadiran kurikulum baru yang mendorong peran aktif siswa belum bisa mendorong guru untuk memperbaiki metode mengajarnya. Keterbatasan buku paket kurikulum baru di hampir semua sekolah menjadi alasan guru untuk menghabiskan jam pelajaran di kelas dengan menyuruh murid menyalin materi pelajaran dari buku paket yang tersedia.

Murid menyukai guru yang cara mengajarnya mudah dimengerti, yang sering memberi penjelasan, yang sering menyuruh murid menghafal, dan yang sering memberikan pekerjaan rumah (PR). Sikap guru yang tegas dan bisa membuat murid nyaman juga menjadi pendorong murid untuk menyukai pelajaran. Sebaliknya, cara mengajar dan sikap guru juga bisa membuat murid tidak menyukai pelajaran dan/atau guru tertentu. Seperti diungkapkan oleh murid, mereka tidak suka kepada guru yang—atau pelajaran yang gurunya—jarang atau sama sekali tidak menjelaskan. Mereka juga tidak suka kepada guru yang memberi tugas dan PR terlalu banyak dan memberatkan, yang terlalu sering menyuruh murid menghafal, yang terlalu sering menyuruh murid mencatat, yang cara mengajarnya sulit dipahami, dan yang suka memberi hukuman kepada murid.

Selain faktor guru, murid juga menyukai pelajaran yang materinya mudah dan menarik sehingga mereka bisa mendapatkan nilai bagus. Hal lain yang mendorong murid untuk menyukai pelajaran tertentu adalah kesukaan pribadi murid akan hal-hal tertentu terkait pelajaran (misalnya, murid yang suka bermain bola akan menyukai pelajaran Penjas) dan kesadaran murid akan manfaat pelajaran dimaksud (misalnya, manfaat Matematika untuk berdagang dan manfaat Bahasa Indonesia untuk berkomunikasi). Sebaliknya, murid menjadi tidak suka dengan pelajaran jika nilai yang didapatnya rendah atau materinya dianggap tidak menarik. Selain itu, ketakmampuan murid untuk menguasai pelajaran menjadi alasan ketaksukaan mereka terhadap pelajaran tertentu.

²Dirangkul dari catatan wawancara kelompok dengan murid.

Tabel 1. Alasan Mengapa Murid Menyukai atau Tidak Menyukai Mata Pelajaran/Guru

ALASAN MENGAPA MURID MENYUKAI MATA PELAJARAN/GURU	
Cara guru dalam mengajar	Guru sering menjelaskan pelajaran
	Guru menyuruh menghafal
	Penjelasan guru mudah dimengerti
	Banyak hafalan
	Guru sering memberikan PR
Materi pelajaran	Karena materinya menarik; banyak pantun dan pengetahuan/cerita yang diselipkan
	Pelajarannya mudah
	Bisa sambil bermain/berkreasi
Sikap guru	Gurunya tegas
	Sikap guru membuat nyaman
Manfaat	Agar badan menjadi sehat (Penjas)
	Mendekatkan diri kepada Tuhan (Pendidikan Agama)
	Bisa mengerti teknologi
	Karena manfaatnya
Kesukaan individu murid	Suka komputer
	Memang suka matematika/senang berhitung
	Suka olahraga
Nilai	Karena nilainya bagus
ALASAN MENGAPA MURID TIDAK MENYUKAI MATA PELAJARAN/GURU	
Cara guru dalam mengajar	Guru jarang/sama sekali tidak pernah menjelaskan
	Guru hanya memberi tugas/tugas dari guru terlalu banyak
	Guru hanya menyuruh murid mencatat
	Cara penyampaian guru dalam mengajar tidak disukai
	Sering disuruh guru menghafal
	PR dianggap memberatkan
Kesulitan individu murid	Tidak suka berhitung/mengerjakan perkalian
	Merasa sulit/mengalami kesulitan
	Merasa sulit dalam menggambar
Materi pelajaran	Materi yang dipelajari tidak keluar saat ujian
	Materi tidak menarik
Nilai	Nilai rendah
Sikap guru	Guru sering menghukum

Ketaknyamanan juga dirasakan oleh sebagian murid karena sekolah justru mencurahkan perhatian dan upaya besar kepada murid-murid yang berprestasi. Contohnya, di salah satu SMP sampel, pelajaran tambahan hanya diperuntukkan bagi murid yang meraih peringkat pertama hingga kelima. Pada umumnya, pelajaran tambahan yang diselenggarakan sekolah lebih banyak diperuntukkan bagi murid-murid yang berprestasi, tetapi ada sebagian sekolah yang tidak memberlakukannya seperti itu.

2.2 Rendahnya Kualitas Pendidikan Dasar: Diagnosis Akar Permasalahan

Faktor utama yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran murid di dalam kelas adalah guru, orang tua, serta sarana dan prasarana pengajaran. Dalam pekerjaannya sehari-hari, guru berperan memberi pengajaran kepada murid di sekolah dengan memanfaatkan sarana pendukung yang ada, sedangkan orang tua berperan mempersiapkan anak untuk belajar di sekolah dan membimbing anak di rumah di luar jam sekolah. Di balik fungsi penting faktor-faktor tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang membuat pembelajaran murid belum efektif, yaitu:

- a) kurangnya kualitas dan kualifikasi guru;
- b) kurangnya dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas guru;
- c) pandangan orang tua dan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pendidikan anak;
- d) kurang memadainya sarana dan prasarana;
- e) kurang meratanya ketersediaan dan distribusi guru PNS;
- f) disparitas antarsekolah;
- g) masalah kesejahteraan guru, terutama guru tidak tetap (non-PNS);
- h) masalah kurikulum; dan
- i) kepentingan politik dalam kebijakan pendidikan daerah.

Berbagai permasalahan tersebut muncul pada saat pemetaan permasalahan berdasarkan kelompok pemangku kepentingan yang dalam analisis ini dibagi menjadi tiga kelompok, yakni:

- a) kelompok pembuat kebijakan (Dinas Dikpora, Bappeda, DPRD, dan Asda III);
- b) kelompok pelaksana (guru, kepala sekolah, pengawas, dan UPTD); dan
- c) kelompok pendukung (orang tua, komite sekolah, Dewan Pendidikan, PGRI, KKG, ornop lokal, media lokal, dan kepala desa).



Gambar 1. Faktor utama dalam proses pembelajaran murid

2.2.1 Kualitas dan Kualifikasi Guru Kurang

Berbagai pihak memandang bahwa kualitas guru yang kurang memadai melatarbelakangi rendahnya hasil pembelajaran murid tingkat pendidikan dasar di Lombok Utara. Hal ini terlihat dari cara guru dalam mengajar yang kurang bisa dipahami murid. Sebagian pihak secara sempit melihat bahwa cara guru yang “itu-itu saja” terjadi karena kurangnya penguasaan guru akan teknologi sehingga mereka kurang bisa memanfaatkan alat bantu canggih. Sebagian pihak lainnya secara lebih dalam melihat bahwa guru yang seperti itu belum bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan mereka untuk membantu mereka dalam mengajar agar lebih menarik.³ Sebagian guru dan kepala sekolah merasa tertinggal hanya karena tidak memakai *liquid crystal display* (LCD) pada waktu mengajar atau hanya karena sebagian kelas saja yang sudah punya fasilitas LCD. Hal ini tentu salah kaprah karena seharusnya, dalam mengajar, guru tidak bergantung hanya pada suatu alat tertentu. Lagi pula, materi yang disampaikan sama saja. Pengawas dan UPTD menilai bahwa rendahnya kualitas pengajaran guru tidak lepas dari minimnya kemauan mereka untuk belajar. Salah satu pengawas sekolah bahkan mengatakan bahwa “literasi guru rendah”, tetapi kemauan belajar mereka kurang. Pada kesempatan berbeda, pengawas dan kepala sekolah lain mengungkapkan bahwa guru malas membaca dan tidak punya waktu untuk membaca atau belajar, padahal membaca itu penting sebagai bekal bagi mereka untuk mengajar.

Hal senada juga diungkapkan para informan dari kelompok pembuat kebijakan dan pendukung pendidikan yang menyoroti rendahnya kualitas pengajaran guru karena masalah integritas. Penerapan Kurikulum 2013 (K-13) yang seharusnya mendorong kreativitas guru dan keaktifan murid di dalam kelas kerap dijadikan kesempatan guru untuk meninggalkan tanggung jawabnya dengan mengalihkan semua tugas terkait belajar-mengajar kepada murid tanpa bimbingan yang jelas. Para informan tersebut juga menyayangkan bahwa tunjangan sertifikasi yang diterima para guru tidak digunakan untuk membeli alat pendukung pengajaran, melainkan digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya konsumtif. Informan dari kelompok orang tua mengungkapkan keluhan mereka tentang cara mengajar guru yang hanya menyuruh anak mencatat dan menyalin dari buku. Informan dari PGRI menyampaikan kekecewaannya mengenai integritas sebagian guru. Menurut informan ini, banyak guru mengajar sebatas untuk menggugurkan tanggung jawabnya. Mereka tidak berupaya belajar agar bisa lebih kreatif dalam mengajar. Banyak guru yang kaku dalam mengajar dan hanya menginginkan murid mengikutinya. Jika tidak mengikutinya, murid disalahkan. Kurangnya integritas pada akhirnya memengaruhi kualitas pengajaran guru. Salah satu indikator rendahnya kualitas guru yang disampaikan PGRI adalah ketidakmampuan mereka dalam penulisan ilmiah. Banyak guru yang sudah lama menjabat tidak bisa naik pangkat karena tidak memiliki tulisan ilmiah.

Terkait kualifikasi, berbagai pihak juga melihat bahwa banyak guru tidak memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mengajar; terutama pada tingkat SD, hanya ada sedikit guru yang bergelar sarjana pendidikan sekolah dasar (S.Pd.SD.). Memang banyak guru SD yang sudah bergelar sarjana, tetapi hanya untuk bidang-bidang spesifik seperti bahasa Indonesia dan matematika. Di sisi lain, guru SD dituntut untuk bisa mengajarkan semua pelajaran. Salah seorang informan menyampaikan bahwa dirinya tak bisa membayangkan betapa berat beban guru SD jika mereka yang berkualifikasi Pendidikan Bahasa Indonesia harus mengajarkan Matematika.

2.2.2 Dukungan terhadap Upaya Peningkatan Kapasitas Guru Masih Kurang

Kurangnya pelatihan dan tidak efektifnya pelatihan yang diselenggarakan selama ini memperkecil kesempatan guru untuk meningkatkan kapasitasnya. Di Kabupaten Lombok Utara, tidak ada

³Pihak-pihak dimaksud adalah para pemangku kepentingan yang bekerja di sektor pendidikan di Lombok Utara yang menjadi informan studi ini.

pembedaan antara guru PNS dan guru non-PNS dalam kesempatan mengakses pelatihan. Namun, kebijakan yang baik ini tidak diikuti dengan penyelenggaraan pelatihan yang baik bagi para guru, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Pelatihan yang selama ini diadakan juga lebih banyak untuk hal-hal yang bersifat administratif, seperti pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ataupun pelatihan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, penyelenggaraannya dinilai kurang efektif karena waktu yang terlalu singkat, materi dan cara penyampaian yang tidak dimengerti para guru, dan tidak tepat guna (tidak sesuai dengan kondisi guru atau sekolah yang sedianya menerapkan).

Salah seorang guru yang hadir pada kesempatan diskusi dengan tim peneliti menuturkan pengalamannya sewaktu mengikuti pelatihan pengoperasian alat bantu pengajaran. Dalam waktu yang hanya dua hari, guru-guru dilatih untuk mengoperasikan sekitar tujuh alat bantu pengajaran yang semuanya berupa alat elektronik. Hingga hari terakhir pelatihan, hampir semua guru yang menjadi peserta merasa masih belum mengerti. Sebagian dari mereka benar-benar merasa asing dengan alat elektronik semacam itu, tetapi mereka diminta panitia untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah mengerti dan mendapat manfaat dari pelatihan tersebut. Ironisnya, pelatihan tersebut menjadi sia-sia karena, selain guru belum memahami hal yang diajarkan dalam pelatihan, peralatan yang dimiliki sekolah tempat mereka mengajar kurang lengkap.

Pelatihan yang tidak efektif juga dirasakan sewaktu guru-guru mendapatkan pelatihan K-13. Seperti dituturkan seorang guru yang menjadi informan studi ini, pelatihan K-13 yang diterimanya terlalu singkat dan terburu-buru, padahal banyak sekali materi yang dibahas. Selain itu, pelatihan yang diikuti menjadi sia-sia ketika sekolah tempatnya mengajar menerapkan kembali kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Walaupun saat ini sekolahnya mulai menerapkan K-13 kembali, K-13 yang diterapkan telah mengalami berbagai penyesuaian dan buku panduan yang digunakan sudah berbeda, dibandingkan dengan K-13 sebelumnya.

Hal lain yang juga menjadi masalah adalah tidak meratanya kesempatan pelatihan. Ada keluhan bahwa pelatihan kerap diberikan hanya bagi guru atau sekolah tertentu. Informasi mengenai pelatihan selama ini tidak bisa diakses secara luas. Guru atau sekolah biasanya hanya menerima pemberitahuan satu arah dari Dinas Dikpora. Terlihat jelas bahwa penunjukan peserta pelatihan dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Dinas Dikpora juga belum memiliki basis data guru ataupun sekolah yang tersistemkan secara jelas.

Permasalahan kualifikasi guru juga berkaitan dengan kenyataan bahwa belum semua guru lolos ujian sertifikasi guru,⁴ setidaknya untuk menjamin kualitas pengajaran mereka. Mekanisme yang ada belum bisa menjamin kualifikasi dan kualitas guru, dan belum ada institusi/sistem satu pintu yang bertanggung jawab untuk melakukan penjaminan tersebut.

Sekolah belum inklusif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, dan perhatian lebih besar dicurahkan pada murid berprestasi. Walaupun Provinsi NTB sudah mencanangkan pendidikan inklusif, hal itu tampaknya “jauh panggang dari api”. Sekolah (tenaga pendidik serta sarana dan prasarannya) belum dipersiapkan untuk menerima murid berkebutuhan khusus (memiliki keterbatasan fisik dan keterbatasan nonfisik). Bahkan, ketika menghadapi murid dengan kondisi normal yang mengalami keterlambatan/hambatan pada pelajaran tertentu, tenaga pendidik tidak bisa melakukan banyak hal, meski memang ada sebagian guru yang telah melakukan beberapa upaya.

⁴Uji sertifikasi dilakukan di tingkat provinsi melalui LPMP. Untuk guru yang berstatus GTT, kepala sekolah berperan lebih besar dalam proses rekrutmen dan pengangkatannya. Pengangkatan guru GTT dilakukan berdasarkan SK kepala sekolah. Di Kabupaten Lombok Utara terdapat sekitar 3.700 GTT yang pengangkatan dan “pengawasan” kualifikasinya bergantung pada kepala sekolah.

2.2.3 Kurangnya Peran Orang Tua dan Pandangan Masyarakat yang Belum Sepenuhnya Melihat Pendidikan sebagai Hal Penting

Hal yang kerap menjadi keluhan penyelenggara pendidikan adalah sikap orang tua yang cenderung menyerahkan semua urusan pendidikan kepada sekolah. Pandangan yang masih berlaku secara umum adalah bahwa pendidikan hanya berlangsung di sekolah. Hal ini menjadi keluhan bagi para tenaga pendidik, yang berpendapat bahwa sebagian besar waktu anak justru dihabiskan di rumah, bukan di sekolah. Selain karena pendidikan dan pengetahuan yang terbatas, orang tua menyerahkan pendidikan anaknya sepenuhnya kepada sekolah karena mereka terlalu sibuk bekerja. Di sisi lain, pelibatan orang tua oleh sekolah sering kali terbatas hanya pada hal-hal administratif dan pendanaan. Orang tua baru akan diundang ke sekolah jika ada rapat yang membahas program bantuan. Sementara itu, komite sekolah belum sepenuhnya berfungsi sebagai penghubung antara orang tua murid dan sekolah.

Masalah lainnya adalah sikap sebagian orang tua yang belum memandang pendidikan sebagai hal penting. Sebagian orang tua bahkan memandang bahwa kegiatan bersekolah menghalangi anak mereka untuk memperoleh penghasilan. Hal ini dipengaruhi latar belakang sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal mereka. Terdapat perbedaan antara orang tua dari murid yang bersekolah di perkotaan dan orang tua dari murid yang bersekolah di perdesaan, juga antara murid dari keluarga pada kelompok kesejahteraan tinggi dan murid dari keluarga pada kelompok kesejahteraan di bawahnya. Di daerah perdesaan masih ditemukan anak yang dilibatkan oleh orang tuanya untuk bekerja, terutama pada musim panen. Di salah satu sekolah, terungkap bahwa orang tua mengajak anak untuk bekerja memanen kacang tanah. Penghasilan yang didapat dari memanen kacang tanah cukup besar, sekitar Rp30.000 per karung. Dalam sehari, seorang anak bisa menghasilkan satu karung kacang tanah. Ini tentunya menjadi pilihan yang lebih menarik daripada harus masuk sekolah pada hari itu. Bagi sebagian guru, pandangan demikian terlihat dari ketidakpedulian orang tua terhadap anak-anaknya yang berangkat ke sekolah. Seperti dikeluhkan di sebagian sekolah sampel, guru menyaksikan anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan tanpa mandi terlebih dahulu. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan anak dalam belajar di sekolah.

2.2.4 Masalah Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana menjadi permasalahan yang paling banyak diungkapkan oleh kepala sekolah. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah, antara lain, ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan, taman, dan alat bantu pengajaran. Banyak pihak mengeluhkan ruangan di sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah rombongan belajar. Hal lain yang diutarakan adalah jumlah buku yang kurang memadai dan minimnya sarana pendukung untuk murid berkebutuhan khusus.

Terkait penerapan kurikulum baru di banyak sekolah, rasio jumlah buku dan murid sangat tidak sebanding sehingga murid harus memakai buku secara bergantian atau menyalin dari buku yang ada. Penerapan kurikulum juga menemui masalah karena masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya, terutama buku panduan. Sebagai gambaran, ada sekolah yang rasio buku dan muridnya masih 1 berbanding 3, artinya 1 buku untuk 3 murid. Masalah kekurangan buku (pada sekolah yang telah menerapkan K-13) terjadi juga di daerah-daerah lain (tidak hanya di Lombok Utara), termasuk di ibu kota provinsi (Kota Mataram). Persoalan lain terkait sarana dan prasarana adalah masih minimnya pengadaan alat peraga karena sebagian besar anggaran pendidikan daerah—yang mencapai 20%—masih difokuskan pada pembangunan fisik dan belanja pegawai. Menurut Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang Sosial-Budaya Bappeda Kabupaten Lombok Utara, anggaran yang benar-benar masuk ke dalam kelas hanya 5,1%.

2.2.5 Kurang Meratanya Ketersediaan dan Distribusi Guru PNS

Kurangnya jumlah guru PNS menjadi beban bagi pihak sekolah karena mereka harus merekrut GTT yang honorinya harus mereka bayar sendiri. Lebih-lebih jika sekolah tersebut hanya memiliki murid dalam jumlah sedikit.⁵ Makin lama, hal ini makin menjadi polemik; apalagi belum ada tanda-tanda positif akan dukungan dana dari pemerintah daerah (pemda) untuk pembiayaan GTT. Selain itu, saat ini sudah terjadi persaingan antarsekolah untuk menjaring murid baru. Sementara itu, sejak adanya pelarangan pemungutan iuran komite sekolah, sumber pendanaan sekolah menjadi makin terbatas.⁶ Selain itu, distribusi PNS dinilai masih kurang merata, terutama di daerah terpencil. Banyak sekali keluhan tentang sedikitnya guru PNS “yang mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil.” Sebagian besar posisi guru di sekolah-sekolah daerah terpencil diisi oleh GTT yang pengangkatan dan honorinya diurus sendiri oleh pihak sekolah.

2.2.6 Disparitas Antarsekolah

Disparitas yang dimaksud di sini adalah perbedaan dalam jumlah murid antarsekolah yang bisa sangat besar. Sebagian besar orang cenderung memilih untuk mendaftarkan anaknya di sekolah favorit atau sekolah yang mudah dijangkau.

Salah seorang kepala sekolah yang kami temui mengungkapkan kekhawatirannya mengenai jumlah murid SMP-nya yang terus menurun dari tahun ke tahun: 126 murid pada 2013; 96 murid pada 2014; dan 76 murid pada 2015. Sekolah yang dikepalainya adalah sekolah satu atap (satap) yang berlokasi di tengah perdesaan. Dia mengeluhkan bahwa mungkin murid-murid SD-nya bosan dan ingin mencoba sekolah baru. Saat ini ada banyak SMP lain—yang lebih unggul dalam berbagai hal dan terletak di lokasi dekat kota—yang gencar mempromosikan sekolahnya. Mereka bahkan memasang iklan selebaran di majalah dinding (mading) sekolah-sekolah SD untuk menjaring murid baru, termasuk di mading sekolahnya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya beberapa kali sengaja mencopot iklan dari sekolah lain, tetapi hal itu tak banyak membantu karena arus informasi sudah sangat terbuka dan murid-murid SD-nya tentu bebas untuk mendaftarkan diri ke sekolah mana saja.

Di sisi lain, salah seorang kepala desa yang kami temui mengungkapkan bahwa latar belakang membeludaknya jumlah pendaftar ke salah satu SD di wilayahnya adalah karena sekolah tersebut merupakan sekolah favorit dan memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler. Pada kesempatan berbeda, kelompok orang tua murid yang kami temui mengungkapkan bahwa pertimbangan mereka dalam memilih sekolah anak adalah keinginan anak, jarak dari rumah ke sekolah, kualitas sekolah, dan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Sebagian orang tua bahkan bercerita bahwa dulu mereka bersekolah di sekolah unggulan tersebut dan mereka menginginkan anaknya juga bersekolah di sana. Sekolah tersebut bisa dikatakan sekolah yang paling bagus di Lombok Utara. Pihak desa mengatakan bahwa mereka telah berusaha mengimbau masyarakat agar tidak semuanya mendaftarkan anaknya hanya ke satu sekolah tertentu dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa sekolah lain juga tidak kalah kualitasnya. Namun, tetap saja keinginan masyarakat tidak bisa dibatasi.

Membludaknya jumlah pendaftar di sekolah-sekolah favorit memaksa pihak sekolah untuk membuka kelas baru. Kabarnya, banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya rela “membayar uang kursi”. Hal ini bahkan membuat sekretaris daerah turun tangan sehingga keluar imbauan untuk melarang pemungutan iuran dari orang tua murid. Disparitas jumlah murid antarsekolah

⁵Di sisi lain, dalam juknis BOS diatur bahwa, jika jumlah murid sebuah sekolah di bawah 60 anak, jumlah dana BOS yang diterima sekolah adalah minimum untuk 60 anak.

⁶Pada saat FGD di tingkat kabupaten, terkonfirmasi bahwa pelarangan tersebut belum menjadi larangan resmi (belum ada surat keputusan tertentu); sifatnya masih berupa imbauan. Namun, hampir semua sekolah sudah mematuhi.

membawa persoalan lain, yakni “kelas gemuk” di sekolah-sekolah favorit. Di kelas-kelas gemuk, seorang guru harus mengajar cukup banyak siswa, 30–40 orang. Sebagian besar sekolah favorit memang berlokasi di wilayah perkotaan, tetapi ada juga yang berlokasi di perdesaan. Sekolah sampel studi ini yang berlokasi di perdesaan juga merupakan sekolah favorit. Sekolah tersebut juga memiliki kelas-kelas gemuk yang hanya ditangani satu orang guru setiap kelasnya. Hal sebaliknya terjadi di sekolah-sekolah lain yang “minim peminat”. Sekolah-sekolah tersebut menghadapi persoalan lain akibat sedikitnya jumlah murid. Selain sedikitnya dana BOS yang diterima, ada kemungkinan bahwa, pada suatu saat nanti, mereka harus digabung dengan sekolah lain. Tidak ada sistem rayonisasi dalam pemilihan sekolah, dan pemerintah merasa tidak bisa menghalangi preferensi murid dan orang tua akan sekolah tertentu.

2.2.7 Masalah Kesejahteraan Guru–Terutama GTT

Selama berlangsungnya penelitian, tim peneliti melihat langsung guru-guru yang tergabung dalam forum GTT berdemonstrasi di depan DPRD menuntut kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan guru, terutama yang masih berstatus GTT, menjadi perhatian banyak pihak. Dengan terbatasnya jumlah–dan tidak meratanya distribusi–guru PNS, kekosongan posisi guru di banyak sekolah diisi oleh GTT. Di Lombok Utara, pengangkatan GTT merupakan wewenang kepala sekolah, demikian pula honorinya. Selama ini pembayaran honor GTT mengandalkan dana BOS yang disalurkan kepada sekolah, dan sebagian kecilnya bersumber dari iuran komite sekolah dari orang tua murid. Belum lama ini Pemda Lombok Utara mengeluarkan imbauan untuk melarang pemungutan iuran komite sekolah. Hal tersebut makin membuat resah pihak sekolah dan juga GTT yang jumlahnya tidak sedikit. Terkait hal ini, anggota komisi III DPRD yang menjadi informan kami mengutarakan keprihatinannya atas minimnya penghasilan GTT. Namun, dia menjelaskan bahwa akan sulit bagi Pemda Lombok Utara untuk memberikan tunjangan kepada GTT, mengingat jumlah GTT di Lombok Utara sekitar 3.900 orang, sementara APBD-nya hanya sekitar 800 miliar rupiah per tahun. Dia menyebutkan bahwa perwakilan GTT yang menemuinya menuntut tunjangan sebesar satu juta rupiah setiap bulan. Melengkapi informasi dari anggota komisi III DPRD, Asda III menjelaskan dari sisi administratif kepegawaian bahwa pemberian tunjangan tidak bisa serta-merta dilakukan, mengingat status mereka. Lain halnya pegawai berstatus pegawai pemda yang bisa mendapatkan honor dari APBD. Dia juga menambahkan bahwa akan sulit bagi Lombok Utara untuk mengangkat GTT menjadi pegawai pemda karena, selain keterbatasan anggaran, pengangkatan pegawai juga dibatasi. Tentu saja tuntutan perwakilan GTT tersebut akan sulit dipenuhi. Hingga penelitian berakhir, isu ini masih terus bergulir dan belum ada titik terang untuk solusinya.

2.2.8 Masalah Penerapan Kurikulum

Ketakpastian paling nyata yang dialami para guru adalah berubah-ubahnya kurikulum (perubahan oleh Pemerintah Pusat). Hal ini menjadi persoalan yang kerap diungkapkan oleh guru dan pihak sekolah. Perubahan kurikulum yang diberlakukan Pemerintah Pusat tidak disertai pelatihan yang cukup dan sarana yang memadai. Tinjauan yang dilakukan di sekolah-sekolah sampel studi menunjukkan bahwa penerapan K-13 tidak disertai pelatihan yang cukup bagi para guru. Sebagian guru yang belum sepenuhnya memahami penerapan K-13 mendorong siswa untuk aktif. Sebagian dari mereka bahkan memanfaatkan keaktifan siswa untuk meringankan beban mereka dalam mengajar, misalnya dengan memberi siswa tugas, lalu meninggalkan mereka. Selain itu, buku pelajaran yang dibutuhkan belum tersedia. Bahkan, ada sekolah yang hanya mendapatkan satu buku, dan buku itu pun hanya untuk pegangan guru.

Agak berbeda dengan pihak guru dan sekolah, para pembuat kebijakan melihat bahwa apa pun kurikulumnya, seharusnya guru bisa melakukan penyesuaian. Lagi-lagi mereka memandang “sulitnya guru untuk beradaptasi dengan kurikulum baru” sebagai salah satu indikator rendahnya

kualitas guru. Dinas Dikpora dan Bappeda secara terang-terangan mengeluhkan bahwa kurikulum apa pun yang diterapkan selama ini, cara pengajaran guru tetap itu-itu saja, sampai muncul ungkapan Sekretaris Bappeda, “Apa pun makanannya, minumannya Teh Botol Sosro.”

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora berujar, “Kurikulum apa pun yang hadir, kalau kompetensi guru tidak diperbaiki, ya gaya mengajar guru itu-itu saja.” Menurutnya, pergantian kurikulum sudah menjadi hal lazim di Indonesia—tiap pergantian menteri, kurikulum pasti berganti. Oleh karena itu, hal terpenting sesungguhnya bukan kurikulum, tetapi bagaimana guru bisa mengerti apa yang diajarkannya dan bagaimana guru bisa menyampaikannya dengan baik kepada murid. Semua itu akan sangat bergantung pada kreativitas guru.

Penerapan kurikulum juga menemui masalah karena masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya, terutama buku panduan. Sebagai telah disebutkan pada Subbab 2.2.4, ada sekolah yang rasio buku dan muridnya masih satu banding tiga, yang artinya satu buku untuk tiga murid. Masalah ini tidak hanya terjadi di Lombok Utara, tetapi juga di daerah-daerah lain.

2.2.9 Kepentingan Politik dalam Kebijakan Pendidikan Daerah

Masalah kebijakan sektor pendidikan di Lombok Utara berkaitan erat dengan dominasi politik yang melatarbelakangi pengambilan keputusan. Selama penelitian ini berlangsung, Pemda Lombok Utara melakukan mutasi dan rotasi kepala sekolah secara besar-besaran. Hampir semua kepala sekolah diganti, dimutasi, atau dirotasi ke sekolah lain dengan posisi masih sebagai kepala sekolah atau “turun” menjadi guru kembali. Kejadian ini kabarnya akan berlanjut ke tenaga pendidik lain, yakni guru. Oleh karena itu, para guru menunggu-nunggu datangnya keputusan mutasi/rotasi untuk mereka. Kabarnya, mutasi dan rotasi tidak hanya diberlakukan bagi tenaga pendidik, tetapi juga para pejabat struktural di tingkat kabupaten. Hal yang membuat resah adalah bahwa keputusan mutasi/rotasi tersebut dilakukan sepihak dan tanpa mempertimbangkan kapasitas serta kompetensi. Tentu hal ini mendorong munculnya berbagai spekulasi mengenai langkah bupati tersebut dan membuat iklim kerja tidak nyaman. Di kalangan pembuat kebijakan, isu politik itu terdengar sayup-sayup, tetapi terus saja muncul secara implisit dalam berbagai kesempatan wawancara. Terhadap hal ini, informan dari kelompok pembuat kebijakan hanya bisa melontarkan pernyataan “aman” bahwa hal tersebut merupakan “bentuk penyegaran bagi tenaga pendidik”. Alasan lainnya adalah: agar bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Namun, berbagai pihak memandang hal ini sebagai kebijakan yang sarat dengan unsur politis. Sebagaimana diungkapkan sebagian informan, hal seperti ini sudah biasa terjadi setiap ada pergantian kepemimpinan dan tidak hanya di Lombok Utara, tetapi juga di daerah-daerah lain, bahkan juga di tingkat Pemerintah Pusat. Rotasi/mutasi/promosi di Kabupaten Lombok Utara sejak naiknya bupati baru dilakukan untuk kepala sekolah. Menurut berita yang tersebar, akan ada mutasi juga bagi tenaga guru dan pegawai struktural, baik pendidikan maupun nonpendidikan. Tidak ada mekanisme yang jelas ataupun tes kompetensi dalam rotasi/mutasi/promosi ini. Akibat kebijakan rotasi/mutasi/promosi yang tidak jelas tersebut adalah menurunnya motivasi kerja para guru dan kepala sekolah. Di salah satu sekolah yang kami kunjungi, kegiatan belajar mengajar bahkan sempat terganggu selama seminggu karena murid diliburkan. Hal ini disebabkan ketakpastian yang dihadapi para guru dalam menunggu keputusan rotasi/mutasi/promosi yang pada akhirnya ditunda hingga September.

Berbagai pihak percaya bahwa rotasi ini dilakukan untuk “memenuhi janji politik” bupati terpilih kepada pendukungnya pada saat pemilu. Beberapa pihak juga mengatakan secara implisit bahwa sebenarnya mereka tidak mau berpolitik, tetapi terpaksa memberi dukungan karena takut bahwa posisi/karir mereka akan terancam.

Salah seorang kepala sekolah yang kami temui mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak enak diangkat menjadi kepala sekolah favorit. Sementara itu, selama ini pengalaman beliau hanyalah sebagai kepala sekolah daerah terpencil. Menurutnya, sungguh berat beban yang harus diembannya karena dirinya merasa bahwa kapasitasnya masih jauh berada di bawah kapasitas kepala sekolah sebelumnya. Dirinya sungguh tidak menyangka akan dipindahtugaskan menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah favorit. Mengenai perpolitikan lokal, sebagai seorang pegawai negeri, dirinya tidak boleh berpolitik. Namun, dengan sedikit takut, dirinya mengungkapkan secara implisit bahwa ia tidak mempunyai pilihan; jika ia tidak ikut mendukung kebijakan rotasi ini, ia takut posisinya akan terancam. Tak disangkanya dukungan kecil yang diberikannya itu membawanya hingga ke posisi ini.

III. ANALISIS INOVASI DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN

Pemetaan yang kami lakukan memperlihatkan bahwa cukup banyak program kegiatan terkait pendidikan dasar yang pernah ataupun sedang dilakukan di Lombok Utara. Sebagian besar program/kegiatan tersebut dikelola pemda. Namun, sebagian besar program/kegiatan tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Pusat. Pemda menjadi pelaksana program-program yang ada. Pada beberapa program/kegiatan, pemda juga melakukan replikasi, modifikasi, dan/atau pelanjutan dari program/kegiatan yang ada. Inisiatif dan inovasi program/kegiatan di tingkat daerah paling banyak berasal dari pihak nonpemerintah seperti ornop lokal dan donor. Berikut adalah program/kegiatan terkait pendidikan dasar yang berhasil kami identifikasi selama penelitian, lalu dikelompokkan berdasarkan pengelolanya.

Tabel 2. Program/Kegiatan Terkait Pendidikan Dasar yang Dilakukan di Kabupaten Lombok Utara

Program/Kegiatan
<p>Dikelola pemda</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Kembali ke Khitah Pendidikan” → wujud kebijakannya belum jelas. - SPM pendidikan dasar (belum lama ini pernah ada tinjauan terhadap SPM pelayanan dasar, termasuk di bidang pendidikan → kerja sama Pemda Lombok Utara dan Uni Eropa–donor) - Program dikpora untuk percepatan peningkatan pendidikan di Lombok Utara yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama (pemda mempunyai program Percepatan Inovasi dan Nilai Tambah–PIN) - Hibah untuk Badan Akreditasi Sekolah (BAS) dan Dewan Pendidikan - Pelatihan ELPSA oleh University of Canberra dan IKIP Mataram, bekerja sama dengan pemda (merupakan inisiatif pemerintah negara lain, yakni Australia, yang bekerja sama dengan pemda) - Guru Model - Pelatihan kepala sekolah oleh LP3S - Anjuran bupati untuk (i) membaca Alquran selama 15 menit sebelum jam sekolah dan (ii) menunaikan salat Zuhur berjemaah - Kegiatan Mentari Pagi yang dilakukan di SD sebelum dimulainya pelajaran (terdiri atas, antara lain, kegiatan doa bersama dan penyampaian nasihat oleh guru sebelum dimulainya pelajaran pertama) - Kerja sama Pemda Lombok Utara dan LPDP (Pengelola Beasiswa Kementerian Keuangan RI) untuk menyekolahkan putra-putri Lombok Utara yang berprestasi → melalui ASDA III
<p>Dikelola ornop (lokal dan internasional)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Literasi anak dan perempuan oleh Klub Baca Perempuan (KBP) sejak 2006 - Taman bacaan di satu sekolah yang dibangun Dinas PU dan dikelola dengan bantuan KBP - Bantuan sarana dan prasarana sekolah dari Handicap International (HI) agar ramah terhadap murid difabel -> termasuk pembangunan fisik sekolah agar sekolah menjadi ramah difabel, serta alat-alat bantuannya seperti kursi roda dan tongkat
<p>Berasal dari–dan dikelola oleh–dunia usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - AKSOGI (Asosiasi Perusahaan di Kawasan Gili Indah) melakukan penggalangan dana untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di kawasan Gili Indah (Gili Trawangan, Meno, Air) - Bantuan dari perusahaan pada 2014 untuk pembiayaan pertemuan guru mata pelajaran (termasuk MGMP) -> Bank BNI - Bantuan untuk anak sekolah dari Vila Ombak (skala kecil)
<p>Dikelola sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di sebuah SMA di Tanjung, setiap minggu pihak sekolah meminta murid membawa buku apa saja untuk dibaca - Beberapa SD dan SMP melakukan kerja sama dengan KBP dalam menyelenggarakan taman bacaan di sekolah

Dari berbagai inisiatif/program/kegiatan di atas, yang merupakan bentuk inovasi dan berkaitan langsung dengan literasi dan numerasi serta telah dilaksanakan adalah, antara lain:

- a) **Literasi Anak dan Perempuan.** Kegiatan ini merupakan gerakan yang dimulai oleh sebuah ornop lokal, KBP, yang dipimpin oleh Nursyda Syam sejak 2006. KBP menyelenggarakan perpustakaan dan ruang belajar untuk perempuan dan anak. Tujuan awalnya adalah meningkatkan literasi perempuan dan anak, tetapi kegiatannya terus berkembang dengan aktivitas membaca bersama dan belajar memasak yang memberdayakan warga setempat, terutama perempuan. Saat ini, KBP telah berkembang hingga memiliki 21 cabang di seluruh Kabupaten Lombok Utara. KBP juga cukup sukses menggandeng berbagai pihak, untuk ikut berperan.
- b) **Pelatihan ELPSA (*Experience, Language, Pictures, Symbols, Application*).** Kegiatan ini merupakan program pelatihan untuk guru matematika yang diselenggarakan University of Canberra dan IKIP Mataram, bekerja sama dengan Dinas Dikpora NTB, Kakanwil NTB, dan LPMP NTB. Melalui program yang dilaksanakan pada 2015 ini, sejumlah guru matematika yang mewakili NTB dikirim untuk belajar di University of Canberra selama satu bulan dengan harapan bahwa sekembalinya nanti, mereka akan bisa menerapkan metode pengajaran seperti yang dipakai guru-guru di Australia. Metode yang dipelajari dari Australia tersebut bertujuan agar matematika terlihat lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami murid.
- c) **Pembuatan taman bacaan.** Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan di salah satu sekolah sampel. Upaya ini dilakukan berkat kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan KBP. Taman tersebut dibangun oleh Dinas PU, sementara pengelolaannya dilakukan dengan bantuan KBP.

Selain inovasi-inovasi di atas, ada inovasi yang tidak secara langsung berkaitan dengan upaya peningkatan literasi dan numerasi, di antaranya:

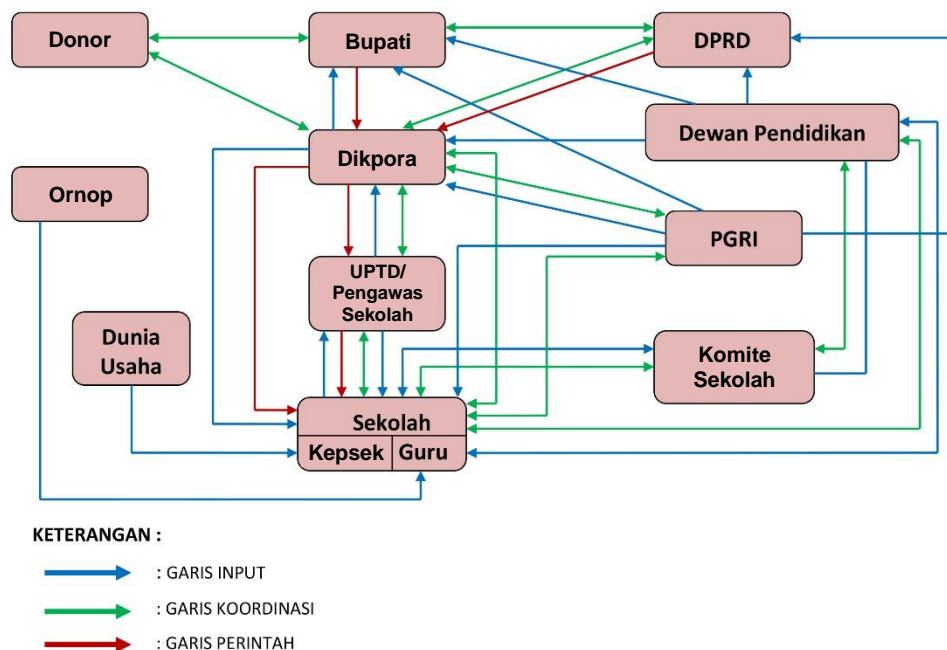
- a) Professional Development for Education Personnel Programme (ProDEP), yakni pengembangan keprofesian untuk tenaga pendidik;
- b) sertifikasi kepala sekolah oleh LP3S Solo; dan
- c) pembentukan Asosiasi Komite Sekolah Gili Indah (AKSOGI) yang bertujuan menggalang dana dari dunia usaha di daerah wisata Kelurahan Gili Indah (yang wilayahnya mencakup Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) untuk mendukung pendidikan anak di wilayah tersebut.

“Kembali ke Khitah Pendidikan”: Visi Besar yang Baru Terwujud di Gerbang Sekolah

“Kembali ke Khitah Pendidikan” merupakan slogan yang terus kami dengar tiap kali kami berbicara atau berdiskusi dengan pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara. Hingga menjelang akhir penelitian, kami belum melihat “wujud nyata” dari slogan ini. Berdasarkan informasi dari berbagai pihak, akhirnya kami berkesempatan bertemu dengan Pak H. K, orang penting di balik lahirnya slogan ini. Akhirnya kami pun mengetahui bahwa “Kembali ke Khitah Pendidikan” itu bukan sekadar slogan, melainkan sudah menjadi gerakan Pemda Kabupaten Lombok Utara, walaupun belum ada wujud nyatanya. Gagasan terkait slogan tersebut muncul kira-kira sepuluh tahun silam, berawal dari perbincangan beliau dengan seorang rekannya—yang pada waktu itu masih menjabat sebagai anggota DPRD—tentang pendidikan yang arahnya sudah benar, tetapi melupakan karakter dan budi pekerti. “Kembali ke Khitah Pendidikan” pun lahir menjadi sebuah gerakan ketika rekan beliau tersebut menjadi Bupati Lombok Utara. Gerakan “Kembali ke Khitah Pendidikan” bahkan ditetapkan sebagai strategi utama untuk mendukung upaya “Percepatan Inovasi dan Nilai Tambah (PIN)” yang dicanangkan kabupaten ini. Gerakan ini mengemban misi untuk membangun iman, takwa, dan budi pekerti luhur anak didik. Gerakan ini diharapkan bisa terwujud dengan (i) memasukkan nilai-nilai iman, takwa, dan budi pekerti ke dalam semua mata pelajaran, (ii) pelibatan masyarakat secara lebih aktif dalam pendidikan sehingga pembentukan karakter anak akan lebih banyak terjadi di tengah masyarakat daripada di sekolah, dan (iii) program-program Pemda Lombok Utara. Jika “Kembali ke Khitah Pendidikan” bisa benar-benar terwujud dan diterjemahkan dengan baik ke dalam program-program nyata, manfaatnya akan besar sekali bagi pendidikan di Lombok Utara. Gerakan ini telah menerapkan pendekatan yang holistik dan melibatkan banyak pihak yang penting dalam pendidikan anak. Akan dibutuhkan waktu yang cukup panjang agar batas-batas struktural dan sektoral pemerintahan dapat dilalui sehingga gerakan ini benar-benar terwujud menjadi program nyata. Sementara itu, Pak H. K. baru bisa menerapkan gerakan ini di sekolah yang saat ini dipimpinnya—dimulai dari kebiasaannya yang setiap pagi menunggu murid-murid datang di gerbang sekolah, menyapa mereka dan menunjukkan contoh baik kepada mereka, lalu dilanjutkan hingga ke dalam kelas oleh guru masing-masing.

IV. PERAN DAN HUBUNGAN ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN PENDIDIKAN

Guru sebagai garda terdepan sistem pendidikan jelas memiliki peran sangat besar dalam pembelajaran anak. Agar bisa menjalankan perannya dengan baik, guru tentu membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang berada di sekitarnya dan di atasnya. Kepala sekolah memegang peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan dengan efektif dan kondusif. Pengawas berperan dalam mengawasi sekolah-sekolah yang ada, dan UPTDD berperan mengoordinasi pengawas SD. Pengawas SMP dikoordinasi oleh koordinator pengawas yang berkedudukan di Dinas Dikpora. Dinas Dikpora berperan sebagai pelaksana utama program pendidikan di daerah, merencanakan program pendidikan bersama Bappeda, serta menyepakati anggaran dan peraturannya bersama DPRD. Semua hal tersebut dilakukan dengan arahan dan dukungan dari kepala daerah. Di luar elemen pemerintahan struktural, ada Dewan Pendidikan dan forum/asosiasi tenaga pendidik yang ikut mengawasi jalannya pendidikan (PGRI, Asosiasi GTT, Asosiasi Operator Sekolah, KKG, dan MGMP). Selain itu, ada masyarakat dan komite sekolah (orang tua murid dan tokoh masyarakat), ornop, donor, akademisi, media, dan dunia usaha yang ikut mendukung dan mengawasi jalannya pendidikan.



Gambar 2. Peta peran pemangku kepentingan pendidikan Kabupaten Lombok Utara

Catatan: berdasarkan hasil FGD tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2016 di Kantor Bappeda.

Terlepas dari peran ideal masing-masing pemangku kepentingan, ada beberapa catatan yang harus dicermati, di antaranya:

- a) ketertarikan saja tidak cukup karena besarnya peran pemangku kepentingan juga ditentukan oleh sumber daya (anggaran dan sumber daya lain) yang dimiliki;

- b) pemangku kepentingan yang minim sumber daya sering kali terlangka atau tidak dapat berperan secara optimal;
- c) pengawasan kualitas pendidikan tidak berjalan dengan baik karena pemangku kepentingan yang seharusnya berperan tidak menjalankan perannya dengan baik;
- d) banyak di antara pemangku kepentingan, terutama yang berada di struktur pemerintahan, sekadar menggugurkan tanggung jawabnya dan tidak menunjukkan motivasi untuk berinovasi;
- e) ada potensi peran masyarakat dan pemerintah desa yang belum dimanfaatkan; dan
- f) hal yang juga penting adalah tenaga pendidik (terutama guru dan kepala sekolah) yang memimpikan iklim kerja yang lebih profesional.

Pengawas dan UPTDD penting untuk memastikan kualitas pendidikan, tetapi perannya tidak berjalan optimal. Hal ini terlihat nyata dari proses mutasi/rotasi/promosi kepala sekolah yang tidak memanfaatkan laporan/pendapat pengawas. Kenyataannya, setiap bulan pengawas membuat laporan kepada Dinas Dikpora, tetapi tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Demikian pula UPTDD yang setiap bulan membuat laporan kepada Dinas Dikpora. Pengawas dan UPTDD jarang sekali dilibatkan dalam penempatan tenaga pendidik. Di sisi lain, pengawas dan UPTDD tampaknya juga tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Beberapa pihak bahkan menyebutkan bahwa laporan UPTDD sesungguhnya hanya penggabungan laporan-laporan yang dibuat oleh kepala sekolah tanpa analisis yang berarti. Kunjungan pengawas ke sekolah juga dianggap belum optimal.

Belum optimalnya fungsi pengawas dan UPTDD tidak lepas dari sumber daya manusia yang memangku jabatan tersebut, dan juga kapasitas kelembagaan serta posisinya dalam struktur pendidikan daerah. Telah menjadi praktik umum bahwa posisi pengawas selalu diisi mantan kepala sekolah, bahkan ada yang mengatakan bahwa jabatan pengawas dipakai untuk “menonaktifkan kepala sekolah” atau, dengan kata lain, jabatan buangan. Di sisi lain, para pemangku kepentingan bersepakat bahwa diperlukan pengawas yang kemampuannya “di atas” kepala sekolah agar mereka bisa melakukan pengawasan dengan baik. Dilihat dari struktur dan posisinya, meskipun berstatus sebuah satuan kerja, UPTDD tidak memiliki anggaran untuk membuat posisinya kuat terhadap sekolah. Sering kali sekolah berhubungan langsung dengan Dinas Dikpora tanpa melibatkan UPTDD, di antaranya untuk urusan anggaran BOS.

Dewan Pendidikan dan PGRI memiliki ketertarikan besar, tetapi karena keterbatasan anggaran, perannya antara ada dan tiada. Jika dilihat dari posisinya, Dewan Pendidikan sesungguhnya bisa lebih berperan dalam membina dan meningkatkan komite sekolah. Selama ini pembinaan yang dilakukan Dewan Pendidikan masih terbatas untuk sekolah-sekolah tertentu secara bergiliran. Penyebabnya adalah sangat terbatasnya anggaran untuk Dewan Pendidikan. Dewan pendidikan juga tidak bisa berbuat banyak untuk meminta anggaran yang lebih besar. Sudah beberapa kali pengurus Dewan Pendidikan mencoba mengajukan anggaran kepada Dinas Pendidikan, tetapi tidak berhasil. Posisinya yang berada di luar struktur pemerintahan membuat Dewan Pendidikan tidak bisa memberi pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar secara keseluruhan. Selain itu, hampir sama dengan pengawas, jabatan di Dewan Pendidikan sering kali hanya dijadikan “pelabuhan terakhir” para pejabat yang telah berakhir masa jabatannya.

Organisasi profesi guru memiliki potensi peran dalam upaya peningkatan kualitas guru, tetapi fungsinya belum optimal. Secara struktural, kepala sekolah dan pengawas merupakan pihak yang berperan dalam memastikan kinerja guru dalam mengajar. Pengawas juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap para guru. Namun, pada banyak kasus, pengawas tidak terlalu aktif menjalankan tugasnya. Komponen lain yang diharapkan perannya adalah komite sekolah, tetapi komite sekolah tampak kurang memahami peran dan fungsinya. Selain itu, sedianya

terdapat forum-forum guru seperti KKG (untuk guru SD) dan MGMP (untuk guru SMP) yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja guru, tetapi KKG tidak terlalu aktif di Kabupaten Lombok Utara. Demikian pula MGMP yang hanya aktif untuk mata pelajaran tertentu yang akan muncul dalam ujian nasional. Minimnya penggalangan dana secara swadaya oleh pihak guru menjadi penyebab mati surinya forum-forum tersebut. PGRI sebagai organisasi profesi guru terbesar di Indonesia memiliki peran strategis sebagai suatu bentuk forum guru. Namun, selama ini yang terjadi hanya berupa keanggotaan guru dalam organisasi ini, dan tidak ada pengaruh signifikan dari keanggotaan tersebut terhadap peningkatan mutu guru.

Ada potensi peran pemerintah desa dan masyarakat, tetapi belum termanfaatkan dengan baik.

Ketika sekolah terus mengeluh tentang kesulitan mereka dalam membiayai GTT, ditambah lagi dengan larangan untuk memungut dana dari orang tua murid, sesungguhnya ada potensi yang belum termanfaatkan dari peran pemerintah desa. Dengan adanya otonomi desa dan semangat bina lingkungan, yaitu bahwa sekolah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat di sekitarnya, bukan tidak mungkin bahwa desa dan masyarakat akan memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah di lingkungannya.

Tenaga pendidik menginginkan iklim kerja yang lebih profesional. Iklim profesional yang dimaksud adalah (i) (bagaimana upaya agar tercipta) kondisi yang tidak membebani mereka dengan pekerjaan selain mengajar (terutama pekerjaan administratif) yang sangat banyak sehingga mengganggu kegiatan mengajar dan (ii) (bagaimana upaya agar) promosi/rotasi/mutasi jabatan dilakukan secara transparan dengan persyaratan dan mekanisme yang jelas.

Dengan peran dan fungsi berbagai pemangku kepentingan yang ada, serta berbagai permasalahan yang dihadapi sektor pendidikan dasar di Lombok Utara, ada beberapa catatan untuk pelaksanaan Program INOVASI ke depan. Pada pelaksanaannya nanti, INOVASI hendaklah tidak hanya diterjemahkan menjadi hal-hal yang sifatnya tidak berkesinambungan. Intervensi yang dilakukan sebaiknya berupa perbaikan sistem pengajaran yang meliputi metode pengajaran dan dukungan bagi tenaga pengajar. Harus dibentuk tim yang bisa menyusun program dengan baik dan mampu menerjemahkannya menjadi kegiatan-kegiatan pendidikan yang berkesinambungan. Untuk itu, dibutuhkan individu dan lembaga yang tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga memiliki semangat serta komitmen yang kuat terhadap pendidikan. Tim tersebut harus memiliki kedudukan yang kuat, mengingat pentingnya misi yang diemban.

DAFTAR ACUAN

Badan Pusat Statistik (2016) *Indeks Pembangunan Manusia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) *Hasil Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Ajaran 2014/2015* <<http://118.98.234.50/lhun/statistik.aspx>> [17 Desember 2016]. (Alamat situs web sudah berubah dan sedang dikembangkan pada alamat berikut: hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id.)

Seufert, Michael, Tobias Hosfeld, Anika Schwind, Valentin Burger, dan Phuoc Tran-Gia (2016) 'Group-Based Communication in WhatsApp.' *IFIP Networking Conference & Workshops 1*: 536–541. DOI: [10.1109/IFIPNetworking.2016.7497256](https://doi.org/10.1109/IFIPNetworking.2016.7497256).

Peraturan dan Perundang-Undangan

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016–2021.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Ringkasan Sepuluh Isu Teratas Berdasarkan Kelompok Pemangku Kepentingan

Isu teratas dirangkum berdasarkan penggalan informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara. Secara keseluruhan, penggalan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dan wawancara kelompok dengan 41 individu dan kelompok informan yang terdiri atas pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, unit kerja pendidikan di tingkat kecamatan, sekolah, asosiasi, ornop, media lokal, sekolah (guru dan kepala sekolah), orang tua murid, dan murid.

Pengidentifikasian isu dilakukan secara bertahap mulai dari hasil pembahasan mengenai kondisi pendidikan di Lombok Utara secara umum hingga masuk pada kondisi pembelajaran murid di pendidikan dasar. Pendekatan yang berbeda kami lakukan terhadap kelompok informan murid, yang penggalan informasinya selama penelitian lebih banyak difokuskan pada pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Isu-isu yang muncul dikelompokkan menjadi kelompok isu besar berdasarkan kesamaan tema, yang dalam penelitian ini pengelompokan tersebut menghasilkan 15 kelompok isu besar. Kelompok isu yang ada kemudian dipetakan secara kuantitatif sederhana dengan melihat frekuensi dan modus. Detail dan akar-akar setiap isu juga tetap diikuti dalam pemetaan untuk memudahkan pengidentifikasian isu spesifik yang muncul pada masing-masing kelompok pemangku kepentingan.

Ringkasan sepuluh isu teratas akan disajikan dalam lampiran ini, dengan batasan yang tidak mutlak dengan pertimbangan bahwa beberapa isu dinilai sama pentingnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai ringkasan sepuluh isu teratas ini akan disajikan berdasarkan kelompok pemangku kepentingan. Adapun pengelompokan pemangku kepentingan didasarkan pada perannya masing-masing terhadap sektor pendidikan di Lombok Utara, yakni

- a) kelompok pembuat kebijakan: Dinas Dikpora, Bappeda, DPRD, dan Asda III;
- b) kelompok pelaksana: guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan UPTD;
- c) kelompok pendukung: orang tua, komite sekolah, Dewan Pendidikan, PGRI, KKG, ornop lokal (KBP), media lokal (Radar Lombok), dan kepala desa; dan
- d) kelompok sasaran: murid SD dan murid SMP, laki-laki dan perempuan, dari dua SD sampel dan dua SMP sampel.

Kelompok Pembuat Kebijakan

Isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan, antara lain, adalah (i) kualitas guru yang kurang; (ii) dukungan orang tua yang kurang dan pandangan masyarakat yang belum melihat pentingnya pendidikan; (iii) masalah pada kebijakan sektor pendidikan di daerah yang banyak didominasi oleh politik lokal; (iv) kurangnya dukungan untuk upaya peningkatan kapasitas/kualitas pengajaran; (v) rendahnya kesejahteraan guru, terutama GTT; (vi) rendahnya keberlanjutan pendidikan murid (pendidikan menengah dan atas); (vii) belum terpenuhinya SPM pendidikan; (viii) disparitas antarsekolah; (ix) jumlah dan distribusi guru PNS; dan (x) masalah penerapan kurikulum dan dukungan sarana prasarannya.

Kualitas guru yang kurang. Para informan yang berasal dari kelompok pembuat kebijakan melihat rendahnya hasil pembelajaran murid pendidikan dasar di Lombok Utara dilatarbelakangi oleh

kualitas guru yang kurang. Hal ini tergambar dari cara guru mengajar yang kurang bisa dipahami oleh murid, bersifat monoton dan satu arah, dan belum banyak memanfaatkan alat bantu/media pengajaran dengan baik. Sebagian besar guru penguasaan teknologinya masih rendah, misalnya tidak bisa mengoperasikan LCD, tetapi para pembuat kebijakan tidak melihat itu sebagai halangan bagi guru untuk lebih kreatif dalam mengajar. Keluhan lain adalah kurangnya integritas dan tanggung jawab guru dalam mengajar. Mereka menyesalkan bahwa tunjangan sertifikasi guru yang didapat oleh para guru tidak digunakan untuk membeli alat pendukung kegiatan mengajar, melainkan untuk membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif. Guru juga tidak berupaya untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya. Salah seorang pembuat kebijakan bahkan mengatakan bahwa penerapan Kurikulum 2013 yang mengandalkan keaktifan murid di dalam kelas kerap dijadikan sebagai kesempatan bagi guru untuk meninggalkan tanggung jawabnya. Ia memberi contoh adanya guru yang menyuruh murid-muridnya mencari bahan untuk tugas pelajaran, lalu meninggalkan mereka begitu saja untuk membuka media sosial.

Dukungan orang tua yang kurang dan pandangan masyarakat yang belum melihat pentingnya pendidikan menyebabkan rendahnya keberlanjutan pendidikan murid ke sekolah menengah dan atas. Rendahnya pembelajaran murid juga tak lepas dari kurangnya perhatian sebagian orang tua terhadap pendidikan anak. Informan kami, baik dari Dinas Dikpora, Bappeda, Asda, maupun DPRD, sepakat bahwa sebagian besar waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah ketimbang di sekolah. Dengan demikian, orang tua seharusnya bisa berperan lebih besar. Namun, pada kenyataannya sebagian besar orang tua masih belum bisa melihat pentingnya pendidikan untuk masa depan anak. Orang tua sibuk bekerja. Terutama mereka yang tinggal di perdesaan dan berpendidikan rendah dan memiliki keterbatasan ekonomi, masih melihat secara pragmatis bahwa pendidikan anak belum tentu berbanding lurus dengan pendapatan ekonomi. Pada banyak kasus, orang tua justru mengajak anak bekerja dan meninggalkan sekolah. Tantangan lainnya adalah faktor sosial-budaya di kalangan masyarakat. Di beberapa tempat masih ditemukan anak-anak putus sekolah karena pernikahan dini.

Berbagai hal tersebut pula yang menyebabkan rendahnya keberlanjutan sekolah anak ke tingkat pendidikan menengah dan atas. Berdasarkan pemetaan isu yang dilakukan, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini memercayai setidaknya ada tiga faktor utama penyebab masih rendahnya keberlanjutan pendidikan anak ke tingkat pendidikan menengah, yakni putus sekolah karena menikah usia dini,⁷ alasan ekonomi, dan belum tersedianya SMP dan SMA di wilayah sekitar. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berupaya melakukan pendekatan melalui para tokoh masyarakat, agama, dan adat.

Dominasi politik dalam kebijakan pendidikan daerah. Masalah dengan kebijakan sektor pendidikan di Kabupaten Lombok Utara berkaitan erat dengan dominasi kepentingan politik yang melatarbelakangi pengambilan keputusan. Selama penelitian ini berlangsung, masih sering terjadi mutasi dan rotasi kepala sekolah secara besar-besaran oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Hampir semua kepala sekolah diganti, dimutasi, atau dirotasi ke sekolah lain masih dengan posisi sebagai kepala sekolah atau “turun” kembali menjadi guru. Mutasi/rotasi ini pun berlanjut ke tenaga pendidik lain, yakni guru, yang tinggal menunggu waktu hingga datang keputusan mutasi/rotasi untuk mereka. Kabarnya, mutasi/rotasi tidak hanya untuk tenaga pendidik, tetapi juga untuk para pejabat struktural di kabupaten. Hal yang membuat resah adalah keputusan mutasi/rotasi tersebut dilakukan sepihak dan tampak dilakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi. Tentu ini mendorong bermunculannya berbagai spekulasi tentang langkah bupati dan membuat iklim kerja menjadi tidak baik. Di kalangan para pembuat kebijakan,

⁷Tidak ada aturan tertulis mengenai harus dikeluarkannya murid jika hamil. Namun, di banyak sekolah di Indonesia, murid perempuan kerap dikeluarkan dari sekolah karena hamil, sedangkan untuk murid laki-laki, tidak ada aturan tidak tertulis apapun yang “mengaturinya”.

isu politik itu terdengar sayup-sayup, tetapi terus saja muncul secara implisit dalam berbagai kesempatan wawancara. Sehubungan dengan hal tersebut, informan dari kelompok pembuat kebijakan hanya bisa melontarkan pendapat “yang aman” sebagai “bentuk penyegaran tenaga pendidik”.

Kurangnya dukungan untuk upaya peningkatan kapasitas/kualitas pengajaran. Para pembuat kebijakan menyadari besarnya tantangan yang mereka hadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara. Dengan guru sebagai garda terdepan pelaksanaan pendidikan, rendahnya kualitas guru menjadi persoalan mendesak yang perlu segera diselesaikan. Secara individu, para pembuat kebijakan telah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi akan hal ini. Mereka menyadari bahwa pada kenyataannya pelatihan untuk para guru masih sangat kurang. Namun, apa yang bisa mereka lakukan sering kali hanya sebatas tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Hal ini terlihat dari sedikitnya inisiatif penyelenggaraan pelatihan untuk para guru yang berasal dari pemda. Pelatihan yang ada pun belum banyak ditujukan untuk peningkatan metode mengajar guru. Pelatihan untuk mendukung pengajaran murid berkebutuhan khusus juga masih sangat kurang, padahal Pemerintah Provinsi NTB telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang inklusif.

Kurangnya kesejahteraan guru, terutama GTT. Selama penelitian ini berlangsung, tim peneliti melihat langsung bagaimana guru-guru yang tergabung dalam forum GTT berdemo di depan DPRD menuntut kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan guru, terutama yang masih berstatus GTT, menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para informan yang berasal dari kelompok pembuat kebijakan. Dengan terbatasnya jumlah dan distribusi guru PNS, kekosongan posisi guru di banyak sekolah diisi oleh para GTT. Di Lombok Utara, pengangkatan GTT merupakan wewenang masing-masing kepala sekolah, demikian pula honorinya. Selama ini penghasilan GTT mengandalkan dana BOS yang disalurkan kepada sekolah dan sebagian kecil berasal dari iuran komite sekolah yang berasal dari sumbangan orang tua murid. Belum lama ini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengeluarkan imbauan mengenai larangan memungut iuran komite sekolah, dan hal ini makin membuat resah pihak sekolah dan juga GTT yang jumlahnya tidak sedikit. Terkait hal ini, anggota Komisi III DPRD yang menjadi informan kami mengutarakan keprihatinannya atas minimnya penghasilan para GTT. Namun, beliau menjelaskan bahwa akan sulit bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk memberikan tunjangan bagi para GTT. Dengan jumlah GTT sekitar 3.900 orang, akan sulit bagi pemerintah setempat untuk memberikan tunjangan, mengingat APBD daerah yang hanya sekitar 800 miliar rupiah setahun. Beliau menyampaikan bahwa perwakilan GTT yang menemuinya menuntut tunjangan sebesar satu juta rupiah setiap bulannya. Melengkapi informasi dari anggota Komisi III DPRD, Asda III menjelaskan dari sisi administratif kepegawaian, yaitu pemberian tunjangan tidak bisa serta merta dilakukan mengingat status mereka. Lain halnya dengan pegawai berstatus pegawai pemda yang bisa mendapat honor dari daerah. Beliau juga menambahkan bahwa akan sulit bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk mengangkat GTT menjadi pegawai daerah, selain karena keterbatasan anggaran tetapi juga karena adanya pembatasan pengangkatan pegawai. Sudah tentu hal ini akan sulit untuk dipenuhi. Hingga penelitian ini berakhir, isu ini masih terus bergulir dan belum menemui titik temu.

Jumlah dan distribusi guru PNS. Masih terkait dengan pembahasan tentang kurangnya kesejahteraan GTT, kurangnya jumlah guru PNS menjadi beban bagi sekolah karena mereka harus merekrut GTT yang honorinya harus dibiayai sendiri oleh pihak sekolah. Sementara itu, sejak adanya pelarangan pemungutan iuran komite sekolah, sumber pendanaan sekolah menjadi makin

terbatas.⁸ Distribusi PNS juga dinilai masih kurang merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak sekali keluhan tentang sedikitnya guru PNS “yang mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil.” Sebagian besar posisi guru di sekolah-sekolah daerah terpencil diisi oleh GTT yang pengangkatan dan honorinya diurus sendiri oleh pihak sekolah.

Belum terpenuhinya SPM pendidikan. Hal ini merupakan kekhawatiran yang kerap dilontarkan oleh para pembuat kebijakan. Pemenuhan SPM pendidikan meliputi aspek rasio murid dan guru, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga capaian pendidikan. Menurut kepala Bappeda, hal ini utamanya ditemukan pada jenjang pendidikan dasar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara adalah mencanangkan percepatan inovasi dan nilai tambah (PIN) bidang pendidikan, tetapi hasilnya belum terlihat karena baru saja dicanangkan.

Disparitas antarsekolah. Isu ini utamanya terkait dengan jumlah murid yang mendaftar. Sekolah-sekolah unggulan setiap tahunnya menerima pendaftaran murid yang sangat banyak, bahkan beberapa sekolah menerima pendaftaran murid sampai melebihi kapasitas yang dapat ditampungnya. Salah satu sekolah tersebut adalah SD sampel studi ini yang merupakan SD unggulan di pusat ibu kota kabupaten. Membludaknya jumlah pendaftar sampai memaksa pihak sekolah untuk membuka kelas baru. Kabarnya, banyak orang tua calon murid yang rela “membayar uang kursi” untuk mendaftarkan anaknya. Hal ini bahkan membuat sekda turun tangan hingga keluarlah imbauan mengendai larangan memungut iuran dari orang tua murid. Bahkan, dengan dibukanya kelas baru di sekolah-sekolah unggulan tersebut, kelas yang ada masih saja memiliki jumlah murid yang banyak. Di kelas-kelas gemuk, seorang guru harus mengajar 30 hingga 40 murid. Sebagian besar sekolah unggulan memang berlokasi di wilayah perkotaan, tetapi ada juga sebagian lainnya yang berlokasi di perdesaan. Sekolah sampel studi ini yang berlokasi di perdesaan juga merupakan sekolah unggulan. Sekolah tersebut juga memiliki kelas-kelas gemuk yang hanya ditangani oleh satu guru setiap kelasnya. Hal sebaliknya terjadi di sekolah-sekolah lain yang “minim peminat”. Sekolah-sekolah tersebut menghadapi persoalan lain akibat dari sedikitnya jumlah murid. Selain sedikitnya dana BOS yang diterima, juga ada kemungkinan bahwa suatu saat mereka harus digabung dengan sekolah lain. Dalam pemilihan sekolah, tidak ada sistem rayonisasi dan pemerintah tidak bisa menghalangi upaya murid dan orang tuanya yang ingin diterima di sekolah tertentu.

Masalah penerapan kurikulum serta sarana dan prasarana pendukungnya. Kurikulum yang kerap berganti dan penerapan K-13 sering menjadi hal yang dipermasalahkan oleh guru dan pihak sekolah. Namun, para pemangku kepentingan melihat bahwa apapun kurikulumnya, seharusnya guru bisa menyesuaikan diri. Lagi-lagi mereka melihat “sulitnya guru untuk beradaptasi dengan kurikulum baru” sebagai salah satu indikator rendahnya kualitas guru. Dinas Dikpora dan Bappeda secara terang mengeluhkan bahwa kurikulum apapun yang diterapkan selama ini, cara mengajar guru tetap tidak berubah, sampai ada istilah yang dilontarkan oleh Sekretaris Bappeda: *“Aapun makanannya minumannya tetap teh sosro”*

“Kurikulum apapun yang hadir, kalau kompetensi guru tidak diperbaiki, ya gaya mengajar guru itu-itu saja.” Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora berujar bahwa pergantian kurikulum sudah menjadi hal yang lazim di Indonesia. Setiap ganti menteri pasti kurikulum berganti. Hal yang terpenting sesungguhnya bukan kurikulumnya, tetapi bagaimana guru bisa mengerti apa yang diajarkannya dan bagaimana guru bisa menyampaikannya dengan baik kepada murid. Semua itu akan sangat bergantung pada kreativitas guru.

⁸Pada saat FGD di tingkat kabupaten, terkonfirmasi bahwa pelarangan tersebut belum menjadi larangan resmi (belum ada surat keputusan tertentu); sifatnya masih berupa imbauan saja. Meskipun demikian, hampir semua sekolah telah mematuhi.

Penerapan kurikulum juga menemui masalah karena masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya, terutama buku panduan. Sebagai gambaran, ada sekolah yang rasio buku dan muridnya masih satu berbanding tiga yang artinya satu buku untuk tiga murid. Namun, masalah kekurangan buku (yang telah menerapkan K-13) tidak hanya terjadi di Lombok Utara, tetapi juga di daerah-daerah lain dan bahkan di ibu kota provinsi (Kota Mataram). Selain itu, persoalan lain terkait sarana dan prasarana adalah masih minimnya pengadaan alat peraga. Pengadaan alat peraga agaknya masih sulit dipenuhi secara maksimal karena walaupun alokasi anggaran pendidikan daerah telah mencapai 20%, sebagian besar masih difokuskan pada pembangunan fisik dan belanja pegawai. *“Anggaran yang benar-benar masuk ke dalam kelas hanya 5,1 persen,”* demikian penjelasan Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang Sosial-Budaya Bappeda.

Kelompok Pelaksana

Pada dasarnya, kelompok pelaksana pendidikan terbagi menjadi dua, yakni kelompok yang berada di dalam sekolah (guru dan kepala sekolah) dan di luar sekolah (pengawas sekolah dan UPTD). Guru dan kepala sekolah sehari-harinya menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan bersentuhan langsung dengan murid dan orang tua, sedangkan pengawas sekolah dan UPTD adalah pihak-pihak yang melakukan supervisi terhadap sekolah dan merupakan kepanjangan tangan Dinas Dikpora yang memberi dukungan langsung kepada pihak sekolah.

Isu yang menjadi perhatian para pelaksana, antara lain, adalah (i) dukungan orang tua terhadap pendidikan anak kurang; (ii) pelatihan peningkatan kapasitas guru (dan juga pengawas sekolah) kurang; (iii) kualitas guru yang kurang; (iv) keterbatasan belajar anak; (v) sarana dan prasarana kurang; (vi) jumlah dan distribusi guru PNS; (vii) dominasi politik dalam kebijakan pendidikan daerah; (viii) masalah dalam penerapan kurikulum; (ix) disparitas antarsekolah; dan (x) kesejahteraan guru kurang, terutama GTT.

Dukungan orang tua terhadap pendidikan anak kurang. Pada banyak kesempatan wawancara, hal ini sering menjadi keluhan pertama yang dikemukakan oleh para guru dan kepala sekolah. Bentuk kurangnya perhatian orang tua yang diungkapkan oleh para pelaksana di antaranya adalah bahwa orang tua terlalu sibuk bekerja dan kurang membimbing anak, anak tidak sarapan, dan anak tidak mandi sebelum sekolah. Pada beberapa kasus, bahkan ada anak yang diajak oleh orang tuanya untuk bekerja. Selain itu, ada keluhan terkait bentuk perhatian orang tua yang salah kaprah dengan mengerjakan tugas pekerjaan rumah anak. Menurut para pelaksana, kurangnya perhatian dan bentuk perhatian yang salah dari orang tua tak lepas dari kenyataan bahwa sebagian besar orang tua yang seperti itu berpendidikan rendah, terbatas secara ekonomi, dan tinggal di lingkungan yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan untuk anak.

Kurangnya dukungan dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak akhirnya bermuara pada satu kesimpulan yang keluar dari para pelaksana, yakni orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada pihak sekolah. Tentu ini menjadi beban berat karena berbagai pihak menyadari bahwa waktu anak di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak anak justru dihabiskan di luar sekolah bersama orang tuanya.

Pelatihan peningkatan kapasitas guru (dan pengawas sekolah) kurang. Pihak pelaksana di sekolah, pengawas sekolah, dan UPTD sama-sama mengeluhkan sangat sedikitnya kesempatan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pengajar (guru). Kalaupun ada pelatihan, kebanyakan pelatihan tersebut mengenai hal-hal administratif terkait penerapan kurikulum baru atau penggunaan alat multimedia pembelajaran (elektronik). Pelatihan-pelatihan yang selama ini diselenggarakan pun mendapatkan banyak sekali keluhan mulai dari pelaksanaannya, waktu pelatihan yang sangat terbatas, tidak jelasnya penyampaian materi oleh pengajar sampai ketiadaan alat atau ketiadaan sarana pendukung bagi para guru untuk menerapkannya di sekolah masing-masing.

Keluhan mengenai kurangnya pelatihan atau upaya peningkatan kapasitas lainnya juga datang dari para pengawas sekolah yang mengatakan bahwa tak pernah sekalipun mereka memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan.

Kualitas dan kualifikasi guru kurang. Meninjau permasalahan ini, terlihat adanya perbedaan sudut pandang antara pelaksana di tingkat sekolah (guru dan kepala sekolah) dan pengawas sekolah dan UPTD. Sebagian guru dan kepala sekolah mengungkapkan bahwa kualitas guru kurang lebih dapat dilihat pada minimnya penguasaan teknologi para guru—seperti tidak bisa menggunakan LCD. Sebagian guru dan kepala sekolah merasa tertinggal hanya karena tidak memakai LCD pada waktu mengajar atau hanya sebagian kelas saja yang sudah mempunyai fasilitas LCD. Hal ini tentu salah kaprah karena seharusnya guru dalam mengajar tidak bergantung pada suatu alat tertentu saja. Terlebih materi yang disampaikan sama saja. Pengawas sekolah, UPTD, dan sebagian guru dan kepala sekolah lain memiliki pemahaman yang lebih baik dengan mengungkapkan bahwa kualitas guru yang kurang bisa dilihat dari kurangnya kreativitas mereka dalam memanfaatkan apa yang ada di sekitar sebagai alat bantu mengajar. Mereka mengutarakan kekhawatiran terhadap kualitas mengajar guru lebih pada sikap dan penyampaian guru dalam mengajar dan minimnya kemauan mereka untuk belajar. Salah satu pengawas sekolah bahkan mengatakan bahwa “literasi guru rendah”, tetapi kemauan belajarnya kurang. Di kesempatan berbeda, pengawas sekolah dan kepala sekolah lain mengungkapkan bahwa guru malas untuk membaca dan tidak mempunyai waktu untuk membaca atau belajar, padahal hal tersebut penting untuk membekali mereka dalam mengajar.

Mengenai kualifikasi guru, para pelaksana dari kalangan pengawas sekolah dan UPTD menyampaikan keluhan banyaknya guru yang tidak sesuai kualifikasi pendidikannya, terutama untuk tingkat SD yang di dalamnya hanya sedikit guru yang bergelar sarjana pendidikan sekolah dasar (S.Pd.SD.). memang banyak guru SD yang sudah bergelar sarjana tetapi hanya untuk bidang-bidang spesifik seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan sebagainya, padahal guru SD dituntut untuk bisa mengajar semua pelajaran. Tak terbayang jika guru SD lulusan Pendidikan Bahasa Indonesia harus mengajar Matematika. Pada kesempatan FGD di tingkat kabupaten, perwakilan dari pengawas sekolah dan UPTD bahkan menyampaikan bahwa mereka merasa lebih nyaman dengan mekanisme yang pernah diterapkan di masa lalu, yaitu sebagian besar sumber daya guru berasal dari sekolah pendidikan guru (SPG) karena lebih jelas jalurnya.

Keterbatasan belajar pada anak. Cukup sering para pelaksana, terutama guru dan kepala sekolah, mengungkapkan keluhan terkait keterbatasan belajar pada anak, mulai dari kemampuan inteligensi anak yang kurang, minat belajar anak kurang, minat baca anak kurang, anak lebih suka bermain, anak terlalu bergantung kepada kalkulator, sampai penguasaan bahasa Indonesia yang kurang. Ada kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berujar bahwa kurangnya intelegensi anak karena anak tersebut kurang gizi. Untuk keterbatasan lainnya, mereka menilai bahwa permasalahannya terletak pada minat anak itu sendiri dan bimbingan dari orang tuanya, serta pengaruh lingkungan. Sangat disayangkan bahwa hanya sedikit orang yang menyadari bahwa kurangnya minat belajar/membaca anak juga dipengaruhi oleh bagaimana cara guru mengajar dan mengajak mereka untuk belajar dan membaca. Hanya sedikit pula orang yang menyadari bahwa bermain merupakan hal yang baik untuk perkembangan anak. Sebagian pelaksana mengeluhkan bahwa anak-anak yang masuk SD belum bisa membaca dan hal ini disebabkan karena mereka tidak mengenyam pendidikan TK sebelumnya. Di satu sisi, ini juga merupakan dampak dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang mensyaratkan bahwa untuk bisa masuk SD, anak harus sudah bisa membaca. Walau kebijakan tersebut sudah tidak ada, sebagian guru SD masih berharap akan hal ini karena bisa mengurangi beban mereka dalam mengajar membaca, menulis, dan berhitung kepada anak-anak kelas rendah (1, 2, dan 3).

Sarana dan prasarana kurang. Masalah kurangnya sarana dan prasarana merupakan hal yang paling banyak diungkapkan oleh kepala sekolah. Sarana dan prasarana yang dimaksud, antara lain, adalah ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan, taman, dan alat bantu mengajar, terutama buku penunjang yang hingga dimulainya penerapan kurikulum baru belum juga datang. Ada juga isu yang dilontarkan tentang minimnya sarana pendukung untuk murid berkebutuhan khusus.

Dominasi politik dalam kebijakan pendidikan daerah. Kelompok guru paling banyak melontarkan keluhan tentang isu ini. Kepala sekolah, pengawas sekolah, dan UPTD cenderung “mengambil sikap aman” mengenai hal ini mengingat jabatan mereka. Selama penelitian ini berlangsung terlihat jelas bahwa berbagai pihak di sektor pendidikan merasakan ketaknyamanan. Guru-guru yang berstatus PNS merasa resah karena mereka bisa kapan saja dimutasi ke daerah lain. Hal yang membuat resah adalah kemungkinan mereka dipindahkan ke daerah terpencil. Kami juga bertemu dengan kepala sekolah yang kini “turun jabatan menjadi guru” dan menyampaikan kekecewaannya dengan mengatakan bahwa keputusan mutasi pada dirinya dilakukan tanpa alasan jelas. Guru-guru lain yang bersimpati mengatakan bahwa mutasi/rotasi besar-besaran yang dilakukan oleh pimpinan daerah tidak mempertimbangkan perasaan dan psikologi orang-orang yang “jabatannya turun”. Pada beberapa kasus, keberadaan para kepala sekolah yang turun jabatan juga membuat segan kepala sekolah yang kini memimpin sekolah. Salah seorang kepala sekolah bahkan menyediakan meja kerja di ruangnya (ruang kepala sekolah) untuk mantan kepala sekolah yang kini menjadi guru untuk menjaga perasaannya. Berbagai pihak percaya bahwa rotasi ini dilakukan untuk “memenuhi janji politik” bupati terpilih kepada para pendukungnya di saat pemilu. Secara implisit, beberapa pihak juga mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak mau berpolitik, tetapi terpaksa memberi dukungan karena takut posisi/karir mereka terancam.

Salah seorang kepala sekolah yang kami temui mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak enak diangkat menjadi kepala sekolah unggulan, padahal selama ini pengalaman beliau hanya sebagai kepala sekolah daerah terpencil. Ia mengatakan bahwa ia mengemban beban yang sungguh berat dan merasa kapasitasnya masih jauh di bawah kapasitas kepala sekolah sebelumnya. Dirinya sungguh tidak menyangka akan dipindahtugaskan menjadi kepala sekolah di sekolah unggulan. Mengenai perpolitikan lokal, sebagai seorang pegawai negeri dirinya tidak boleh ikut berpolitik. Namun, dengan sedikit takut dirinya mengungkapkan secara implisit bahwa tidak ada pilihan bagi dirinya karena jika tidak ikut mendukung, posisinya akan terancam. Tak disangka dukungan kecil yang diberikannya membawanya ke posisi ini.

Masalah dalam penerapan kurikulum. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kesempatan pelatihan guru, dan sarana dan prasarana pendukung yang kurang. Kurikulum yang banyak dibahas dalam penelitian ini adalah K-13 yang telah direvisi. Dijelaskan oleh para pelaksana bahwa pada 2013 sebagian sekolah telah menerapkan kurikulum tersebut secara bertahap. Untuk tingkat SD, penerapannya baru pada kelas 1 dan kelas 4. Namun, kemudian pemerintah menetapkan untuk kembali lagi ke kurikulum sebelumnya (KTSP). Tak lama setelah itu, kurikulum berganti lagi menjadi K-13 yang sudah direvisi. Kurikulum yang kerap berganti sudah tentu membingungkan mereka. Ketika mereka belum terbiasa dengan suatu kurikulum, kurikulum sudah berganti lagi ke kurikulum baru, dan seterusnya bagai tak pernah berhenti hingga ada anekdot “ganti menteri ganti kurikulum.” Para pelaksana menjadi makin bingung karena pergantian kurikulum tidak disertai pelatihan yang cukup dan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Salah satu contoh yang sering dikeluhkan adalah belum adanya buku penunjang. Sebagian guru mencoba mengatasinya dengan memfotokopi materi dari buku yang ada, sebagian guru lain mencoba memakai buku-buku dari K-13 yang lama, dan sebagian guru lain menyuruh murid-murid menyalin dari buku yang ada atau menyuruh salah seorang murid mencatat di papan tulis dengan mencontoh dari buku yang ada lalu teman-temannya sekelas mengikutinya. Untuk metode yang terakhir, walau terlihat kurang baik sebagai metode mengajar, murid-murid justru bisa menerimanya karena menurut mereka

dengan demikian mereka bisa mempelajari catatan tersebut di rumah karena tidak ada buku pelajaran.

Jumlah dan distribusi guru PNS. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kekurangan guru PNS membebani pihak sekolah yang harus mengangkat dan membiayai GTT. Terlebih jika sekolah tersebut sedikit jumlah muridnya.⁹ Dari hari ke hari, hal ini makin menjadi polemik terlebih dengan belum adanya tanda-tanda positif dukungan dana dari pemda untuk pembiayaan GTT. Selain itu, saat ini sudah berlaku kompetisi antarsekolah untuk menjaring murid baru.

Disparitas antarsekolah. Terkait dengan hal itu, isu lain yang muncul dari para pelaksana adalah disparitas antarsekolah. Disparitas yang dimaksud di sini adalah jumlah murid antarsekolah yang bisa sangat jauh berbeda. Sebagian besar orang lebih memilih untuk mendaftar ke sekolah-sekolah unggulan atau sekolah yang mudah dijangkau.

Salah seorang kepala sekolah yang kami temui mengungkapkan kekhawatirannya terhadap jumlah murid sekolah SMP-nya yang terus menurun dari tahun ke tahun: 126 murid pada 2013, 96 murid pada 2014, dan 76 murid pada 2015. Sekolah yang dikepalainya adalah sekolah satu atap (satap) yang berlokasi di tengah perdesaan. Beliau mengeluhkan bahwa mungkin murid-murid SD-nya bosan dan ingin mencoba sekolah baru. Saat ini banyak SMP lain yang lebih unggul dalam berbagai hal dan terletak di lokasi yang berdekatan dengan kota serta agresif melakukan promosi. Mereka bahkan memasang iklan selebaran di mading SD-SD, termasuk di mading sekolah beliau, untuk menjaring murid baru. Beliau mengungkapkan bahwa ia beberapa kali sengaja mencopot iklan dari sekolah lain, tetapi hal tersebut tak banyak membantu karena arus informasi sudah sangat terbuka dan murid-murid SD-nya tentu bebas untuk mendaftar ke mana saja.

Kesejahteraan guru kurang (terutama GTT). Hampir semua pelaksana mengeluhkan hal ini. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar karena setiap harinya mereka melihat langsung seperti apa kehidupan GTT dan bisa saja sebagian dari mereka, guru-guru yang diwawancarai selama penelitian ini, juga merupakan GTT. Untuk mendapat gambaran nyata mengenai tingkat kesejahteraan GTT, salah seorang kepala sekolah yang kami temui mengungkapkan bahwa gaji GTT di sekolahnya hanya sekitar Rp200.000 per bulannya. Gaji tersebut juga baru akan diterima oleh para guru setiap tiga bulan sekali, yaitu sekitar Rp600.000, ketika dana BOS sudah dicairkan. Besaran gaji yang bisa diberikan kepada GTT bergantung pada besaran dana BOS sekolah, jam mengajar guru, dan jumlah guru. Dengan adanya imbauan untuk tidak memungut iuran dari orang tua, sekolah hanya bisa mengandalkan dana BOS untuk membiayai GTT, padahal hanya sekitar 15% dari dana BOS yang bisa dialokasikan untuk membiayai GTT. Mengenai hal ini, salah seorang kepala sekolah menyampaikan keluhannya: *“Jika mengacu pada aturan BOS, hanya 15% yang bisa kami anggarkan untuk membayar honor GTT. Sementara dengan tuntutan kinerja dan mutu yang ada, hal ini menjadi tantangan bagi rekan-rekan guru [GTT].”*

Pada beberapa kasus, rendahnya gaji GTT membuat kepala sekolah menjadi kurang bisa mengatur kerja mereka. Seperti yang telah diceritakan, seorang kepala sekolah tidak bisa melarang para GTT di sekolahnya untuk mengajar di banyak tempat lain. Tak jarang, para GTT mengajar di tiga sampai empat sekolah yang berbeda. Selain untuk memperoleh lebih banyak penghasilan, alasan mengajar di banyak tempat juga dilakukan untuk memenuhi syarat jam mengajar minimal. Mengenai hal ini, para pelaksana mengatakan bahwa hal tersebut tidak terlalu bermasalah karena mereka tetap bisa datang. *“Kepala sekolah itu adalah amanah, ketika ada satu saja yang menjerit ... kesejahteraannya ... bagaimana? [Ini saya rasakan sejak] jadi kepala sekolah ... Mereka menerima 200 [ribu] per bulan, tiga bulan 600 [ribu], apa iya bisa makan dengan itu? Makanya, kalau ada teman minta izin*

⁹Walau di juknis BOS diatur bahwa jika jumlah murid sebuah sekolah di bawah 60 siswa, maka jumlah dana BOS yang diterima sekolah adalah minimum senilai alokasi dana BOS untuk 60 anak.

[tidak masuk] begitu ... saya paham betul. Hanya setelah jadi kepala sekolah ini baru tahu ... aduh ... gini rasanya jadi kepala sekolah ... jadi pemimpin" Hal yang agak berbeda justru diungkapkan oleh para murid yang mengatakan banyak guru-guru mereka sering tidak masuk karena berbagai alasan.

Kelompok Pendukung

Pada dasarnya, kelompok pendukung yang menjadi informan penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni (i) kelompok yang mendukung belajar murid secara langsung, yaitu orang tua dan komite sekolah; (ii) kelompok yang mendukung pendidikan masyarakat, yaitu kepala desa; dan (iii) kelompok yang mendukung sektor pendidikan di daerah, yaitu Dewan Pendidikan, PGRI, KKG, KBP, dan Radar Lombok.

Isu yang menjadi perhatian para pendukung, antara lain, adalah (i) kualitas dan kualifikasi guru kurang; (ii) dukungan orang tua kurang; (iii) jumlah guru PNS yang kurang dan distribusinya yang tidak merata; (iv) dukungan peningkatan kapasitas guru kurang; (v) dominasi politik dalam kebijakan pendidikan daerah; (vi) disparitas jumlah murid antarsekolah; (vii) sarana dan prasarana kurang; (viii) masalah terkait anak; (ix) komunikasi sekolah dan orang tua kurang; dan (x) ketersediaan, akses, dan keberlanjutan pendidikan kurang.

Kualitas guru kurang. Cara dan sikap guru dalam mengajar menjadi keluhan yang kerap diutarakan oleh para pemangku kepentingan yang berperan sebagai pendukung. Orang tua mengungkapkan keluhan mereka tentang cara mengajar guru yang hanya menyuruh anak menyalin dari buku. Menurutnya, hal ini tidak perlu karena hal itu sudah ada dan bisa dibaca dari buku. Waktu di kelas sebaiknya dipakai untuk menjelaskan pelajaran. Salah satu indikator belum tuntasnya pembelajaran murid di dalam kelas adalah banyaknya murid yang masih merasa membutuhkan pelajaran tambahan atau les. Orang tua juga mengeluhkan bahwa "guru jaman sekarang" hanya sebatas mengajar, tetapi tidak membimbing. "Guru jaman sekarang" tidak lagi mengajarkan murid untuk bersopan santun. Di kesempatan berbeda, informan dari PGRI menyampaikan kekecewaannya terhadap integritas sebagian guru. Menurutnya, banyak guru yang mengajar hanya sebatas untuk menggugurkan tanggung jawabnya. Mereka tidak berusaha untuk lebih kreatif dalam mengajar. Banyak guru yang bersifat kaku dan hanya ingin murid mengikutinya. Jika tidak mengikutinya, maka murid disalahkan. Integritas guru yang kurang pada akhirnya mempengaruhi kualitas mengajar guru. Salah satu indikator rendahnya kualitas guru yang disampaikan oleh PGRI adalah ketidakmampuan mereka dalam menulis ilmiah. Banyak guru yang sudah lama memegang jabatan, tetapi tidak bisa naik pangkat karena tidak memiliki tulisan ilmiah. Ke depannya, pengurus PGRI berencana untuk mengadakan pelatihan penulisan ilmiah untuk para guru tersebut. Hampir semua kelompok pendukung pendidikan sepakat bahwa kualitas guru yang rendah ini menjadi masalah mendesak yang harus segera diselesaikan.

Dukungan orang tua kurang. Terdapat dua sudut pandang berbeda mengenai hal ini. Dari sisi orang tua, mereka menyadari kekurangan mereka dalam membimbing anak di rumah. Selain sibuk mencari nafkah, orang tua merasa tidak mampu karena keterbatasan pengetahuan mereka. Seperti diungkapkan, mereka merasa bahwa "pelajaran jaman sekarang" sulit sekali dan jauh berbeda dengan pelajaran yang mereka dapatkan sewaktu mereka masih di bangku sekolah. Dari sisi pendukung lainnya, mereka melihat bahwa sebagian besar orang tua masih kurang memberikan perhatian. Orang tua dinilai terlalu sibuk bekerja dan belum sepenuhnya melihat bahwa pendidikan itu penting. Informan dari PGRI bahkan mengungkapkan bahwa "dukungan orang tua hanya sekedarnya saja"; dengan kata lain, hanya sebatas menyekolahkan anaknya tanpa memberi perhatian lebih, padahal anak-anak butuh perhatian dari orang tuanya, setidaknya butuh ditemani sewaktu belajar di rumah.

Jumlah dan distribusi guru PNS. Isu ini sama seperti yang diungkapkan oleh kelompok pemangku kepentingan lain. Kekurangan jumlah dan tidak meratanya distribusi guru PNS membuat sekolah harus merekrut GTT yang pembiayaannya mereka tanggung sendiri. Keluhan yang muncul dari kalangan pendukung adalah sedikitnya PNS yang mau ditugaskan ke daerah terpencil.

Dukungan peningkatan kapasitas guru kurang. Sama seperti yang telah diutarakan kelompok pemangku kepentingan lainnya, hal ini secara spesifik menyangkut isu kurangnya kesempatan pelatihan untuk para guru. Selain itu, para pendukung sektor pendidikan melihat bahwa forum guru belum banyak dimanfaatkan sebagai kesempatan mereka untuk berbagi pengalaman dan memikirkan solusi pengajaran bersama. Salah seorang anggota KKG yang kami temui mengungkapkan bahwa sudah lama tidak ada acara ataupun pertemuan KKG. Keanggotaan KKG hanya sebatas status tanpa pernah ada kegiatan nyata. Dengan minimnya pelatihan dan tidak aktifnya KKG, maka satu-satunya kesempatan guru untuk bertukar pikiran adalah pada saat rapat di sekolah dengan guru lain dan kepala sekolah.

Dominasi politik dalam kebijakan pendidikan daerah. Keresahan yang sama dilontarkan oleh para pemangku kepentingan lainnya, yaitu bahwa dominasi politik terlihat jelas pada saat pimpinan daerah melaksanakan kebijakan rotasi/mutasi kepala sekolah secara besar-besaran. Kabarnya rotasi dan mutasi tersebut akan terus berlanjut ke tingkat guru dan pejabat struktural di tingkat kabupaten. Mengenai rencana rotasi para guru, sebagian orang tua ada yang khawatir jika guru-guru bagus di sekolah anaknya dirotasi ke sekolah lain.

Disparitas antarsekolah dalam hal jumlah murid. Nampaknya hal ini juga menjadi isu yang sering dilontarkan oleh para pemangku kepentingan, tak terkecuali oleh kelompok pendukung pendidikan seperti kepala desa. Salah seorang kepala desa yang kami temui mengungkapkan bahwa latar belakang membludaknya jumlah pendaftar ke salah satu SD yang ada di wilayahnya adalah karena sekolah tersebut merupakan sekolah unggulan dan memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler. Di kesempatan berbeda, kelompok orang tua murid yang kami temui mengungkapkan bahwa pertimbangan mereka dalam memilih sekolah anak adalah keinginan anak, jarak ke sekolah, kualitas sekolah, dan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Sebagian dari pendukung bahkan bercerita bahwa dulu mereka bersekolah di sekolah unggulan tersebut dan ingin anaknya juga bisa bersekolah di sana. Sekolah tersebut bisa dikatakan sebagai sekolah paling bagus yang ada di Lombok Utara. Pihak desa mengatakan bahwa mereka sudah berusaha memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak mendaftar semua ke satu sekolah dan bahwa sekolah lain juga tidak kalah kualitasnya. Namun, tetap saja keinginan masyarakat tidak bisa dibatasi.

Sarana dan prasarana kurang. Hal ini terutama disampaikan oleh orang tua dari sekolah yang jumlah muridnya banyak. Mereka menyampaikan bahwa ruangan di sekolah tidak sebanding dengan jumlah rombongan belajar. Hal lain yang juga diutarakan adalah jumlah buku yang kurang memadai. Pada banyak sekolah, rasio jumlah buku dan murid sangat tidak sebanding sehingga murid harus memakai buku secara bergantian atau menyalin dari buku yang ada.

Masalah terkait anak secara khusus disampaikan oleh para orang tua yang mengeluhkan anak-anak yang lebih suka bermain ketimbang belajar.

Komunikasi sekolah dan orang tua kurang. Para pemangku kepentingan dari kelompok pendukung menilai bahwa komunikasi sekolah dengan orang tua masih sangat kurang, padahal dibutuhkan komunikasi yang baik antara keduanya untuk mendukung pembelajaran anak. Pelibatan orang tua oleh sekolah sering kali hanya sebatas untuk mendukung penggalangan dana yang sebagian besar ditujukan untuk pembangunan fisik sekolah. Sebenarnya, ada mekanisme kunjungan ke rumah murid oleh para guru bimbingan konseling dan orang tua merasa terbantu dengan hal ini. Namun, kunjungan ke rumah murid tidak berjalan dengan baik di semua sekolah.

Ketersediaan, akses, dan keberlanjutan pendidikan kurang. Isu yang muncul adalah sulitnya transportasi murid ke sekolah. Beberapa orang tua terpaksa membelikan anaknya sepeda motor untuk bisa pergi ke sekolah (tingkat SMP). Para orang tua lain yang tidak mampu akan meminta anaknya untuk berjalan kaki atau menumpang kendaraan temannya. Transportasi umum seperti angkot cukup sulit didapatkan di daerah perdesaan. Isu lain yang juga muncul adalah masih kurangnya keberadaan sekolah lanjutan di wilayah terpencil sehingga sulit bagi mereka untuk melanjutkan sekolah, terutama ke tingkat menengah atas.

Kelompok Sasaran: Murid

Penggalan isu pada kelompok murid dilakukan berdasarkan pada pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Bagian ini akan menyajikan sudut pandang yang berbeda dengan membahas bagaimana layanan pendidikan yang merupakan hasil dari rangkaian kerja sistem pendidikan daerah yang melibatkan para pembuat kebijakan, pelaksana, dan pendukung pendidikan dirasakan oleh para murid melalui proses pembelajaran di sekolah.

Adapun isu yang menjadi perhatian sasaran, antara lain, adalah (i) cara dan sikap guru dalam mengajar; (ii) kesulitan individu murid menghadapi pelajaran tertentu (seperti Matematika); (iii) materi pelajaran; (iv) nilai; (v) manfaat pelajaran; dan (vi) kesukaan individu murid.

Sebagai gambaran awal, tabel di bawah menyajikan daftar mata pelajaran dan guru yang paling disukai dan paling tidak disukai oleh murid:

MATA PELAJARAN DAN GURU	
PALING DISUKAI	PALING TIDAK DISUKAI
IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)	Matematika
Penjas (Pendidikan Jasmani)	Mulok (Muatan Lokal ^a)
Matematika	Bahasa Indonesia
Agama Islam	SBK
Bahasa Inggris	PKN
Bahasa Indonesia	IPS
IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial)	IPA
TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Bahasa Inggris
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan)	
SBK (Seni Budaya dan Keterampilan)	

^aBiasanya berupa pelajaran Bahasa Daerah, Sejarah Daerah, dan Kesenian Daerah.

Secara umum, hampir semua pelajaran yang disukai juga merupakan pelajaran yang paling tidak disukai. Hal ini karena beragamnya pandangan setiap murid yang ikut menjadi peserta tiap wawancara kelompok yang kami lakukan. Pada akhirnya, penjumlahan dan ringkasan pemetaan yang kami lakukan memperlihatkan bahwa hampir semua pelajaran yang disukai juga merupakan yang paling tidak disukai.

Mengenai pelajaran yang paling disukai, pemetaan yang kami lakukan memperlihatkan bahwa yang paling banyak muncul adalah IPA, diikuti dengan Penjas, Matematika, Agama Islam, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPS, TIK, PKN, dan SBK. Selain itu, terdapat perbedaan preferensi antara murid SD dan SMP. Di antara pelajaran-pelajaran yang paling disukai murid-murid, pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA paling banyak disukai oleh murid tingkat SD, sementara pelajaran TIK paling banyak disukai

oleh murid tingkat SMP. Hal ini cukup wajar karena pelajaran TIK baru akan didapatkan murid di tingkat SMP, dan banyak di antara murid-murid tersebut yang merasa antusias dengan pelajaran ini mengingat manfaatnya di masyarakat yang makin mengandalkan teknologi informatika.

Matematika merupakan pelajaran paling tidak disukai di hampir semua sekolah sampel dan hampir semua kelompok murid, kemudian diikuti oleh Mulok, Bahasa Indonesia, SBK, PKN, IPS, IPA, dan Bahasa Inggris. Isu mengenai pelajaran yang tidak disukai paling banyak dikemukakan oleh murid-murid dari dua sekolah dari total empat sekolah sampel penelitian. Kedua sekolah tersebut merupakan SD dan SMP yang berlokasi di wilayah perdesaan. SD tersebut merupakan sekolah unggulan dan SMP tersebut merupakan sekolah satap. Faktor yang menjadi alasan ketaksukaan murid adalah cara dan sikap guru dalam mengajar.

Corak ketakpuasan murid terhadap cara dan sikap guru tertentu dalam mengajar juga terlihat pada pelajaran tertentu di sekolah tertentu. Seperti pelajaran mulok yang tidak disukai hanya di dua sekolah saja, yakni sekolah sampel SD di daerah perdesaan yang merupakan sekolah unggulan dan sekolah sampel SMP di daerah perkotaan yang juga merupakan sekolah unggulan. Pelajaran lainnya adalah Bahasa Indonesia dan PKN yang banyak tidak disukai oleh murid di sekolah sampel SMP yang berlokasi di perdesaan.

ALASAN MURID MENYUKAI MATA PELAJARAN DAN GURU	
Cara guru mengajar	Guru sering menjelaskan
	Guru menyuruh menghafal
	Penjelasan guru mudah dimengerti
	Banyak hafalan
	Guru sering memberikan PR
Materi pelajaran	Materinya menarik; banyak pantun dan pengetahuan/cerita yang diselipkan
	Pelajarannya mudah
	Sambil bermain/berkreasi
Sikap guru	Gurunya tegas
	Sikap guru membuat nyaman
Manfaatnya	Agar badan menjadi sehat (penjas)
	Mendekatkan diri pada Tuhan (Agama)
	Bisa mengerti teknologi
	Bermanfaat
Kesukaan individu anak	Suka komputer
	Memang suka Matematika/senang berhitung
	Suka olah raga
Nilai	Nilainya bagus

ALASAN MURID TIDAK MENYUKAI MATA PELAJARAN DAN GURU	
Cara guru mengajar	Guru jarang/sama sekali tidak menjelaskan
	Guru hanya memberi tugas/tugas dari guru terlalu banyak
	Guru hanya menyuruh murid mencatat
	Cara penyampaian guru dalam mengajar tidak disukai
	Sering disuruh menghafal oleh guru
	PR dianggap memberatkan
Kesulitan individu murid	Tidak suka berhitung/perkalian

	Merasa kesulitan
	Merasa kesulitan dalam menggambar
Materi pelajaran	Materi yang dipelajari tidak keluar saat ujian
	Materi tidak menarik
Nilai	Nilai rendah
Sikap guru	Guru suka menghukum

Banyak alasan atas kesukaan dan ketaksukaan murid terhadap pelajaran tertentu. Alasan utama murid menyukai pelajaran adalah karena cara mengajar gurunya. Murid menyukai guru yang cara mengajarnya mudah dimengerti, sering memberi penjelasan, sering menyuruh anak melakukan hafalan, dan yang sering memberikan PR. Sikap guru yang tegas dan bisa membuat murid nyaman juga menjadi pendorong murid menyukai pelajaran. Sebaliknya, cara mengajar dan sikap guru juga bisa membuat murid tidak menyukai pelajaran dan/atau guru tertentu. Seperti diungkapkan oleh murid, mereka tidak suka dengan guru atau pelajaran yang gurunya jarang atau sama sekali tidak menjelaskan, memberi tugas dan PR terlalu banyak dan memberatkan, terlalu sering menyuruh menghafal, terus menyuruh murid mencatat, cara mengajarnya sulit dipahami, dan suka memberi hukuman pada murid.

Selain faktor guru, murid juga menyukai pelajaran yang materinya mudah dan menarik sehingga mereka bisa mendapat nilai bagus. Hal lain yang mendorong murid menyukai pelajaran tertentu adalah kesukaan pribadi murid pada hal tertentu yang terkait dengan pelajaran, seperti murid yang suka bermain bola akan menyukai pelajaran penjas, serta kesadaran murid akan manfaat dari pelajaran dimaksud, seperti manfaat matematika untuk berdagang dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Sebaliknya, murid menjadi tidak suka dengan pelajaran jika nilai yang didapatnya rendah atau materinya sendiri dianggap tidak menarik. Selain itu, ada alasan ketaksukaan terhadap pelajaran tertentu karena ketidakmampuan murid menguasai pelajaran.

Ketika kemampuan literasi dan numerasi (calistung: baca, tulis, hitung) dikaitkan erat dengan pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, dan bahkan sebagian besar kemampuan tersebut dilatih, sangat disayangkan jika kedua pelajaran tersebut termasuk pelajaran yang paling tidak disukai oleh anak.

Anak menjadi terhambat belajar calistungnya karena tidak menyukai cara mengajar guru kedua mata pelajaran tersebut. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia, dari sejumlah murid yang menjadi sampel penelitian ini, hanya sebagian kecil tidak menyukainya, sementara ada banyak murid yang mengatakan suka dengan mata pelajaran ini karena bisa belajar berpuisi, menulis surat, dan sebagainya. Sementara itu, untuk Matematika, sebagian besar murid di tingkat SD dan SMP menganggapnya sebagai mata pelajaran yang paling sulit sehingga sulit juga bagi mereka untuk menyukainya. Berbagai hal menjadi alasannya, mulai dari ketaksukaan mereka terhadap berhitung, merasa tidak mampu berpikir, hingga guru yang tidak bisa mengajar Matematika dengan menarik. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, cara mengajar guru menjadi yang paling sering dilontarkan oleh murid sebagai penyebab ketaksukaan mereka terhadap suatu mata pelajaran. Demikian pula halnya dengan sikap guru. Pada berbagai kesempatan, murid-murid melontarkan ketaknyamanannya terhadap sebagian guru yang cara mengajar dan sikapnya yang membuat murid sulit mengerti dan membuat kelas tegang. Sebagian kecil murid bahkan mengungkapkan masih ada guru yang memberi hukuman fisik kepada murid yang tidak mengerjakan tugas seperti disuruh berlari, dijewer, dan dijemur. Di hampir semua sekolah sampel, kehadiran kurikulum baru yang mendorong siswa aktif belum bisa mendorong guru untuk memperbaiki metode mengajarnya. Keterbatasan buku paket kurikulum baru di hampir semua sekolah menjadi alasan guru menghabiskan jam pelajaran di kelas untuk murid menyalin dari buku paket yang tersedia.

LAMPIRAN 2

Metode Komunikasi

Bahasan mengenai metode komunikasi utamanya berasal dari asesmen yang dilakukan selama penelitian ini dalam hal “komunikasi antarpemangku kepentingan untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid” yang antara lain melihat cara para pemangku kepentingan mengomunikasikan masalah dan pemecahannya, informasi yang diperlukan, dan keberadaan forum dialog untuk mendukung pemecahan masalah.

Gambaran umum

Terlihat jelas bahwa pemanfaatan media komunikasi modern makin meluas, setidaknya di antara para pemangku kepentingan yang kami lihat dalam studi ini. Salah satunya terlihat dari meluasnya kepemilikan telepon genggam dan laptop. Keberadaan alat dan jaringan komunikasi modern dirasakan membantu menunjang tugas para pemangku kepentingan. Jika di masa lalu pemberitahuan rapat atau pertemuan hanya bisa mengandalkan surat dinas dan surat undangan yang diantar langsung, saat ini selain diantar langsung surat-surat tersebut juga dipindai dan dikirim melalui surel. Tak hanya itu, pemberitahuan tentang undangan juga disampaikan secara lebih cepat dengan pemberitahuan melalui telepon atau SMS. Di tempat-tempat yang terjangkau jaringan internet, seperti perkotaan, pengiriman pesan juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pesan instan tak berbayar seperti WhatsApp yang kini penggunaannya makin meluas. Dengan aplikasi WhatsApp, tak hanya pesan yang bisa dikirim, tetapi juga gambar dan suara. Selain itu, beberapa pemangku kepentingan yang kami temui sudah bisa memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, dalam menyebarkan pesan. Terlepas dari polemik seputar dampak negatifnya, pemanfaatan internet juga terlihat meluas di kalangan murid dan guru untuk mencari referensi mengajar dan belajar, misalnya dengan menggunakan mesin pencari seperti Google yang biasa disebut “Mbah Google”.¹⁰

Dari hal-hal yang kami temukan selama penelitian ini, terdapat beberapa catatan yang menggambarkan corak pemanfaatan media komunikasi di antara para pemangku kepentingan, yakni:

- a) terdapat perbedaan preferensi metode komunikasi antarpemangku kepentingan, tergantung pada kenyamanan dan penguasaan mereka atas teknologi;
- b) lokasi dan keterjangkauan jaringan komunikasi menjadi faktor penting yang memengaruhi pilihan komunikasi;
- c) media komunikasi konvensional masih dipakai untuk penggunaan formal kedinasan dan keberadaannya tidak dapat digantikan dengan media komunikasi modern;
- d) perkembangan teknologi komunikasi mendukung berkembangnya pemanfaatan *group-based communication*¹¹, seperti WhatsApp, yang juga dimanfaatkan untuk penggunaan resmi (kedinasan); dan
- e) secara umum, masih terdapat kekhawatiran besar di kalangan orang tua (dan juga guru) terhadap pemanfaatan media komunikasi modern oleh murid sekolah.

¹⁰Istilah “Mbah Google” muncul pada beberapa kesempatan wawancara untuk menggambarkan betapa mesin pencari Google kini menjadi andalan banyak orang dalam mencari informasi dan referensi.

¹¹Istilah *group-based communication* (komunikasi berbasis kelompok) penulis pakai berdasarkan penggunaan istilah tersebut dalam Seufert *et al.*, 2016.

Selanjutnya, bahasan mengenai metode komunikasi akan dilakukan berdasarkan kelompok pemangku kepentingan. Adapun pengelompokan pemangku kepentingan didasarkan pada perannya masing-masing terhadap sektor pendidikan di Lombok Utara, yakni:

- a) kelompok pembuat kebijakan: Dinas Dikpora, Bappeda, DPRD, dan Asda III;
- b) kelompok pelaksana: guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan UPTD;
- c) kelompok pendukung: orang tua, komite sekolah, Dewan Pendidikan, PGRI, KKG, ornop lokal (KBP), media lokal (Radar Lombok), dan kepala desa; dan
- d) kelompok sasaran: murid SD dan murid SMP.

Pembuat kebijakan

Komunikasi yang terkait dengan kedinasan, Dinas Dikpora, Bappeda, DPRD, Asda III, dan seluruh jajaran SKPD lainnya memakai metode konvensional seperti surat resmi (surat dinas) yang dilengkapi dengan kop surat dan cap dinas, dan rapat/pertemuan/forum formal. Surat resmi digunakan untuk menyampaikan undangan rapat/pertemuan/forum terkait kedinasan guna menyebarkan informasi (pengumuman) dan juga sebagai pengantar bagi peraturan/kebijakan dari pemerintah (pusat dan daerah). Pada perkembangannya, pengiriman surat juga dilakukan melalui surel (dengan melampirkan surat asli yang dipindai), tetapi hal itu dilakukan hanya untuk memastikan agar informasi diterima tepat waktu. Pengiriman surat resmi tetap dilakukan untuk disimpan sebagai arsip dan bukti.

Pertemuan formal/rapat kedinasan dilakukan sesuai tupoksi masing-masing dan bisa saja dilakukan secara lintas bidang dengan mengundang SKPD lain yang terkait. Rapat-rapat yang sifatnya koordinatif dan terkait dengan perencanaan pembangunan biasanya dilakukan dengan Bappeda sebagai tuan rumahnya. Untuk perencanaan program dan kebijakan pendidikan, Bappeda akan memfasilitasi pertemuan dengan Dinas Dikpora dan DPRD secara bertahap. Pertama-tama, Bappeda dan Dinas Dikpora bertemu untuk membahas usulan program dari Dinas Dikpora. Usulan yang sudah matang kemudian dibahas bersama di DPRD untuk mencapai kesepakatan mengenai perencanaan program dan anggaran yang mengikutinya. Pembahasan di DPRD tersebut tidak hanya untuk sektor pendidikan, tetapi juga sektor-sektor lain. Selain rapat-rapat dinas, pertemuan formal yang secara rutin diadakan di Lombok Utara adalah rapat koordinasi SKPD dan Forum Gendurasa. Rapat koordinasi SKPD merupakan pertemuan rutin bulanan yang dipimpin oleh bupati dan melibatkan semua SKPD. Forum Gendurasa merupakan pertemuan besar yang tak hanya melibatkan seluruh SKPD, tetapi juga elemen-elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai tokoh budaya untuk membahas pembangunan daerah. Gendurasa diadakan setahun sekali. Oleh Sekretaris Bappeda, Gendurasa disebut sebagai bentuk inovasi perencanaan yang diinisiasi oleh Lombok Utara.

Gendurasa bukan satu-satunya forum resmi yang mengakomodasi kontribusi masyarakat luas. Ada juga mekanisme dengar pendapat yang selama ini menjadi cara penting yang digunakan oleh DPRD untuk menjaring aspirasi dari rakyat dan juga pemda. Rapat dengar pendapat dilakukan di gedung DPRD yang waktunya bisa kapan saja jika ada hal mendesak untuk diselesaikan.

Pada saat kunjungan penelitian, tim peneliti melihat langsung bagaimana DPRD memfasilitasi guru-guru yang tergabung dalam forum GTT yang menuntut peningkatan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah daerah. Pada waktu itu, dengar pendapat dilakukan oleh Komisi III DPRD Lombok Utara (berdasarkan observasi tim peneliti dan wawancara dengan salah seorang anggota Komisi III DPRD).

Selain jalur resmi, para pemangku kepentingan yang berperan sebagai pembuat kebijakan juga memanfaatkan jalur komunikasi informal (nondinas/individu) untuk mendukung kerjanya.

Komunikasi seperti ini lebih bersifat personal dan bisa dilakukan melalui tatap muka atau melalui media perantara seperti telepon, SMS, WhatsApp, dan media sosial.

Pada beberapa hal, komunikasi informal dilakukan sebagai bentuk lobi untuk menyukseskan kebijakan tertentu. Terkait dengan pendidikan, Sekretaris Bappeda mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjalin dengan Dinas Dikpora sering kali tidak berjalan lancar sehingga pada banyak kasus, Dinas Dikpora dinilai kurang bisa menerjemahkan visi-misi bupati menjadi kebijakan yang lebih operasional.

Bappeda memberi contoh visi bupati tentang “Kembali ke Khitah Pendidikan” yang hingga kini belum juga berhasil diterjemahkan menjadi program atau kebijakan nyata. Bappeda sendiri sudah memiliki beberapa pemikiran, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena Dinas Dikporalah yang memiliki tupoksi untuk melakukannya (berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Bappeda).

Metode komunikasi alternatif. Pada umumnya, para pemangku kepentingan yang berperan sebagai regulator berkedudukan di Kota Tanjung dan sekitarnya. Lokasi dan kapasitas sosial-ekonomi yang dimiliki relatif lebih baik sehingga memungkinkan mereka untuk mendapat akses komunikasi terbaik di daerah tersebut. Dengan hambatan akses komunikasi yang relatif minim, preferensi para regulator terhadap metode komunikasi (selain jalur komunikasi resmi yang telah diatur secara baku) sangat ditentukan oleh kenyamanan masing-masing individu dan penguasaan mereka atas teknologi.

Bagi Asda III, Sekretaris Bappeda, maupun anggota Komisi III DPRD yang kami temui, komunikasi menggunakan telepon menjadi pilihan paling praktis ketika pertemuan sulit untuk dilakukan. Selain itu, komunikasi melalui telepon bisa dilakukan kapan saja.

Sebagian pemangku kepentingan telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi, termasuk untuk mendukung forum-forum resmi. Tak jarang kami menemui adanya grup WhatsApp untuk beberapa forum resmi, seperti grup WhatsApp SKPD yang beranggotakan seluruh dinas dan lembaga daerah, pengawas sekolah, dan operator sekolah. Bupati Lombok Utara terkenal sebagai sosok muda yang tak segan-segan membuka forum komunikasi dengan berbagai pihak. Terdapat beberapa grup WhatsApp yang beliau ikuti dan menjadi sarana mendengar aspirasi (berdasarkan wawancara dengan salah seorang kepala desa).

Kehadiran media komunikasi alternatif yang memanfaatkan teknologi (seperti grup WhatsApp) sedikit banyak memberi kemudahan bagi para pembuat kebijakan di tingkat daerah. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk mendengar aspirasi dengan lebih tak terbatas sehingga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, meskipun ada sebagian dari mereka yang tidak memakainya karena merasa tidak menguasai teknologi atau merasa tidak nyaman dengan komunikasi yang terlalu terbuka tanpa jaminan keamanan.¹²

Pelaksana

Pemangku kepentingan yang berperan sebagai pelaksana pendidikan di daerah yang dimaksud dalam laporan ini di antaranya guru dan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan UPTD. Seperti halnya dengan para regulator, metode komunikasi yang digunakan oleh para pelaksana terdiri atas jalur formal dan tidak formal.

¹²Ketaknyamanan ini disampaikan oleh informan dari Dewan Pendidikan dan salah seorang pengawas sekolah yang hingga saat ini lebih memercayai metode komunikasi tertulis melalui surat.

Mekanisme komunikasi formal masih sebatas formalitas. Komunikasi formal dilakukan antara pihak sekolah, dan pengawas sekolah dan UPTD sesuai dengan tupoksi masing-masing. Secara kelembagaan, kepala sekolah harus berkomunikasi, melakukan koordinasi, dan melapor kepada pengawas sekolah dan UPTD, sementara pengawas sekolah melakukan supervisi terhadap sekolah (guru dan kepala sekolah) yang berada dalam wilayah kerjanya. Pada akhirnya, kerja para pengawas dan kepala sekolah akan dikoordinasi dan diawasi oleh UPTD sebagai kepanjangan tangan Dinas Dikpora. Komunikasi di antara ketiga pihak tersebut dilakukan melalui mekanisme laporan yang meliputi laporan kepala sekolah, laporan pengawas sekolah, dan laporan UPTD yang kemudian diserahkan kepada Dinas Dikpora. Sejauh pengamatan kami, terlihat bahwa komunikasi antara ketiganya berjalan sebatas formalitas saja. Beberapa keluhan yang kami dengar adalah bahwa laporan dari UPTD dan pengawas sekolah jarang menjadi pertimbangan Dinas Dikpora dalam merumuskan kebijakan. Pada beberapa kasus bahkan ditemukan laporan yang hanya menyontek dari laporan sebelumnya.¹³

Komunikasi tidak berjalan sesuai mekanisme karena tidak ada anggaran. Kepala sekolah sering kali berkomunikasi langsung dengan Dinas Dikpora. Hal ini terjadi karena UPTD tidak memiliki anggaran yang memadai untuk bisa lebih memiliki wewenang. Komunikasi langsung antara kepala sekolah dan Dinas Dikpora utamanya berkaitan dengan anggaran dan pencairan dana BOS. Untuk hal ini, UPTD sama sekali tidak pernah dilibatkan. UPTD bahkan tidak tahu anggaran dan pemakaian dana BOS yang diterima oleh sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah kerjanya.

Bagi sekolah, komunikasi langsung dengan Dinas Dikpora untuk membahas BOS kerap dirasa “menghabiskan energi” karena untuk itu mereka harus mengutus salah seorang atau beberapa guru yang bertugas mengelola dana BOS di sekolahnya. Pertemuan dengan Dinas Dikpora tidaklah selesai dalam sehari. Mereka kerap harus bolak-balik untuk melengkapi persyaratan administratifnya. Ketika mengurus BOS, guru harus meninggalkan kelasnya dan tidak bisa mengajar. Oleh guru hal ini dikeluhkan telah mengganggu kegiatan mengajar mereka (berdasarkan wawancara dengan beberapa kepala sekolah dan guru).

Forum komunikasi guru tidak berjalan. Untuk para guru, idealnya ada forum komunikasi antarguru seperti KKG atau MGMP. Namun, pada kenyataannya KKG di Lombok Utara tidak terlalu aktif. Demikian pula halnya dengan MGMP yang tidak semuanya aktif. Dulu, MGMP untuk beberapa mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional cukup aktif, tetapi sekarang beberapa di antaranya tidak lagi berlanjut. MGMP tersebut aktif berkat dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari salah satu bank nasional. Dari sini juga kami melihat bahwa inisiatif untuk mengaktifkan forum guru relatif rendah dibanding dengan daerah lain, seperti Sumbawa di mana sudah ada beberapa MGMP yang aktif dengan mengandalkan kontribusi guru-guru yang menyisihkan sebagian uang transportasi yang mereka dapat dari BOS untuk operasional kegiatan MGMP. Ketakaktifan forum guru membuat tidak tersedianya wadah bagi para guru untuk berbagi pengalaman dalam mengajar dan memikirkan bersama solusinya dengan guru-guru dari sekolah lain. Keluhan lainnya adalah bahwa di MGMP yang masih aktif, guru-guru dari satap (sekolah satu atap) merasa tidak lagi dilibatkan.

Untuk mengomunikasikan hal-hal terkait pembelajaran, guru hanya bisa mengandalkan rapat/pertemuan dengan kepala sekolah atau guru-guru lain di dalam sekolah. Selain itu, juga ada supervisi dari pengawas sekolah. Namun, terdapat cukup banyak keluhan terkait jarang nya kehadiran para pengawas sekolah. Dari sisi pengawas sekolah, mereka merasa bahwa laporan hasil pengawasannya tidak terlalu dipakai oleh Dinas Dikpora dalam perumusan kebijakan.

¹³Keluhan ini berasal dari UPT dan pengawas sekolah, dan sempat dibahas pada saat FGD.

Kendala waktu. Hal yang dirasa sebagai kendala dalam komunikasi para pelaksana adalah keterbatasan waktu. Guru berharap agar komunikasi bisa dilakukan di luar jam sekolah. Namun, waktu mereka di luar jam sekolah cukup terbatas karena harus mengajar di tempat lain atau karena jarak rumah-sekolah yang cukup jauh (sehingga harus pulang tepat waktu). Pelaksana pendidikan lain, seperti pengawas sekolah, biasanya datang pada jam sekolah. Kepala sekolah juga lebih memilih komunikasi pada jam sekolah (jam kerjanya). Salah seorang kepala sekolah yang kami temui bahkan berterus terang bahwa dirinya dan beberapa guru di sekolahnya masih harus bekerja menjadi petani dan nelayan selepas jam sekolah. Demikian pula halnya dengan UPTD yang jam operasionalnya adalah jam kantor. Dengan kondisi seperti ini, tentu kegiatan komunikasi yang melibatkan guru dan dilakukan pada jam sekolah akan mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Pendukung

Pendukung utama pendidikan adalah orang tua. Sebagian besar pemangku kepentingan yang kami temui percaya bahwa orang tua memegang peranan penting karena sebagian besar waktu anak berada di rumah, sementara di sekolah hanya sedikit—hanya sebatas jam sekolah saja. Melihat kondisi pendidikan Lombok Utara yang masih cukup tertinggal, berbagai pihak melihat bahwa salah satunya karena masih sangat minimnya keterlibatan orang tua.

Komunikasi antara sekolah dan orang tua yang masih kurang. Di hampir semua sekolah yang kami kunjungi, rapat antara orang tua murid dan sekolah hanya dijadwalkan setahun sekali. Pada beberapa kasus, sekolah bisa mengundang orang tua atau orang tua bisa datang ke sekolah sewaktu-waktu ketika ada hal mendesak untuk dibicarakan. Namun, untuk hal ini orang tua lebih sering diwakili oleh komite sekolah. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami ketertinggalan dalam belajar di sekolah atau menghadapi masalah tertentu, ada mekanisme kunjungan ke rumah murid, tetapi hal ini tidak berjalan secara aktif di semua tempat, padahal di beberapa sekolah yang kegiatan kunjungan rumahnya berjalan, orang tua merasakan betapa besar manfaatnya.¹⁴ Dengan demikian, mereka tahu seperti apa permasalahan yang dihadapi oleh anaknya di sekolah.

Kebuntuan komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah agaknya dapat dilihat pada banyaknya keluhan orang tua bahwa mereka “kurang dilibatkan oleh pihak sekolah”, sementara pihak sekolah menyampaikan keluhan “orang tua kurang peduli atau menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah”.

Komite sekolah seharusnya menjadi jembatan antara sekolah dan orang tua. Pada banyak kasus, keberadaan komite sekolah lebih banyak dimanfaatkan untuk penggalangan dana dari orang tua yang digunakan untuk pembangunan sekolah yang sebagian besar berorientasi fisik. Selain menggalang dana dari orang tua, komite-komite sekolah yang kami temui melakukan kerja sama dengan dan mencari dana dari pihak lain selain orang tua, seperti dari perusahaan. Ada beberapa sekolah yang menerapkan penentuan komite sekolah berdasarkan letak geografis tempat tinggal murid sehingga memudahkan orang tua untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui komite sekolah. Namun, hal ini tidak berlaku di semua tempat. Di beberapa sekolah lain tampak bahwa komunikasi antara orang tua dan komite sekolah tidak berjalan maksimal. Di banyak kasus, komite sekolah dipilih dari orang tua murid yang dianggap berada atau dari tokoh masyarakat yang kebanyakan merupakan orang sibuk sehingga sulit untuk ditemui. Hal ini diperparah dengan adanya

¹⁴Kelompok orang tua di Sukadana menyampaikan bahwa kunjungan guru bimbingan konseling ke rumah mereka membuat mereka menjadi lebih paham bahwa anaknya sedang mengalami masalah di sekolah. Dengan demikian, mereka tahu apa yang bisa dilakukan di rumah sebagai orang tua. Terkait dengan hal ini, guru bimbingan konseling yang datang berkunjung juga memberitahukan beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua (berdasarkan wawancara dengan kelompok orang tua di salah satu SD).

keluhan dari komite sekolah yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa sebenarnya tupoksi yang mereka emban.

Secara kelembagaan, pembinaan komite sekolah bisa dilakukan oleh Dewan Pendidikan, tetapi belum ada mekanisme komunikasi resmi antara Dewan Pendidikan dan komite sekolah. Dewan Pendidikan secara berkala juga melakukan pembinaan-pembinaan ke sekolah-sekolah. Namun, hal tersebut tidak bisa dilakukan di semua sekolah karena keterbatasan wewenang dan anggaran yang dimilikinya. Untuk menyiasatinya, kunjungan Dewan Pendidikan ke sekolah-sekolah dilakukan secara terbatas dan dengan bergiliran. Sayangnya, upaya yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan tidak sepenuhnya diketahui baik oleh para pembuat kebijakan daerah maupun pelaksana pendidikan. Mereka bahkan secara nyata mengatakan bahwa Dewan Pendidikan kurang berperan. Belum ada mekanisme komunikasi resmi antara Dewan Pendidikan dan para pembuat kebijakan, pelaksana pendidikan, dan juga masyarakat (termasuk komite sekolah, orang tua, dan murid). Komunikasi yang selama ini dijalin hanya bersifat individu dan personal saja, yang lingkungannya sangat terbatas. Sifat dari pembinaan yang dilakukan selama ini hanya sebatas saran dan anjuran saja.

Pemangku kepentingan lain yang bekerja dan berfokus pada pendidikan adalah PGRI, KKG, dan KBP. **Di antara mereka, yang secara nyata melakukan terobosan mendukung pendidikan dan pembelajaran murid di Lombok Utara adalah KBP.** Saat ini, KBP telah memiliki 21 cabang yang tersebar di seluruh Lombok Utara dan menyediakan wadah belajar untuk perempuan dan anak. KBP bahkan telah melakukan kerja sama dengan beberapa sekolah untuk menyelenggarakan taman bacaan. Sebagai ornop, KBP banyak memanfaatkan cara komunikasi melalui media sosial sehingga bisa dengan cepat menyebarkan pesan yang ingin disampaikan. KBP juga memanfaatkan jejaring pengurusnya dengan pihak-pihak di pemerintahan dan juga dunia usaha. Komunikasi dengan KBP bisa dilakukan kapan saja karena sikap terbuka dari pengurusnya, selain karena berbagai media komunikasi telah dimanfaatkannya juga. Berbeda dengan KBP yang berkembang pesat, keberadaan PGRI dan juga KKG sebagai forum komunikasi guru nampak jalan di tempat atau bahkan mati suri. Ada keluhan bahwa PGRI di suatu wilayah ada yang mati suri karena kondisi politik lokal meresahkan guru yang sewaktu-waktu bisa dimutasi tanpa alasan jelas. PGRI sempat memiliki laman Facebook dan situs web, tetapi kemudian ditutup karena menjadi ajang caci maki orang-orang yang berseberangan secara politik.

Media lokal dan kepala desa tidak secara khusus bekerja di sektor pendidikan, tetapi dukungan mereka cukup dirasakan. Media lokal oleh beberapa pihak dijadikan sebagai wadah untuk menyuarkan kritikan terhadap pemerintah. Beberapa pihak bahkan secara sengaja menghubungi media lokal untuk menyampaikan suara mereka. Terhadap hal ini wartawan terkait tetap akan menampungnya, tetapi akan mengonfirmasi informasi yang didapat tersebut kepada sumber-sumber lain sebelum ditulis menjadi berita/artikel. Beberapa media lokal besar di NTB menempatkan perwakilan mereka di berbagai daerah di NTB. Para wartawan tersebut bisa dengan mudah dihubungi oleh siapa saja dan kapan saja melalui telepon genggam (telepon, SMS, WhatsApp) atau melalui surel. Dukungan dari kepala desa yang paling dirasakan adalah ketika pengurusan surat-surat untuk keperluan administrasi sekolah (termasuk untuk mengakses bantuan beasiswa). Desa juga merupakan satuan pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Komunikasi antara masyarakat dan desa lebih banyak terjalin secara informal melalui tatap muka langsung atau pun melalui telepon genggam jika tidak bisa bertemu langsung. Sementara itu, komunikasi pihak desa dengan pemerintahan di atasnya dilakukan melalui mekanisme formal. Namun, ada sebagian kepala desa yang telah memanfaatkan teknologi informasi, seperti mereka yang tergabung dalam forum kepala desa dan SKPD.

Sasaran

Untuk kalangan murid SD, kami masih melihat adanya perbedaan antara yang tinggal di daerah perkotaan dan yang tinggal di daerah perdesaan. Murid SD yang tinggal di daerah perkotaan sudah banyak memanfaatkan internet untuk mencari bahan pelajaran. Selain menggunakan telepon genggam, murid-murid di kota yang berasal dari golongan menengah atas menggunakan laptop milik orang tua mereka. Kondisi yang berbeda dialami oleh murid-murid SD di perdesaan yang belum banyak memanfaatkan internet karena keterbatasan kepemilikan telepon genggam dan sinyal komunikasi.

Baik di perkotaan maupun perdesaan sudah ada cukup banyak murid SMP yang bisa memanfaatkan internet untuk mencari bahan pelajaran (“Mbah Google”). Terlepas dari kondisi sinyal komunikasi yang terbatas, anak-anak SMP di daerah perdesaan sudah bisa memakai telepon genggam untuk mengakses internet. Selain untuk mengakses internet, telepon genggam digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan teman, apalagi teman-teman mereka di perkotaan yang kepemilikan telepon genggam sudah lebih meluas.

Pemanfaatan telepon genggam dan akses terhadap internet oleh murid bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, hal tersebut membantu murid untuk mencari referensi sumber belajar dan untuk membantu mereka mengerjakan tugas. Namun, terdapat banyak orang tua dan guru yang masih melihat sisi negatif dari penggunaan internet. Mereka mengkhawatirkan penggunaan internet untuk mengakses situs-situs berbahaya oleh murid. Salah satu sekolah yang kami kunjungi bahkan menerapkan larangan murid membawa telepon genggam.

LAMPIRAN 3

Tabel A1. Daftar Mitra Potensial di Daerah

Dinas Dikpora	Sekretaris Dinas/Dikpora
Bappeda	Kepala Bappeda
Asda/Setda	-
DPRD	Anggota Komisi III
PGRI/PGI	Ketua/PGRI
MGMP/MGK/KKG	Koordinator MGMP Matematika/ Kepala SMP 2 Gangga
Ornop	Koordinator/Klub Baca Perempuan
Media lokal	Radar Lombok
Dewan Pendidikan	Ketua/Dewan Pendidikan
UPTD Disdik Kecamatan Tanjung	Kepala UPTDD
UPTD Disdik Kecamatan Bayan	Kepala UPTDD
Kepala Sekolah SMPN 3 Tanjung	Penggagas “Kembali ke Khitah Pendidikan”
Ketua Pondok Pesantren Nurul Bayan	Sekolah yang telah berhasil melaksanakan “Kembali ke Khitah Pendidikan” -> salah satu pesantren unggulan

LAMPIRAN 4

Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Potensi Kontribusi	Kemauan	Pengaruh Akibat	Perlunya Terlibat
Regulator				
Dinas Dikpora	Tinggi: Sebagai SKPD yang menangani masalah pendidikan, Dinas Dikpora Mengajukan, menentukan, menjalankan program dan anggaran pendidikan di daerah.	Tinggi: - Alokasi anggaran sebesar 20% dari total APBD untuk pendidikan di Lombok Utara menjadi salah satu indikator adanya keberpihakan anggaran untuk pendidikan. - Pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan seperti sekolah dan pengadaan sarana dan prasarana	Tinggi: Dinas Dikpora saat ini sedang menyelenggarakan program pembenahan SPM pendidikan sebagai salah satu upaya untuk membangun sistem data dan mekanisme untuk peningkatan mutu/kualitas pelayanan pendidikan.	Tinggi: Sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengimplementasikan kebijakan daerah untuk pendidikan, diperlukan dukungan dan perintah dari kepala daerah yang bervisi memajukan pendidikan. Begitu juga dengan pelaporan, koordinasi, program dan anggaran dari Dinas Dikpora ke Bupati dalam hal capaian program kebijakan
Bappeda	Tinggi: Bappeda melakukan perencanaan daerah dan bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan perencanaan sektoral (termasuk dengan Dinas Dikpora). Selain itu, Bappeda memiliki SDM yang memadai untuk memahami situasi dan kebutuhan daerah.	Tinggi: Sekretaris Bappeda memiliki latar belakang di bidang pendidikan dan dalam setiap kesempatan selalu mengkritisi perkembangan sektor pendidikan Lombok Utara yang masih kurang	Tinggi: Bappeda merupakan penentu perencanaan pembangunan daerah	Tinggi: Bappeda “membimbing” Dinas Dikpora agar lebih baik dalam melakukan perencanaan program/kebijakan terkait pendidikan daerah
Asda	Tinggi: Memiliki wewenang dalam administrasi kepegawaian tenaga pendidik	Tinggi: Ikut terlibat dalam menginisiasi kerja sama beasiswa dengan LPDP	Sedang: Keputusan tertinggi tetap berada pada pimpinan daerah. Pengaruh Asda hanya sebatas tupoksinya saja, dan tidak fokus pada sektor pendidikan	Tinggi: Memiliki wewenang dalam administrasi kepegawaian tenaga pendidik

Pemangku Kepentingan	Potensi Kontribusi	Kemauan	Pengaruh Akibat	Perlunya Terlibat
DPRD	Tinggi: DPRD memegang wewenang dalam perencanaan anggaran daerah	Tinggi: Informan yang kami temui memiliki ketertarikan besar pada sektor pendidikan dan sering menjadi tempat bertanya jika ada tamu dari luar daerah yang ingin berdiskusi tentang pendidikan di Kabupaten Lombok Utara	Tinggi: DPRD memiliki wewenang dalam anggaran dan posisi tawar politiknya kuat	Tinggi: Siapa pun yang ada dalam posisi ini penting untuk dilibatkan
Pelaksana				
Guru	Tinggi: Gurulah yang paling berperan dalam meningkatkan pembelajaran karena kualitas pembelajaran utamanya ditentukan oleh kualitas guru. Peran mereka sangat penting dalam memastikan kualitas pembelajaran.	Sedang: Sebagian guru sudah menjalankan perannya dengan maksimal dalam peningkatan pembelajaran. Namun, masih banyak juga guru yang dalam menjalankan perannya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Masih banyak guru yang kapasitas dan kompetensinya rendah, serta kurang disiplin.	Tinggi: Seluruh proses pembelajaran berpusat pada guru sehingga bisa dikatakan bahwa rendah atau tingginya kualitas pembelajaran adalah tergantung mereka.	Tinggi: Sangat penting untuk melibatkan guru dalam peningkatan pembelajaran karena kondisi pembelajaran berada di tangan mereka. Kualitas guru-guru juga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal metode mengajar
Kepala sekolah	Tinggi: Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur manajemen sekolah. Hal tersebut berpotensi digunakan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang baik.	Tinggi: Kepala sekolah memiliki keinginan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolahnya. Sebagai kepala sekolah baru, informan merasa tertantang.	Menengah: Sejauh ini sudah ada upaya yang dilakukan tetapi karena baru menjabat beberapa bulan, belum terlihat hasilnya	Penting: Kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan tertinggi di sekolah sangat penting untuk dilibatkan.
Pengawas sekolah	Tinggi: Pengawas sekolah sangat berkontribusi dalam melakukan pengawasan dan penilaian kinerja sekolah sehingga mutu pelayanan bisa terjaga dengan baik.	Tinggi: Pengawas sekolah sebagai bagian dari struktur pendidikan memiliki kemauan untuk terlibat sesuai dengan fungsinya.	Rendah: Hasil dari penilaian pengawas sekolah sering kali tidak digunakan oleh kabupaten sebagai upaya memperbaiki pembelajaran	Tinggi: Dengan memaksimalkan peran pengawas sekolah, kontrol pelayanan akan lebih terjaga, termasuk memastikan laporan pengawas sekolah digunakan oleh pengambil kebijakan sesuai fakta yang ada di lapangan.

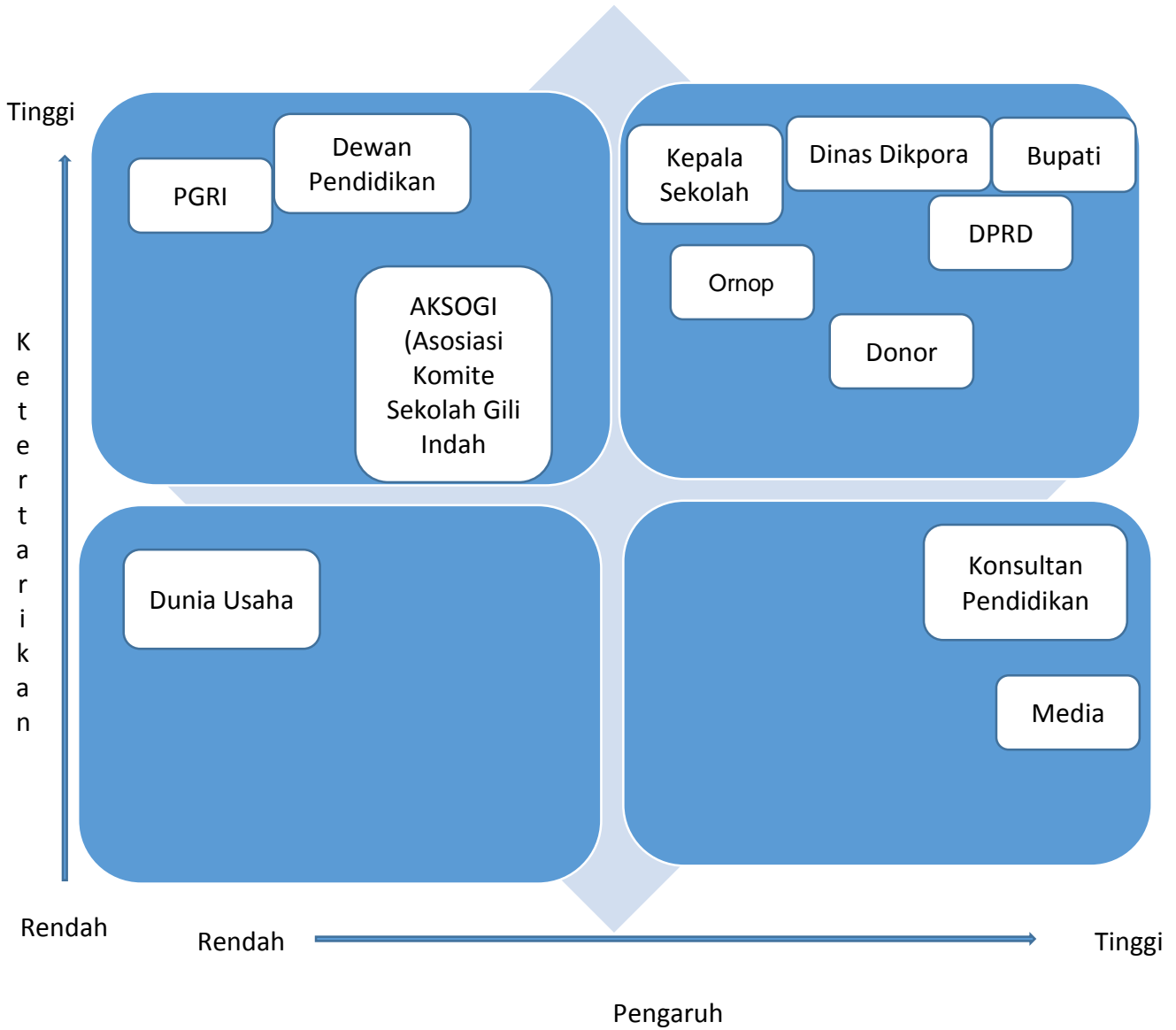
Pemangku Kepentingan	Potensi Kontribusi	Kemauan	Pengaruh Akibat	Perlunya Terlibat
UPTD	Tinggi: UPTDD merupakan kepanjangan tangan Dinas Dikpora di tingkat kecamatan. Perannya untuk berkontribusi dalam upaya mengendalikan mutu pendidikan sangat penting. Koordinasi dengan pihak sekolah sangat diperlukan sebagai penyambung kabupaten ke tingkat sekolah.	Tinggi: Keinginan untuk terlibat tinggi karena memang sudah menjadi bagian dari tugas dan kewenangannya.	Menengah: Perannya sebagai pengendali mutu tidak terlalu efektif dalam peningkatan mutu pembelajaran. Kualitas pembelajaran lebih banyak ditentukan oleh sekolah dan kebijakan dari kabupaten.	Tinggi: UPTDD sangat penting untuk dilibatkan karena dapat mengkoordinasikan sekolah di tingkat kecamatan dan dengan pihak sekolah.
Pendukung				
Komite sekolah	Rendah: Tugas komite sekolah hanya sebatas mitra sekolah dan salah satu fungsinya adalah ikut mengawasi pelayanan sekolah. Jika fungsi ini dilakukan dengan maksimal, kualitas pembelajaran dapat meningkat. Namun, komite sekolah jarang dilibatkan dalam urusan sekolah sehingga sulit untuk mengharapkan peran dari komite sekolah dalam meningkatkan pembelajaran.	Rendah: Komite sekolah sibuk dengan urusan lain yang menjadi pekerjaan mereka sehari-hari. Selain itu, ketaktahuan mereka terhadap fungsi dan tugas komite sekolah ikut menghambat kontribusi dan keinginan mereka dalam pembelajaran.	Rendah: Komite sekolah dalam pelaksanaannya hanya sebagai “stempel” sekolah. Tidak ada pengaruh nyata dalam upaya meningkatkan pembelajaran, walaupun potensinya ada.	Tinggi: Sebagai bagian dari sistem pendidikan, peran komite sekolah jika berjalan maksimal akan sangat besar pengaruhnya. Komite sekolah merupakan kontrol dari orang tua dan masyarakat terhadap mutu pendidikan. Jika komite sekolah dilibatkan dan bisa aktif terlibat secara maksimal, maka akan berdampak pada kualitas pembelajaran.
PGRI	Tinggi: PGRI bisa berperan dalam peningkatan mutu guru melalui berbagai pelatihan dan kerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, PGRI dapat melakukan advokasi apabila guru-guru mengalami masalah, terutama dengan orang tua siswa dan juga pihak lain.	Rendah: Kondisi PGRI masih terpecah-pecah setelah pilkada di Kabupaten Lombok Utara sehingga secara organisasi belum bisa bergerak dengan aktif. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa berkonsolidasi agar organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya.	Rendah: PGRI belum mampu mendukung kebutuhan para guru dalam peningkatan kapasitas maupun dalam pembelaan ketika guru-guru mengalami masalah. PGRI juga masih belum bisa berperan untuk para GTT yang membutuhkan peningkatan kesejahteraan.	Tinggi: Kalau PGRI berjalan normal, PGRI dapat berperan dalam peningkatan mutu guru dan kualitas pembelajaran. Selain itu, PGRI dapat melindungi anggotanya (para guru) melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan orang tua murid.

Pemangku Kepentingan	Potensi Kontribusi	Kemauan	Pengaruh Akibat	Perlunya Terlibat
KKG	Tinggi: KKG merupakan salah satu organisasi guru yang bisa berperan dalam meningkatkan pembelajaran melalui peningkatan kapasitas guru. KKG bisa menjadi wadah untuk berbagi informasi metode dan cara pembelajaran yang tepat, tetapi sejauh ini peran KKG belum maksimal.	Tinggi: Sebagai salah satu organisasi guru, KKG ingin terlibat dalam pembelajaran, tetapi sejauh ini belum ikut serta secara maksimal.	Rendah: Pada kenyataannya, KKG tidak banyak melakukan peran apapun dalam meningkatkan pembelajaran.	Menengah: KKG penting untuk dilibatkan, terutama terkait dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas guru, melalui kegiatan pelatihan dan berbagi informasi di antara guru. Walaupun demikian, ada kelompok guru lain yang juga bisa berperan sama seperti KKG.
Ornop - Klub Baca Perempuan	Tinggi: KBP, yang bergerak pada peningkatan minat baca dan literasi masyarakat, saat ini telah memiliki sekolah alam, 21 cabang klub baca, dan memediasi relawan yang tersebar dan bergerak di desa dan kecamatan di Lombok Utara untuk berkontribusi dalam gerakan Tradisi Literasi di masyarakat.	Tinggi: Karena diinisiasi dari gerakan masyarakat dan tidak sebatas program pemerintah, KBP menjadi desain gerakan organisasi masyarakat yang berfokus pada peningkatan budaya literasi dengan menanamkan minat baca dan belajar dari lingkungan.	Tinggi: KBP menginisiasi terselenggaranya gerakan gemar membaca dan menandatangani MoU dengan bupati (2015) untuk mendukung gerakan literasi bagi masyarakat.	Tinggi: KBP telah mendirikan cabang dan mengerakkan relawan dan bermitra dengan sekolah sebagai strategi untuk memengaruhi kebijakan dan program pemerintah serta memengaruhi cara pandang masyarakat akan pentingnya literasi.
Media lokal - Radar Lombok	Menengah: Media tidak hanya sekadar tertarik terhadap pendidikan. Jika peran mereka lebih ditingkatkan dalam hal kontrol dan informasi terhadap hasil pembelajaran, maka peluangnya cukup besar.	Menengah: Media tidak sekadar memberitakan pendidikan. Media juga memberitakan hal lainnya.	Menengah: Tidak semua pemberitaan media terkait pendidikan dijadikan referensi untuk mengambil kebijakan, tetapi ada beberapa hasil pemberitaan media yang kemudian direspons oleh dunia usaha dan masyarakat, seperti setelah memberitakan tentang kerusakan sekolah, ada sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat untuk sekolah tersebut.	Menengah: Media cukup menjadi alat untuk menyebarkan informasi dan kontrol terhadap kondisi pendidikan.
Dewan Pendidikan	Menengah: Dewan Pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan, tetapi jika perannya dalam mengevaluasi, mengawasi, dan memberi rekomendasi dimaksimalkan,	Tinggi: Dewan Pendidikan memiliki kemauan untuk terlibat, tetapi terkendala oleh sumber daya manusia dan kurangnya anggaran.	Rendah: Walaupun Dewan Pendidikan sudah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki pembelajaran dan memberikan rekomendasi kepada Dinas Dikpora, bupati, dan gubernur, rekomendasi tersebut jarang sekali	Tinggi: Dewan Pendidikan harus dilibatkan dalam perbaikan pembelajaran dan difungsikan kembali perannya sesuai dengan aturan.

Pemangku Kepentingan	Potensi Kontribusi	Kemauan	Pengaruh Akibat	Perlunya Terlibat
	maka akan membantu upaya perbaikan pembelajaran		dijadikan sebagai rujukan oleh pengambil kebijakan.	
Orang tua	Tinggi: Orang tua di SDN A dikenal memberi banyak kontribusi dalam berbagai upaya pembangunan sekolah (terutama pembangunan fisik)	Tinggi: Terlihat dari besarnya kontribusi orang tua dalam pembangunan fisik sekolah selama ini	Sedang: Pelibatan orang tua masih sebatas dalam penggalangan dana atau pembagian bantuan dari pemerintah saja	Tinggi: Waktu terbesar anak lebih banyak berada di rumah
Kepala desa	Tinggi: Kepanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat	Tinggi: Memiliki inisiatif besar dalam melakukan beberapa upaya dan gerakan (meskipun belum fokus pada sektor pendidikan). Sudah bisa melihat potensi dari penggunaan dana desa untuk pengembangan pendidikan.	Tinggi: Kepala desa terbantu dengan adanya dana desa. Informan sendiri juga memiliki kedekatan politik dengan kepala daerah.	Tinggi: Dana desa memiliki potensi untuk dimanfaatkan untuk sektor pendidikan

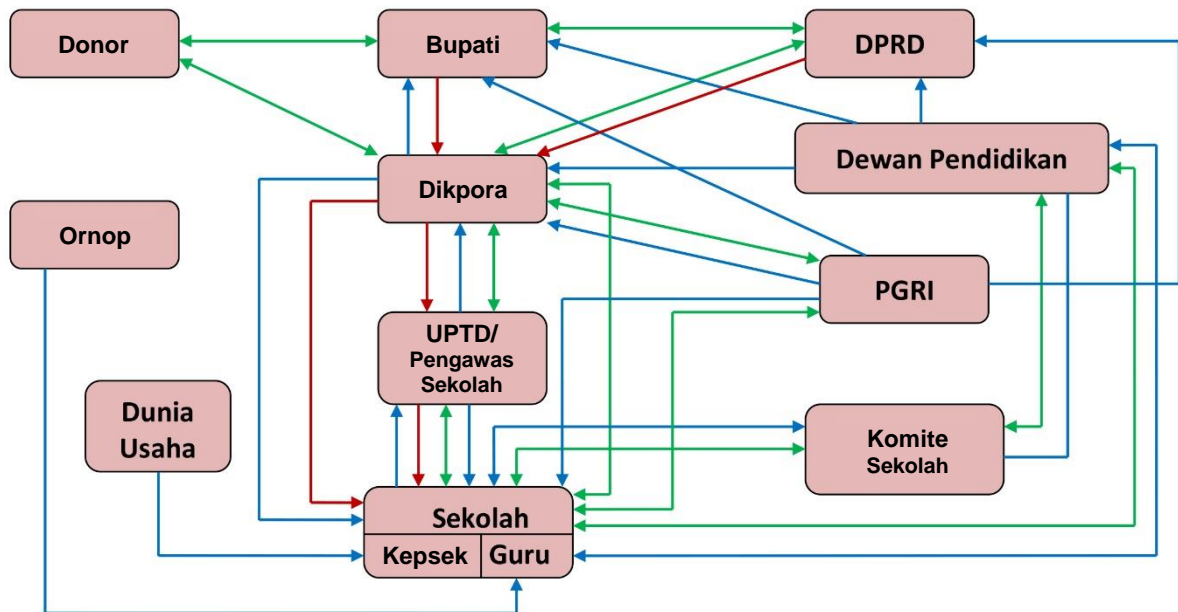
LAMPIRAN 5

Peta Pemangku Kepentingan



LAMPIRAN 6

Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan



KETERANGAN :

-  : GARIS INPUT
-  : GARIS KOORDINASI
-  : GARIS PERINTAH

LAMPIRAN 7

Tabel A3. Matriks Metode Komunikasi

Pemangku Kepentingan	Metode Komunikasi yang Dipilih/Dipakai	Waktu yang Optimal	Kendala
REGULATOR			
Dinas Dikpora	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) <p>Berupa: Rapat (misalnya dengan SKPD terkait, UPTDD, kepala sekolah, DPRD), rapat forum SKPD, forum WhatsApp SKPD, menerima laporan dari UPTDD dan pengawas sekolah</p>	Kapan saja ketika diperlukan	Dalam komunikasi berupa pelaporan (oleh UPTDD dan kepala sekolah), pada beberapa kasus isi laporan sifatnya hanya formalitas saja (tak jarang hanya menyontek laporan yang sudah ada)
Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) <p>Berupa: Rapat/pertemuan langsung (ada pertemuan besar yang melibatkan semua SKPD dan masyarakat, yakni forum gendurasa), WhatsApp (salah satunya adalah forum SKPD yang dipantau langsung oleh bupati: merupakan forum evaluasi, juga ada komunikasi SKPD setiap bulan), telepon (jika tidak bisa bertemu atau untuk membuat janji bertemu), SMS</p>	Kapan saja ketika diperlukan	Komunikasi dengan Dinas Dikpora yang kadang-kadang tidak berjalan lancar (Dinas Dikpora adalah pemegang peran utama dalam sektor pendidikan, Bappeda hanya sebatas memfasilitasi perencanaan program saja). Alhasil, Dinas Dikpora kurang bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada ke dalam program operasional dengan baik
Asda III	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) <p>Berupa: Rapat/pertemuan langsung, telepon (jika tidak bisa bertemu atau untuk membuat janji bertemu), SMS</p>	Kapan saja ketika diperlukan	Mengatur waktu, terutama untuk rapat dengan bupati
DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) 	Kapan saja ketika diperlukan	Kendala yang paling banyak dihadapi dari konstituen adalah terlalu banyak keinginan konstituen yang harus diakomodasi

Pemangku Kepentingan	Metode Komunikasi yang Dipilih/Dipakai	Waktu yang Optimal	Kendala
	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) Berupa: WhatsApp, media (koran lokal): cetak dan <i>online</i> , radio (RRI), Facebook, surel, kunjungan langsung, dengar aspirasi di gedung dewan		dan sering kali tidak terkait dengan pekerjaan/pembangunan daerah
PELAKSANA			
Guru SD	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) Berupa: a) Rapat di sekolah (dengan guru-guru lain, kepala sekolah, dan orang tua murid) b) Telepon dan SMS biasa digunakan untuk komunikasi dengan guru-guru lain atau kepala sekolah (misalnya ketika orang tua mengabarkan anaknya tidak bisa masuk) c) Surat diberikan kepada orang tua murid ketika akan dilaksanakan rapat yang melibatkan orang tua d) Forum guru (PGRI, KKG)	Di luar jam mengajar	Waktu yang tersedia di luar jam mengajar terbatas
Guru SMP	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) Berupa: a) Rapat di sekolah (dengan guru-guru lain, kepala sekolah, dan orang tua murid) b) Telepon dan SMS biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan guru-guru lain atau kepala sekolah (misalnya ketika mengabarkan tidak bisa masuk) c) Surat diberikan kepada orang tua murid ketika akan dilaksanakan rapat yang melibatkan orang tua d) Forum guru (PGRI, MGMP)	Di luar jam mengajar	Waktu yang tersedia di luar jam mengajar terbatas
Kepala sekolah SD	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) Berupa: a) Rapat dengan UPTDD dan Dinas Dikpora b) Rapat di sekolah (dengan guru dan orang tua murid)	Pada saat jam sekolah berlangsung	Ketika melibatkan guru pada jam pelajaran/jam sekolah, maka akan mengganggu kegiatan mengajar. Namun, waktu yang tersedia di luar jam sekolah sangat terbatas (guru mengajar di tempat lain, jarak sekolah-rumah guru sangat jauh) Untuk sekolah-sekolah di lokasi perdesaan/terpencil, jarak menjadi kendala dalam memenuhi undangan pertemuan

Pemangku Kepentingan	Metode Komunikasi yang Dipilih/Dipakai	Waktu yang Optimal	Kendala
	<ul style="list-style-type: none"> c) Telepon dan SMS biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan guru (misalnya ketika mengabarkan anak tidak bisa masuk) atau dengan kepala-kepala sekolah lain yang tergabung dalam forum kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) d) Surat diberikan kepada orang tua murid ketika akan dilaksanakan rapat yang melibatkan orang tua e) Forum KKKS f) Tatap muka langsung pada saat mendapat supervisi dari pengawas sekolah 		Di beberapa lokasi (perdesaan atau terpencil), keberadaan sinyal telekomunikasi juga menjadi kendala
Kepala sekolah SMP	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) <p>Berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rapat dengan UPTDD dan Dinas Dikpora b) Rapat di sekolah (dengan guru dan orang tua murid) c) Telepon dan SMS biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan guru (misalnya ketika mengabarkan tidak bisa masuk) atau dengan kepala-kepala sekolah lain yang tergabung dalam forum KKKS d) Surat diberikan kepada orang tua murid ketika akan dilaksanakan rapat yang melibatkan orang tua e) Forum KKKS f) Tatap muka langsung pada saat mendapat supervisi dari pengawas sekolah dan pengawas mata pelajaran 	Pada saat jam sekolah berlangsung	<p>Ketika melibatkan guru pada jam pelajaran/jam sekolah, maka akan mengganggu kegiatan mengajar. namun waktu yang tersedia di luar jam sekolah sangat terbatas (guru mengajar di tempat lain, jarak sekolah-rumah guru sangat jauh)</p> <p>Untuk sekolah-sekolah di lokasi perdesaan/terpencil, jarak menjadi kendala dalam memenuhi undangan pertemuan</p> <p>Di beberapa lokasi (perdesaan atau terpencil), keberadaan sinyal telekomunikasi juga menjadi kendala</p>
Pengawas SD	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) <p>Berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rapat dengan UPTDD, Dinas Dikpora, koordinator pengawas sekolah, sekolah (guru dan kepala sekolah) b) Laporan pengawas sekolah c) Supervisi kepada sekolah d) Pertemuan rutin pengawas sekolah di kabupaten e) Facebook pengawas SD 	<p>Pada saat jam sekolah</p> <p>Untuk komunikasi yang sifatnya darurat/mendadak (misalnya ketika ada rapat mendadak), informasi disampaikan via SMS, telepon, surel, media sosial seperti Facebook, meskipun setelah itu pada saat acara berlangsung surat undangan</p>	Jika melibatkan guru di saat jam sekolah, maka akan mengganggu kegiatan belajar mengajar

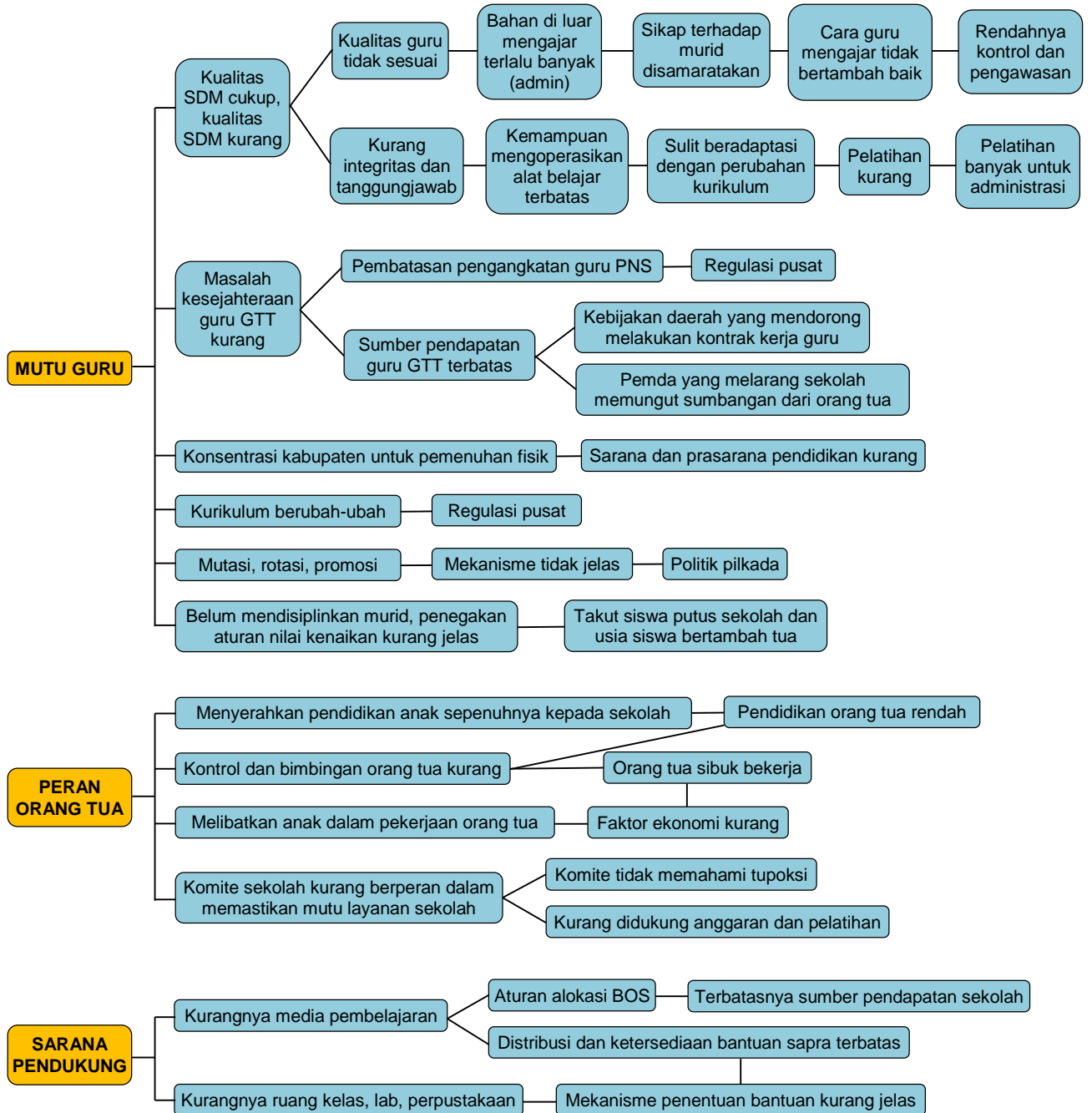
Pemangku Kepentingan	Metode Komunikasi yang Dipilih/Dipakai	Waktu yang Optimal	Kendala
		tetap diberikan sebagai jalur resmi	
Pengawas SMP	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) Berupa: <ol style="list-style-type: none"> Rapat dengan UPTDD, Dinas Dikpora, koordinator pengawas sekolah, sekolah (guru dan kepala sekolah) Laporan pengawas sekolah Supervisi kepada sekolah Pertemuan rutin pengawas sekolah di kabupaten 	Pada saat jam sekolah Untuk komunikasi yang sifatnya darurat/mendadak (misalnya ketika ada rapat mendadak), informasi disampaikan via SMS, telepon, surel, media sosial seperti Facebook, meskipun setelah itu pada saat acara berlangsung surat undangan tetap diberikan sebagai jalur resmi	Jika melibatkan guru di saat jam sekolah, maka akan mengganggu kegiatan belajar mengajar Berbeda dengan pengawas SD yang berkedudukan di UPTDD, kantor pengawas SMP berkedudukan di Dinas Dikpora -> bagi pengawas yang berlokasi jauh dari Dinas Dikpora, maka akan sulit menjangkaunya
UPTD	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) Berupa: Rapat, telepon, SMS, surat/laporan	Kapan saja ketika diperlukan	Laporan UPTD tidak banyak dipakai oleh Dinas Dikpora Sering kali kepala sekolah berhubungan langsung dengan Dinas Dikpora
PENDUKUNG			
Komite sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) Berupa: Rapat (dengan pihak sekolah dan mewakili orang tua murid), telepon, SMS, surat (kepada orang tua murid)	Kapan saja ketika diperlukan Setiap ada perubahan kebijakan/kebijakan baru terkait kegiatan belajar murid di sekolah	Komite sekolah lebih sering dimanfaatkan sebagai penghimpun dana dari orang tua murid oleh pihak sekolah
PGRI	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) Berupa: Rapat/pertemuan langsung, forum pertemuan, telepon, SMS, surat resmi, WhatsApp, media sosial	Kapan saja ketika diperlukan	Media sosial kerap dijadikan ajang caci maki dan perseteruan politik lokal. Dulu, PGRI memiliki dan laman FB, tetapi akhirnya ditutup karena menjadi ajang caci maki

Pemangku Kepentingan	Metode Komunikasi yang Dipilih/Dipakai	Waktu yang Optimal	Kendala
KKG	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) Berupa: Rapat dan pertemuan di sekolah (dengan guru lain, kepala sekolah, dan orang tua murid)	Di luar jam sekolah	Waktu di luar jam sekolah sangat terbatas sehingga sering kali pertemuan dilakukan pada saat jam sekolah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar
KBP	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) Berupa: a)Rapat/temu langsung b)Kegiatan-kegiatan (membaca bersama, pelatihan, dan sebagainya) yang melibatkan masyarakat dan pihak-pihak pendukung c)Telepon, SMS, WhatsApp, Facebook, surel	Setiap saat	Menghubungkan/merangkul banyak pihak dari berbagai latar belakang
Media Lokal – Radar Lombok	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) Berupa: Verifikasi informasi secara langsung ke narasumber, telepon, SMS, WhatsApp, surel	Kapan saja ketika diperlukan	Tak semua kritikan melalui tulisan diterima dengan lapang dada oleh semua pihak
Dewan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) Berupa: Surat, rapat/pertemuan langsung, telepon (metode paling disukai adalah surat resmi tertulis)	Kapan saja ketika diperlukan	Sementara informan memegang teguh pemakaian metode komunikasi tertulis melalui surat, saat ini makin sedikit pihak lain yang meminatinya karena mulai beralih pada komunikasi elektronik
Orang tua	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) Berupa: a)Rapat antara orang tua murid dan guru: rapat tahunan, rapat untuk membahas program bantuan b)Orang tua jarang menggunakan teknologi komunikasi dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah atau komite sekolah.	Kapan saja ketika diperlukan	Frekuensi rapat/komunikasi dengan pihak sekolah masih sangat minim, hanya setahun sekali pada saat kenaikan kelas atau pada saat-saat tertentu ketika sekolah membutuhkan dukungan orang tua murid

Pemangku Kepentingan	Metode Komunikasi yang Dipilih/Dipakai	Waktu yang Optimal	Kendala
	Biasanya komunikasi melalui surat undangan dan pertemuan langsung melalui rapat-rapat		
Kepala desa	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) Berupa: a) Telepon, SMS, surat, WhatsApp, Facebook, surel b) Kepala desa yang telah banyak memanfaatkan media sosial adalah kepala desa Desa Tanjung (perkotaan). Selain terlibat sebagai anggota tim sukses bupati terpilih, pihak bersangkutan juga aktif menjadi pengurus grup WhatsApp Asosiasi Kepala Desa) se-Kabupaten Lombok Utara	Kapan saja ketika diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> - Menghubungkan/merangkul banyak pihak dari berbagai latar belakang berbeda - Politik lokal
SASARAN			
Murid SD	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) Berupa: Belajar secara berkelompok (bersama teman), belajar dengan guru (pelajaran tambahan atau les), belajar dari internet (mesin pencari, Facebook)	Kapan saja ketika diperlukan	Terdapat perbedaan antara murid SD di daerah perkotaan (SDN A) dan perdesaan (SDN B). Murid SD yang berlokasi di kota sudah memanfaatkan internet untuk mencari bahan pelajaran dan sudah mengakses les privat (Ganesha Operation). Selain mengakses internet menggunakan telepon genggam, murid-murid di kota juga menggunakan laptop milik orang tua mereka. Namun, murid SD di desa belum ada yang memanfaatkan internet karena keterbatasan sinyal dan juga kepemilikan alat komunikasi.
Murid SMP	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi langsung (tatap muka) - Komunikasi tidak langsung (suara) - Komunikasi tidak langsung (tulisan) - Komunikasi tidak langsung (tulisan dan gambar) Berupa: Telepon, SMS, Facebook, belajar secara berkelompok (bersama teman), belajar dari guru (pelajaran tambahan atau les), dan belajar dari internet (mesin pencari, Facebook)	Kapan saja ketika diperlukan	Baik di kota maupun di desa, murid SMP sudah bisa memanfaatkan internet ("Mbah Google") untuk mencari bahan pelajaran. Murid di kedua lokasi juga sudah memanfaatkan telepon genggam, baik sebagai alat untuk mengakses internet maupun sebagai alat berkomunikasi dengan teman. Kendala biasanya ditemui murid di daerah perdesaan yang akses terhadap sinyal komunikasinya terbatas. Kendala lain adalah sulitnya pengawasan penggunaan media komunikasi untuk hal-hal yang negatif.

LAMPIRAN 8

Analisis Pohon Masalah



LAMPIRAN 9

Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah

Permasalahan	Lembaga yang Berwenang	Upaya	Kapasitas	
			Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
Mutu Guru	Kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Memberi contoh kedisiplinan Menempatkan guru yang tepat Menetapkan target dan memberikan imbalan Mengelompokkan murid 	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan melakukan supervisi Kewenangan alokasi sumber daya (guru, dana, dan sebagainya) 	<ul style="list-style-type: none"> Integritas guru Peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru Kepastian sumber daya
	Pengawas sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penilaian kemampuan guru Melakukan penilaian kemampuan kepala sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan supervisi dan bimbingan untuk guru dan kepala sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penilaian pengawas sekolah dijadikan pertimbangan dinas dalam pengambilan kebijakan (khususnya mutasi dan rotasi) Hasil penilaian pengawas sekolah dijadikan pertimbangan Dinas Dikpora dalam melakukan peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah
	Dewan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan ketersediaan guru (kuantitas dan kualitas) Rekomendasi mutu pembelajaran ke kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberi saran dan rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan untuk pengawasan dan evaluasi secara luas Penambahan anggaran
	Dinas Dikpora	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pelatihan Membuat peta jalan dan memastikan SPM terpenuhi Pelatihan kepala sekolah ke Australia 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber daya (anggaran, kewenangan, dan SDM) 	<ul style="list-style-type: none"> Menerjemahkan visi dan misi bupati dalam program yang lebih detail Basis data pendidikan Regulasi yang lebih teknis Komitmen bupati dan DPRD
	Bupati	<ul style="list-style-type: none"> Mutasi, rotasi, dan promosi tenaga pendidik Komitmen terhadap pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Visi dan misi pendidikan Kewenangan dalam mengambil kebijakan dan program 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana yang sanggup menerjemahkan visi dan misi secara teknis Dukungan DPRD Komitmen bupati untuk kesejahteraan dan kapasitas guru Basis data pendidikan sebagai input Basis data pendidikan
	DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan anggaran sesuai dengan usulan Melakukan penganggaran, regulasi, dan pengawasan Menampung aspirasi guru 	<ul style="list-style-type: none"> Kewenangan penganggaran, pengawasan, dan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pertimbangan ahli Basis data pendidikan
Perhatian orang tua	Komite sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Kerja sama dengan ornop untuk meningkatkan literasi dan numerasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan komite sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Supervisi/sosialisasi dari dewan pendidikan Komunikasi dengan orangtua menyangkut

Permasalahan	Lembaga yang Berwenang	Upaya	Kapasitas	
			Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
				tentang pembelajaran anak
	Dewan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Merekomendasikan pelatihan komite sekolah • Penyuluhan kepada komite sekolah dan orang tua tentang peran mereka dalam pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan untuk evaluasi dan memberi saran dan rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk pengawasan dan evaluasi secara luas • Penambahan anggaran
	Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan ke rumah murid, agar orang tua memberi perhatian lebih • Komitmen tertulis antara pihak sekolah dan orang tua agar: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anak bersekolah hingga tuntas ○ Tidak menikah sebelum sekolah tuntas 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran kunjungan rumah • Forum pertemuan orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan forum orang tua untuk memecahkan masalah pembelajaran
Sarana dan prasarana	Komite sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat proposal dan melobi DPRD dan bupati untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana • Membuat proposal ke sektor swasta dan ornop untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas jaringan
	Kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Melobi pihak ornop untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana • Melobi PU untuk membantu membuat sarana dan prasarana • Memberikan data kebutuhan sekolah terkait dengan sarana dan prasarana • Komunikasi dengan UPTDD terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana • Mengkomunikasikan masalah terkait sarana dan prasarana kepada media 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat perencanaan dan penganggaran sekolah • Komunikasi secara struktural 	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme yang jelas untuk penerimaan bantuan sarana dan prasarana dari Dinas Dikpora • Kebebasan memperoleh dana dari sumber lain (regulasi)
	Dinas Dikpora	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan dan mendistribusikan sarana dan prasarana ke tingkat sekolah • Bekerja sama dengan SKPD lain untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sarana dan prasarana ke tingkat sekolah • Membuat perencanaan dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data dan kebutuhan sekolah • Kerja sama yang lebih luas dengan SKPD lain

LAMPIRAN 10

Daftar Data Sekunder yang Diperoleh dari Kabupaten Lombok Utara*

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara 2016
2. Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka, 2011–2015
3. Data Valid Statistik 2015 (berisi data sektor pendidikan):
 - a. Jumlah satuan PAUD menurut jenis satuan dan nomor pokok satuan PAUD nasional 2015
 - b. Jumlah satuan PAUD menurut status dan status kepemilikan 2015
 - c. Jumlah satuan PAUD menurut izin penyelenggaraan dan status kepemilikan bangunan 2015
 - d. Jumlah pengelola PAUD menurut jenis kelamin 2015
 - e. Jumlah pendidik PAUD dan tenaga ahli menurut jenis kelamin, status, dan NUPTDK 2015
 - f. Jumlah pendidik PAUD dan tenaga ahli menurut program 2015
 - g. Jumlah pendidik PAUD dan tenaga ahli menurut pendidikan 2015
 - h. Jumlah pendidik PAUD dan tenaga ahli menurut pelatihan 2015
 - i. Jumlah peserta didik PAUD menurut jenis kelamin dan umur 2015
 - j. Jumlah peserta didik PAUD menurut jenis layanan
 - k. Jumlah SD negeri 2015
 - l. Jumlah siswa baru tingkat SD negeri tahun ajaran 2014/2015
 - m. Jumlah siswa putus sekolah SD negeri 2015
 - n. Data keadaan fisik sekolah SD negeri 2015
 - o. Data kebutuhan guru SD 2015
 - p. Jumlah siswa Paket A 2015
 - q. Jumlah siswa MI 2015
 - r. Jumlah siswa SD usia 7–12 2015
 - s. Data kelulusan siswa SD 2013
 - t. Jumlah siswa Paket B 2015
 - u. Jumlah siswa MTS 2015
 - v. Jumlah siswa SMP usia 13–15 2015
 - w. Data kelulusan siswa SMP 2013
 - x. Jumlah siswa SMP 2015
 - y. Jumlah siswa baru SMP negeri tahun ajaran 2014/2015
 - z. Jumlah siswa putus sekolah SMP negeri 2015
 - aa. Data keadaan fisik sekolah SMP 2015
 - bb. Jumlah guru sekolah tingkat SMP 2015
 - cc. Jumlah siswa pada tingkat SMA/SMK 2015
 - dd. Jumlah guru sekolah SMA/SMK/MA 2015
 - ee. Jumlah fisik sekolah SMA 2015
 - ff. Jumlah fisik sekolah SMK 2015
 - gg. Data kelulusan siswa SMA 2015

- hh. Data kelulusan siswa Paket C 2015
 - ii. Jumlah siswa Paket C 2015
 - jj. Kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan, dan jumlah pejabat struktural dan fungsional 2015
 - kk. Rekapitulasi jumlah PNS lingkup Dikpora 2015
 - ll. Jumlah siswa MTS 2015
 - mm. Jumlah siswa MA 2015
 - nn. Data penduduk sementara 2014/2015
4. Rencana Strategis Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara 2011–2015
 5. Profil SPM Pendidikan Kabupaten Lombok Utara 2014
 6. Rekap Program dan Kegiatan pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara 2016
 7. Rancangan Penjabaran RPJMD pada Rencana Strategis SKPD Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara 2016–2020
 8. Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Lombok Utara 2015

*semua data dalam bentuk *soft copy* (salinan lunak).

LAMPIRAN 11

Tabel A5. Diagram Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
1. Tahap Persiapan	Merancang penelitian: mencari metode yang tepat untuk menjawab tujuan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu pada <i>terms of reference</i> (ToR) - Pemilihan nama sekolah tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Menunggu kepastian sekolah sampel dari INOVASI - Menerjemahkan ToR ke dalam rancangan penelitian sehingga diperoleh metode pengumpulan dan analisis data yang tepat - Memilih pendekatan analisis yang paling tepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan komunikasi secara intensif dengan INOVASI - Melakukan rapat-rapat dengan seluruh anggota tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar dan peta lokasi sekolah sampel - Tujuan penelitian disekapati - Metode pengumpulan data: wawancara mendalam (WM), wawancara kelompok (WK), dan FGD - Metode analisis data
	Menyusun instrumen	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan penelitian yang jelas sudah dirumuskan - Metode penelitian (pengumpulan dan analisis data sudah disetujui bersama) - Pembagian tugas anggota tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyamakan pemahaman tentang definisi kunci, misalnya hasil pembelajaran, kualitas, tolok ukur, dsb. - Penyesuaian pertanyaan atau data yang ingin digali dengan waktu yang tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Draf awal instrumen yang sudah dibuat oleh anggota tim didiskusikan kembali dalam rapat tim - Masing-masing anggota kembali memperbaiki instrumen berdasarkan hasil diskusi tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Draf instrumen yang siap digunakan untuk pelatihan dan uji coba
	Pelatihan dan uji coba instrumen	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi dan jadwal uji coba harus ditetapkan sejak awal - Izin kunjungan sudah diterima dari pihak berwenang di lokasi uji coba - Mendapat daftar pemangku kepentingan dan nomor kontaknya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan waktu pelaksanaan yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota tim - Sebagian pemangku kewenangan yang dihubungi menginginkan pemberitahuan lebih awal - Sebagian pemangku kepentingan tidak merespons permohonan uji coba instrumen - Waktu untuk mengontak pemangku kepentingan yang dilibatkan terlalu sempit 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim melakukan rapat untuk menyepakati lokasi dan jadwal uji coba - Mengirimkan anggota tim ke lokasi uji coba untuk menemui informan-informan kunci, menyepakati jadwal dan sekolah yang dijadikan uji coba 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi uji coba: Purwakarta - Tim berhasil menyepakati jadwal dengan Dinas Dikpora Kabupaten Purwakarta. Pihak Dinas Dikpora bersedia mengontak dan mengatur jadwal

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan logistik yang relevan dengan kebutuhan: pengumpulan data, transportasi, komunikasi - Semua peneliti yang terlibat harus sudah cukup mengerti dan terlatih dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Tantangan selama uji coba di lapangan: <ul style="list-style-type: none"> o Instrumen terlalu panjang sehingga memakan waktu lama untuk wawancara (khususnya WM) o Pemangku kepentingan banyak yang mengaitkan peningkatan pembelajaran dengan peningkatan karakter/akhlak murid o Informan WK rata-rata sangat aktif. Sekolah yang dipilih merupakan sekolah unggulan o Pengisian instrumen analisis masih membingungkan - Tidak semua peneliti yang turun ke lapangan terlibat sejak awal penelitian sehingga tingkat pengetahuan berbeda-beda - Peneliti yang sudah ikut serta sejak awal pun belum sepenuhnya menerima dengan baik metode yang digunakan studi ini - Pelatihan dan uji coba lapangan tidak dilakukan dengan tuntas 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi bersama semua anggota tim - Diskusi intensif dengan anggota tim lain yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi - Berbagi pengalaman sepanjang jalannya penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - WM dan WK dengan informan yang dibutuhkan - Perbaiki instrumen pengumpulan data: mempertajam yang kurang jelas, mengurangi pertanyaan ganda - Perbaiki instrumen analisis dengan memberi keterangan sumber isian pada setiap kolomnya (berdasarkan jawaban dari setiap nomor pertanyaan) - Pada akhirnya peneliti yang baru terlibat bisa meningkatkan pengetahuannya
	Pembagian tim dan kelompok kerja per kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Komposisi tim sesuai dengan yang direncanakan sejak awal (dengan pertimbangan tingkat pengetahuan dan beban kerja) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian anggota tim (yang pengetahuannya tentang penelitian ini cukup lengkap) tidak bisa ikut dalam kunjungan kedua dengan berbagai alasan: sakit, urusan keluarga, mengurus proyek lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Menarik anggota tim baru yang berasal dari internal SMERU 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian berjalan dengan cukup baik dengan berbagai penyesuaian
2. Tahapan Pengumpulan Data di Lombok Utara	Membuat daftar informan dan jadwal wawancara awal	<ul style="list-style-type: none"> - Mencocokkan daftar informan yang telah ditentukan oleh tim studi dengan informan yang tersedia (sesuai nomenklatur lokal) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua informan yang ada dalam daftar bisa ditemui karena berbagai alasan: sedang dinas keluar kota, jadwal penuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari informan alternatif (dalam institusi yang sama) dan nomor kontakannya secara <i>snowball</i> - Meminta bantuan pihak-pihak yang berhubungan atau informan yang telah berhasil 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Checklist</i> informan (semua informan yang ada dalam rencana berhasil dikunjungi)

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
				ditemui untuk menghubungi calon informan lain sehingga bisa dipastikan kesediaannya dan bisa dimasukkan ke dalam daftar informan	
	<p>Komunikasi awal dengan informan dan memperbarui daftar informan beserta jadwal wawancaranya (termasuk mengatur jadwal wawancara kelompok di tingkat sekolah) dan FGD di tingkat kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - (Sebelum kedatangan tim peneliti dari Jakarta) Peneliti tamu lokal melakukan komunikasi awal dan membuat janji wawancara dengan beberapa informan kunci di tingkat kabupaten - (Tim peneliti lengkap) Mengunjungi dan meminta izin kepada beberapa pemangku kepentingan kunci (Dinas Dikpora dan Bappeda) untuk melakukan penelitian di Lombok Utara dengan melibatkan sekolah-sekolah sampel (permintaan izin dilakukan bersama dengan wawancara mendalam) - Dengan bantuan Dinas Dikpora Bagian Dikdas, tim peneliti melakukan kontak awal dengan pihak sekolah - Mengunjungi sekolah-sekolah sampel dan mengatur jadwal WK di tingkat sekolah - Ditetapkannya jadwal dan tempat FGD dengan Bappeda sebagai tuan rumah mitra 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua calon informan bisa dihubungi - Waktu yang tersedia untuk peneliti tamu lokal terbatas karena singkatnya jeda waktu antara kunjungan lapangan I dan II - Pihak Dinas Dikpora tidak memiliki basis data sekolah yang lengkap dan mutakhir - Pejabat di Dinas Dikpora konsentrasinya terpecah karena adanya isu mutasi dan beban kerja yang berat bersamaan dengan periode penelitian ini - Sempat terjadi miskomunikasi mengenai pengaturan jadwal yang dilakukan sepihak oleh Dinas Dikpora tanpa konsultasi dengan tim peneliti - Jadwal FGD paling memungkinkan dilakukan pada 18 Agustus 2016 (sehari setelah acara peringatan 17 Agustus), jadwal ini agak riskan karena dikhawatirkan sedikit peserta yang bisa datang. Namun, FGD tidak bisa dilakukan sebelumnya karena seluruh SKPD harus menyelesaikan rancangan RPJMD dan tidak bisa setelahnya karena jadwal tim peneliti terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendatangi langsung calon informan (ke kantornya) - Meminta bantuan pihak-pihak yang berhubungan atau informan yang telah berhasil ditemui untuk menghubungi calon informan lainnya - Tim peneliti mengunjungi langsung sekolah dimaksud (yang mengalami miskomunikasi) - Pada saat bersamaan tim peneliti juga terus menjaga komunikasi dengan pihak Dinas Dikpora - Bappeda berperan sebagai tuan rumah, dan Bappeda yang mengundang semua pihak yang telah ditentukan (surat resmi dari Bappeda dan kontak oleh orang Bappeda) 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua calon informan bisa terhubung dan tidak ada jadwal (WM, WK, atau pun FGD) yang bentrok

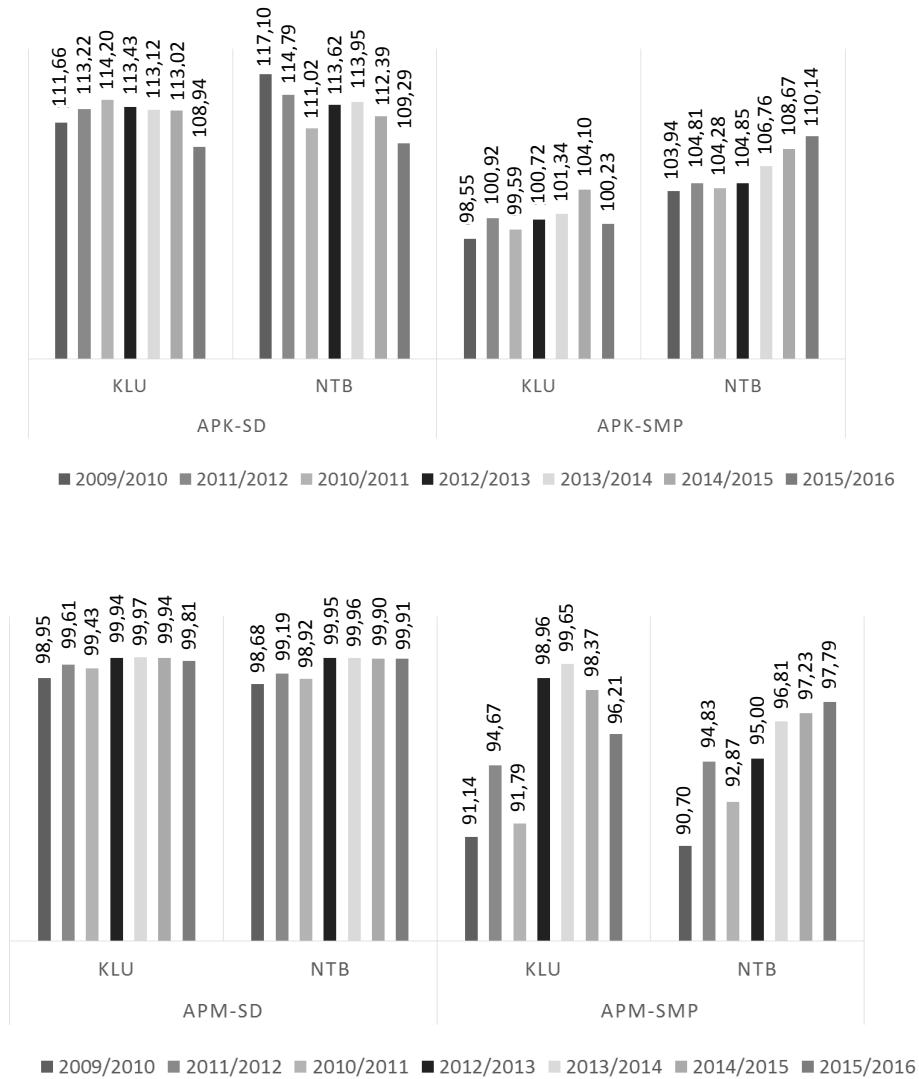
Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
	Wawancara mendalam dan wawancara kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal wawancara yang telah disepakati dengan masing-masing calon informan - Pembagian logistik WM dan WK: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Informed consent</i> - Suvenir - Konsumsi (khusus WK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa informan memiliki jadwal acara yang bentrok sehingga tim peneliti harus menunggu lebih lama, atau konsentrasi informan pada saat wawancara mendalam agak terpecah - Peneliti yang terlibat belum sepenuhnya mengerti maksud dari adanya <i>informed consent</i>; beberapa <i>informed consent</i> dimintakan di akhir wawancara - Penentuan jenis suvenir kurang mempertimbangkan pelaksanaannya. Sebagai contoh, suvenir untuk kepala sekolah dan komite sekolah sangat berbeda jauh, padahal wawancara keduanya sering dilakukan bersamaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada WM yang dilakukan dua kali untuk memastikan waktu dan konsentrasi informan dalam memberikan informasi serta agar tidak mengganggu kerja informan - Pembagian suvenir untuk kepala sekolah (berupa USB <i>flashdisk</i>) diberikan pengantar yang menyatakan bahwa USB tersebut untuk sekolah ini (bukan untuk kepala sekolah) untuk menjaga perasaan pengurus komite sekolah yang hanya mendapat tas 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh WM dan WK berjalan sesuai dengan jadwal
	Pelaksanaan FGD	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal dan tempat yang telah disepakati bersama Bappeda - Daftar peserta undangan yang telah disepakati bersama dengan Bappeda - Pembaruan hasil penelitian kepada Sekretaris Bappeda sebagai orang yang akan membuka dan mengawal acara; pembaruan yang diberikan tim peneliti akan menjadi bahan bagi Sekretaris Bappeda menyusun pengantar diskusi - Analisis temuan awal untuk dipresentasikan pada saat FGD sebagai konfirmasi dan untuk dikomentari oleh para pemangku kepentingan (dikoreksi jika ada yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua peserta yang diundang bisa hadir - Peserta datang agak terlambat dari jadwal - Ada beberapa bagian pedoman FGD yang kurang jelas sehingga tim peneliti sepakat untuk sedikit memodifikasinya - Pembahasan tentang akar permasalahan memakan waktu paling banyak sehingga waktu yang tersisa untuk bagian lain menjadi makin sedikit (ditambah peserta yang datang terlambat) - 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitator mempelajari dengan baik analisis yang telah disiapkan sebelum FGD dan tak segan-segan memberikan contoh yang berasal dari lapangan untuk membuka pikiran para peserta - Sekretaris Bappeda yang telah diperbarui oleh tim peneliti memberi pengantar yang cukup baik di awal FGD sehingga para peserta mengetahui hasil yang dipaparkan oleh tim peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> - FGD berjalan baik sesuai jadwal - Analisis hasil penelitian awal yang telah terkonfirmasi

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
		kurang sesuai dan ditambah jika masih ada yang kurang)			
3. Tahapan Analisis Data	Penulisan catatan lapangan, entri data, dan verbatim	<ul style="list-style-type: none"> - Rekaman wawancara - Catatan masing-masing peneliti - Tabel entri data - Alokasi pekerjaan: catatan lapangan, entri data, dan verbatim 	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu yang tersedia sangat sempit - Tabel entri data diisi oleh masing-masing peneliti, tetapi tidak sepenuhnya bisa selesai karena waktu di lapangan yang singkat dan waktu sepulang dari lapangan yang juga terbatas karena beban penulisan verbatim yang harus dipenuhi oleh peneliti yang telah berkomitmen mengerjakan verbatim dari wawancara yang dilakukannya - Beban pengaturan pengerjaan verbatim (termasuk urusan administrasi proyek penelitian ini) bertumpu pada satu orang, padahal orang tersebut juga memiliki beban catatan lapangan dan laporan penelitian yang juga harus diselesaikan sesuai dengan jadwal. Terkait dengan hal ini, tampak bahwa belum ada mekanisme pengaturan kerja (tupoksi) yang jelas di SMERU - Sebagian peneliti tidak memperhatikan dan menjalankan dengan baik prinsip manajemen basis data penelitian yang telah disepakati sebelumnya, seperti dalam penamaan fail dan informasi waktu dan wawancara masing-masing informan sehingga manambah beban cukup besar untuk orang yang bertugas mengalokasikan pekerjaan verbatim dan orang yang berperan dalam manajemen basis data penelitian ini - Sebagian peneliti menyelesaikan catatan lapangannya dengan cepat, tetapi ada sebagian lainnya yang tidak bisa menyelesaikan tepat waktu sehingga catatan lapangan belum lengkap - Demikian pula dengan entri data 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim peneliti memanfaatkan sela-sela waktu di antara jadwal WM dan WK untuk menulis catatan lapangan - Verbatim FGD dilakukan oleh salah seorang tim peneliti - Sebagian verbatim diserahkan pengerjaannya kepada pihak luar - Orang yang bertugas mengalokasikan pekerjaan dan mengatur berbagai hal terkait administrasi penelitian meminta bantuan beberapa orang, walau beban yang ditanggungnya juga masih banyak - Memanfaatkan media komunikasi Telegram untuk menanyakan perkembangan pekerjaan dan untuk koordinasi pengaturan pekerjaan - Kerja lembur siang malam, dalam perjalanan, dan memakai waktu libur - Secara persisten menagih hasil catatan lapangan, terutama kepada para peneliti tamu 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian catatan lapangan sudah berhasil diselesaikan di lapangan. Hal-hal yang tidak selesai di lapangan dilanjutkan pengerjaannya sepulang dari lapangan - Pengerjaan catatan lapangan dan verbatim telah teralokasi dengan baik - Beberapa catatan lapangan akhirnya terselesaikan

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
	Analisis dan penulisan laporan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Catatan lapangan - Entri data - Kontrak kerja yang jelas dalam mengatur peran peneliti tamu - Waktu untuk berkonsentrasi menulis laporan - Hasil penelitian sesuai dengan kesepakatan awal SMERU dan INOVASI 	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu yang tersedia terbatas, jeda waktu antarjadwal kegiatan terlalu singkat - Catatan lapangan dan entri data belum sepenuhnya selesai - Tidak ada kejelasan peraturan/kebijakan terkait perpanjangan waktu kerja peneliti tamu - Kontrak yang ada juga kurang jelas mengatur peran peneliti tamu dalam penulisan laporan - Sebagian peneliti SMERU yang ada dalam tim ini, harus juga mengerjakan berbagai "perintilan" (termasuk merapihkan fail-fail yang ada, memeriksa, dan mengirimnya ke pemberi kerja) sebelum bisa benar-benar berkonsentrasi mengerjakan laporan -> waktu banyak terbuang - INOVASI meminta beberapa hasil penelitian tambahan yang sebelumnya tidak ada dalam kesepakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan media komunikasi Telegram untuk konfirmasi informasi - Koordinator lapangan membuat catatan sendiri poin-poin temuan sementara selama jalannya penelitian - Menyadari waktu yang sempit, tim peneliti menuntaskan diskusi temuan sekalian pada waktu persiapan FGD - Meminta pengertian dari para peneliti tamu untuk bekerja ekstra - Membuat sendiri adendum kontrak (tidak ada format khusus dari manajemen keuangan SMERU) - Bekerja lembur, untuk memenuhi tenggat 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kabupaten dikirim sesuai jadwal - Waktu pribadi terpakai

LAMPIRAN 12

Gambar A1. Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Ajaran 2009/2010–2015/2016

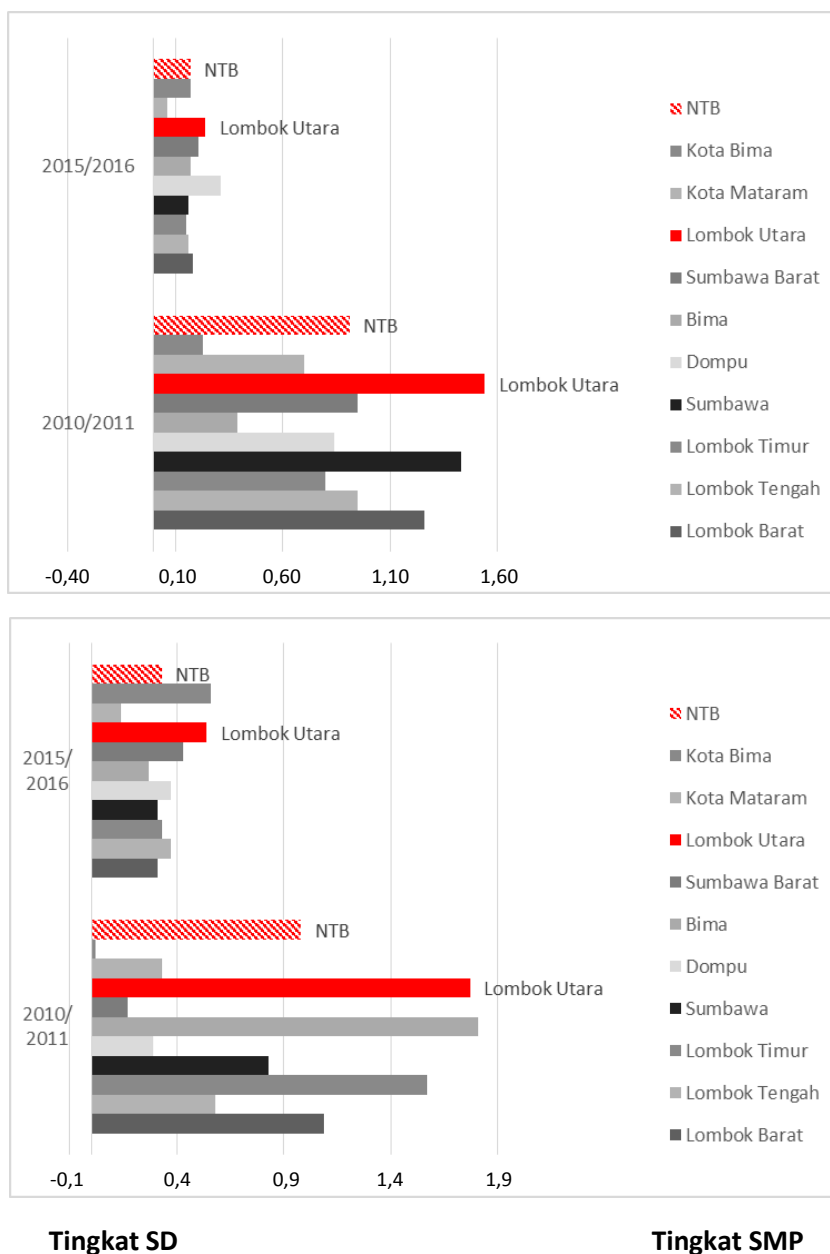


Sumber: Data mentah dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak dipublikasikan dan diolah lebih lanjut oleh peneliti SMERU.

Keterangan: angka dalam persen.

LAMPIRAN 13

Gambar A2. Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2015/2016













Sumber: Data mentah dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak dipublikasikan dan diolah lebih lanjut oleh peneliti SMERU.

Keterangan: angka dalam persen.

LAMPIRAN 14

Gambar A3. Hasil Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Ajaran 2014/2015

Kabupaten/ Kota	Nilai Rata-rata	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rentang Nilai UN (Tertinggi - Terendah)	Kategori Nilai (Berdasarkan Jumlah Nilai)
Kota Mataram	302,71	112,5	391,5		B
Kota Bima	216,35	100,5	358,5		D
Lombok Barat	238,63	40	380,5		C
Lombok Utara	174,1	105,5	366,5		D
Lombok Tengah	248,11	34	384,5		C
Lombok Timur	261,03	30	382		C
Sumbawa Barat	232,54	56	384		C
Sumbawa	222,96	103,5	372,5		C
Dompu	179,66	26	366		D
Bima	251,78	50	370,5		C

Sumber: Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

Keterangan: Rentang kelompok nilai UN mulai dari tertinggi hingga terendah yang terdiri atas kelompok nilai 100; 99-90; 85,1-89,9; 70,1-85; 60-70; 55,1-59,9; 40-55; 30-39,9; 20-29,9; 10-19,9; 0,01-9,9.

The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www.smeru.or.id

Facebook : @SMERUInstitute

Twitter : @SMERUInstitute

YouTube : The SMERU Research Institute

